



13/40979

**TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN BERBASIS  
MASYARAKAT DI PONDOK PESANTREN NURUL BAYAN  
KABUPATEN LOMBOK UTARA  
NUSA TENGGARA BARAT**



**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Magister Sains Ilmu Administrasi  
Bidang Mnat Administrasi Publik**

**Disusun Oleh :**

**H. AHMAD JAZRI**

**NIM. 015736526**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS TERBUKA  
JAKARTA**

**2012**

### Abstrak

Implementasi Kebijakan Pendidikan Berbasis Masyarakat  
di Pondok Pesantren Nurul Bayan kecamatan Bayan  
kabupaten Lombok Utara Nusa Tenggara Barat.

H. Ahmad Jazri

015736526

hahmadjazri@gmail.com

Kata Kunci: Implementasi, Pendidikan Berbasis Masyarakat, Pondok pesantren.

Pondok Pesantren Nurul Bayan merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang berada di kecamatan Bayan kabupaten Lombok Utara, dimana sejak awal berdirinya telah melaksanakan program pendidikan berbasis masyarakat (PBM) dengan sistem asrama. Untuk dapat memenuhi tuntutan nasional dan global, selain menyelenggarakan kurikulum pesantren, juga dituntut untuk mengikuti kurikulum Diknas. Untuk kepentingan tersebut diperlukan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 yang mengatur 8 standar pendidikan.

Penelitian ini berjudul: Implementasi Kebijakan Pendidikan berbasis Masyarakat di PP Nurul Bayan kecamatan Bayan kabupaten Lombok Utara Nusa Tenggara Barat. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengkaji dan menganalisa implementasi PBM di PP Nurul Bayan. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan kualitatif dengan metode diskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan kunci dalam wawancara adalah Pimpinan Pondok Pesantren, kepala MTs, Direktur TMI dan sekretaris PP Nurul Bayan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PBM di PP Nurul Bayan telah berjalan sesuai dengan amanat undang-undang no 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 16, dimana penyelenggaraannya didasarkan pada kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Pelaksanaan kurikulum di PP Nurul Bayan telah mengacu pada Permendiknas No 22 Tahun 2006 tentang standar isi dan Permendiknas No 9 tahun 2005 Pasal 7 tentang Struktur dan muatan KTSP pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Sedangkan Sarana-Prasarana dan tenaga pendidik telah sesuai dengan Permendiknas No 24 Tahun 2007.

Kinerja output pendidikan menunjukkan bahwa tingkat kelulusan siswa pada jenjang MTs dan Aliyah cukup tinggi untuk 2 tahun terakhir yaitu pada tahun ajaran 2009 – 2010 dan 2010 – 2011. Beberapa faktor-faktor yang mendukung implementasi PBM di PP Nurul Bayan adalah faktor disposisi, *fragmentation* pada faktor struktur birokrasi, faktor lingkungan dan faktor motivasi.

**ABSTRACT**

Implementation of education based community Policy  
at Nurul Bayan Islamic Boarding school in district of Bayan  
regency of North Lombok Nusa Tenggara Barat.

H. Ahmad Jazri

015736526

hahmadjazri@ gmail.com

**Key words:** *Implementation, Education based community, Pondok Pesantren*

Nurul Bayan Islamic Boarding school (PP. Nurul Bayan) is one of Islamic educational institution situated in district of Bayan regency of North Lombok, since its founding had carried out educational programme based on community by hostel system. To carry out national and global needs, this institution beside carrying out Pesantren curriculum, it is also expected to follow the rule of national education by carrying out national curriculum. For this importance it is needed governmental policy through standard of national education based on governmental rule number 19 of 2005 that manages eight standards of education.

The Research title is Implementation of education based community policy at Nurul Bayan Islamic Boarding school in district of Bayan regency of north Lombok. The Research aim is to understand and analyze the implementation of education based community policy at Nurul Bayan Islamic Boarding school.

The research methodology is qualitative approach with diskriptif method. The technique of data collection is observation, questioner technique and documentation. The key-informant is leader of Nurul Bayan Islamic Boarding school, chief of Tsanawiyah school, Director of TMI and secretary of Nurul Bayan Islamic Boarding school.

The result of research showed that Implementation of education based community policy at Nurul Bayan Islamic boarding school is performed well and have referred to the Government rule number 19 of 2005 section 1, verse 26 where the performance based on religion characteristic, social, culture, aspiration, and the potency of community as the realization of education from, for and by community. The curriculum implementation at Nurul Bayan Islamic institution, follows the rule of Minister of national education number 22 of 2006, for the curriculum standard follows the rule of Minister of national education number 19 of 2005 about KTSP (Curriculum of education unit level) for elementary school and secondary school. For the infrastructure and academic qualification of teachers follows the rule of Minister of national education number 24 of 2007.

The result of education output shows that students success reached out for MTS and Aliyah enough good for 2009 – 2010 and 2010 – 2011 academic year. Some factors suggest implementation of education-based community at Nurul Bayan Islamic boarding school is dispositions, fragmentation of bureaucratic structure, innovation and environment.

UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Implementasi Kebijakan Pendidikan berbasis Masyarakat di Pondok Pesantren Nurul Bayan kecamatan Bayan kabupaten Lombok Utara Nusa Tenggara Barat, adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan Adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Jakarta, 26 Agustus 2012

Yang Menyatakan



  
(H. Ahmad Jazri)  
NIM 015736526

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER  
(TAPM)

Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Pendidikan Berbasis Masyarakat  
di Pondok Pesantren Nurul Bayan kecamatan Bayan  
kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat.

NAMA : H. Ahmad Jazri  
NIM : 015736526  
PROGRAM STUDI : Ilmu Administrasi, Bidang Minat Administrasi Publik

Mengetahui:

Pembimbing I

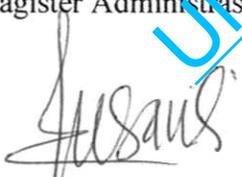
  
Dr. Sofjan Aripin, M.Si.  
NIP. 19660619 199203 1 022

Pembimbing II

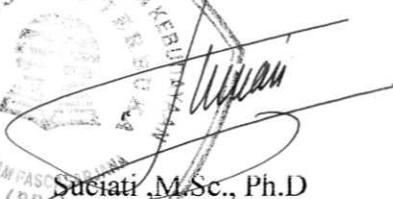
  
Dr. Mansur Afifi  
NIP. 196812311993031143

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu/Program  
Magister Administrasi Publik

  
Dra. Susanti, M.Si.  
NIP. 19671214 199303 2 002

Direktur Program Pascasarjana,

  
Suciati, M.Sc., Ph.D  
NIP. 19520213 198503 2 002



UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama : H. Ahmad Jazri  
 NIM : 015736526  
 Program Studi : Administrasi Publik  
 Judul Tesis : Implementasi Kebijakan Pendidikan Berbasis  
 Masyarakat di Pondok Pesantren Nurul Bayan  
 kecamatan Bayan kabupaten Lombok Utara  
 Nusa Tenggara Barat

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia penguji Tugas Akhir Program  
 Magister (TAPM) Program studi Administrasi Publik, Program Pascasarjana  
 Universitas Terbuka pada:

Hari/tanggal : 6 September 2012

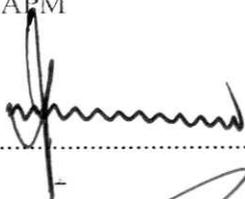
Waktu : 17.00–19.00

Dan telah dinyatakan LULUS/TIDAK LULUS

Panitia Penguji TAPM

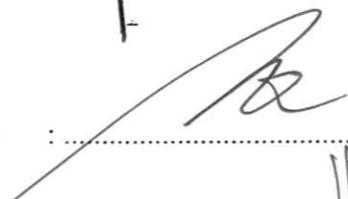
Ketua Komisi penguji

DRS. KESIPUDDIN, M.Pd.

:  .....

Penguji Ahli

Dr. LIESTYODONO B IRIANTO, M.Si

:  .....

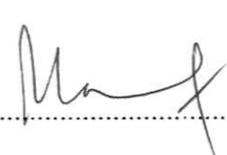
Pembimbing I

Dr. SOFYAN ARIPIN, MSi.

:  .....

Pembimbing II

Dr. MANSUR AFIFI, MA

:  .....

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS TERBUKA**

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe Ciputat 15418  
Telpon 021. 7415050 Fax 021. 7415588

**SURAT PERNYATAAN PERBAIAKAN  
DAN PENYERAHAN NASKAH TAPM**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

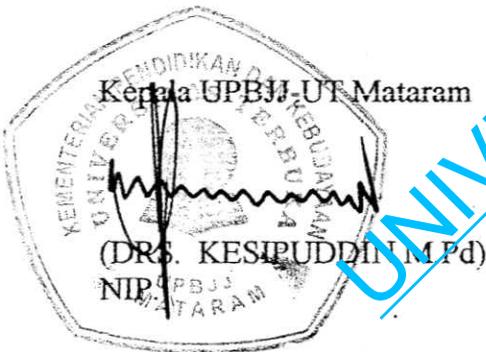
Nama : H. Ahmad Jazri  
NIM : 015736526  
Program Studi : Administrasi Publik  
Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Pendidikan Berbasis Masyarakat di Pondok  
Pesantren Nurul Bayan kecamatan Bayan kabupaten Lombok Utara Nusa  
Tenggara Barat

Dengan ini menyatakan telah memperbaiki naskah TAPM menurut format PPs UT dan  
bersama ini saya menyerahkan hasil perbaikan kepada Direktur PPs UT selaku Panitia Ujian  
Sidang.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Mataram, 18 September 2012

Mengetahui



Mahasiswa

( H. AHMAD JAZRI )  
NIM. 015736526

Ketua Bidang Ilmu/Program  
Magister Administrasi Publik

(DRS. SUSANTI. M.Si)  
NIP. 19671214 199303 2 002

### **Kata Pengantar**

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas iradah danmaunahNya penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Pendidikan Berbasis Masyarakat di Pondok pesantren Nurul Bayan, dapat saya selesaikan.

Penulisan TAPM ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) untuk program Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, terasa berat bagi saya untuk dapat menyelesaikan TAPM ini, baik waktu mengikuti proses perkuliahan maupun pada saat melakukan penelitian dan penyusunan TAPM ini.

Oleh sebab itu ucapan terima kasih dan penghargaan penulis sampaikan kepada yang terhormat :

- (1) Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka, IbuSuciati Ph.D.
- (2) Kepala UPBJJ Mataram, bapak Drs, H. Kesipudin, M.Pd. selaku penyelenggara Program Pascasarjana Universitas Terbuka.
- (3) Pembimbing I bapak Dr. Sofjan Aripin, MSi. dan Pembimbing II bapak Dr Mansur Afifi MAyang dengan segala kemurahan hati telah menyiapkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan TAPM ini.
- (4) Kabid Magister Administrasi Publik ibu Dra Susanti. M.Si selaku penanggung jawab program Magister Administrasi Publik.
- (5) Pimpinan PP Nurul Bayan KH. Abdul Karim yang dengan segala kerendahan hati telah meluangkan waktu dan kesempatannya dalam

memberikan informasi dan memfasilitasi penulis untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam rangka penyusunan TAPM ini.

- (6) Demikian pula kepada Direktur Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah, Kepala Tsanawiyah dan Sekretaris PP Nurul Bayan yang dengan penuh perhatian telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan memberikan data-data yang diperlukan demi terlaksananya penyusunan TAPM ini.
- (7) Ibunda tercinta, terima kasih atas doa dan dukungannya sehingga ananda diberikan kekuatan untuk dapat menyelesaikan penulisan tesis ini, begitu juga dengan istri, saudara-saudaraku dan putra putriku.
- (8) Seluruh teman-teman di jurusan program Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Terbuka yang dengan penuh kekompakan dalam menjalani kuliah dan banyak membantu penulis dalam memberikan masukan dan dorongan dalam penyelesaian TAPM ini.

Akhirnya saya berharap semoga semua bantuan dan pengorbanan yang telah diberikan semua pihak memperoleh ganjaran dan balasan dari Allah SWT. Semoga TAPM ini dapat menjadi tambahan hazanah bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Amin.

Mataram, 26 Agustus 2012  
Penulis,

H. Ahmad jazri

## DAFTAR ISI

Abstract.....	i
Abstrak .....	ii
Lembar Persetujuan.....	iii
Lembar Pengesahan.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar isi.....	vi
Daftar Bagan.....	vii
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Lampiran.....	ix
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Teoritis .....	8
1. Review Terhadap Hasil Penelitian Terkait Implementasi	8
2. Konsep implementasi.....	12
3. Kaitan antara implementasi dan kebijakan public.....	13
4. Model Implementasi Kebijakan.....	15
5. Pendidikan berbasis masyarakat.....	18
6. Standar Pendidikan Nasional.....	20
7. Kinerja Pendidikan.....	27
8. Pondok pesantren.....	29
a. Konsep Pondok pesantren.....	29
b. Elemen-elemen Pesantren.....	30
c. Tipologi Pondok Pesantren.....	34
d. Metode Pembelajaran.....	37
B. Kerangka Berfikir .....	41
C. Definisi Operasional.....	43
<b>BAB III: METODELOGI PENELITIAN</b>	
A. Desain Penelitian.....	44
B. Pemilihan Informan.....	44
C. Instrumen Penelitian.....	44
D. Jenis Dan Sumber Data.....	45
E. Prosedur Pengumpulan Data .....	46
F. Metode Analisa Data.....	48
<b>BAB IV: TEMUAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum PP Nurul Bayan.....	50
1. Sejarah dan perkembangan .....	50

2. Visi, Misi dan Tujuan Pendidikan .....	54
3. Metode pembelajaran.....	55
B. Implementasi PBM di PP Nurul Bayan.....	56
1. Pendekatan Pendidikan Berbasis masyarakat .....	56
2. Elemen-elemen Implementasi .....	65
a. Komunikasi.....	66
b. Sumber Daya.....	70
c. Disposisi.....	75
d. Structure birokrasi.....	76
C. Keadaan Kurikulum, Tenaga Pendidik, Sarana dan Prasarana.....	79
1. Keadaan Kurikulum.....	79
2. Keadaan Tenaga Pendidik.....	83
3. Keadaan Sarana dan Prasarana.....	84
D. Kesesuaian Kurikulum, Tenaga Pendidik, dan Sarana Prasarana dengan SNP.....	85
1. Kesesuaian Kurikulum.....	85
2. Kesesuaian Tenaga Pendidik.....	89
3. Kesesuaian Sarana dan Prasarana.....	91
E. Kinerja Output Pendidikan.....	94
BAB V: SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan.....	101
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA .....	104

**DAFTAR BAGAN**

<b>Nomer</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1.	: Hubungan antara variabel menurut Edward III.....	17
Gambar 2.2.	: Skema Kerangka Berfikir.....	42

**UNIVERSITAS TERBUKA**

## DAFTAR TABEL

<b>No</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 4.1	: Jenis usaha milik Pesantren .....	59
Tabel 4.2	: Jadwal kegiatan Harian di PP Nurul Bayan.....	69
Tabel 4.3	: Jadwal Mingguan Santri di PP Nurul Bayan.....	69
Tabel 4.4	: Jadwal Bulanan/Tahunan di PP Nurul Bayan.....	70
Tabel 4.5	: Jenis lembaga di PP Nurul Bayan.....	71
Tabel 4.6	: Keadaan Fasilitas di PP Nurul Bayan .....	125
Tabel 4.7	: Komponen Mata Pelajaran di PP Nurul Bayan .....	129
Tabel 4.8	: Struktur kurikulum TMI PP Nurul Bayan .....	81
Tabel 4.9	: Struktur KOMPIL di TMI PP Nurul Bayan .....	82
Tabel 4.10	: Kalender Pendidikan TMI PP Nurul Bayan .....	83
Tabel 4.11	: Prasarana Pergedungan di PP Nurul Bayan .....	130
Tabel 4.12	: Fasilitas Ruang kelas di PP Nurul Bayan .....	85
Tabel 4.13	: Jumlah Guru Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	90
Tabel 4.15	: Data tingkat kelulusan Siswa MTs dan MA .....	95

**DAFTAR LAMPIRAN**

Nomer	Judul	Halaman
Lampiran 1	: Jadwal kegiatan Penelitian.....	108
Lampiran2	: Pedoman Wawancara .....	109
Lampiran 3	: Jawaban Responden .....	112
Lampiran 4	: Formasi Pengurus PP Nurul Bayan.....	127
Lampiran 5	: Tabel 4.6 Keadaan Fasilitas di PP Nurul Bayan..	128
Lampiran 6	: Tabel 4.7 Komponen Mata Pelajaran di PP NurulBayan.	129
Lampiran 7	: Tabel 4.11Prasarana Pergedungan di PP Nurul Bayan....	130
Lampiran 8	: Struktur Organisasi PPNurul Bayan. ....	131
Lampiran 9	: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.....	132

UNIVERSITAS TERBUKA

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya, karena pendidikan merupakan usaha yang dilakukan manusia agar dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran atau dengan cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan:

Bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan ayat (3) menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia. (Himpunan PP RI No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 2011: 145).

Sejalan dengan kebijakan pemerintah yang memberlakukan sistem desentralisasi atau otonomi daerah, maka di dalam pendidikan telah diberlakukan juga pendidikan yang berbasis masyarakat. Hal ini merupakan satu kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan yang dituangkan dalam Undang-undang (UU) No. 20 tahun 2003 dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah (PP) RI No.17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Pendidikan berbasis masyarakat atau *Community based education* adalah konsep pendidikan yang menekankan paradigma baru pendidikan dalam upaya peningkatan partisipasi dan keterlibatan masyarakat, serta pengelolaan pendidikan yang sesuai dengan tuntutan global dan nasional. Pendidikan berbasis masyarakat merupakan suatu gerakan yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menentukan bidang pendidikan yang sesuai dengan keinginan masyarakat dimana

pendidikan itu diselenggarakan. Dalam UU No. 20/2003 pasal 1 ayat (16), dikemukakan bahwa “pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat”.

Dengan demikian, pendidikan berbasis masyarakat merupakan perwujudan demokratisasi pendidikan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat termasuk Pondok Pesantren. Selain itu pendidikan berbasis masyarakat merupakan sebuah gerakan yang memotivasi masyarakat untuk terus belajar sepanjang hayat dalam mengisi tantangan global dan tantangan kehidupan yang setiap waktu berubah-ubah. Penjelasan tentang pendidikan berbasis masyarakat dipertegas dengan UU No. 20 tahun 2003 pasal 55 Bab XV adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
2. Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.
3. Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan berbasis masyarakat dapat diselenggarakan dalam jalur formal maupun nonformal yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisi masyarakat, disamping itu masyarakat juga diberi kewenangan untuk mengelolanya.

Sedangkan menurut PP Tahun 2010, bahwa penyelenggaraan suatu pendidikan dapat dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten, kota, masyarakat, dan satuan program pendidikan. Dengan demikian pengelolaan pendidikan bukan saja tugas pemerintah, tapi juga merupakan tugas masyarakat.

Pondok Pesantren Nurul Bayan merupakan salah satu Pondok Pesantren yang berada di kecamatan Bayan kabupaten Lombok Utara dimana sejak awal berdirinya telah menjalankan pendidikan berbasis masyarakat, hal ini dapat dilihat dari beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakannya dan juga diperkuat dengan prinsip yang disampaikan pendirinya KH Abaul Karim, "bahwa Pondok Pesantren Nurul Bayan didirikan oleh masyarakat, diperuntukkan bagi masyarakat dan dibesarkan oleh masyarakat. Bahkan dalam perjalanannya, Pondok Pesantren ini selain berperan sebagai lembaga pendidikan, juga telah berkembang menjadi lembaga dakwah dan lembaga ekonomi". (Wawancara dengan Pimpinan PP Nurul Bayan).

Sistim pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Bayan merupakan perpaduan antara sistim pendidikan Pondok Modern Gontor dengan pendidikan Nasional, Sehingga kurikulum yang diterapkan selain kurikulum PM Gontor, juga menerapkan kurikulum Diknas. Dengan demikian selain menekankan pengajaran dan penguasaan bahasa Arab sebagai sumber penggalian ilmu-ilmu Islam, juga mengajarkan kitab kuning, dan secara reguler sistem pesekolahan yang mengacu pada pendidikan nasional juga terus dikembangkan melalui lembaga pendidikan TMI (Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiyah) stingkat Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah.

Bila di telaah lebih jauh Pendidikan berbasis masyarakat telah sesuai dengan misi pembangunan Indonesia saat ini, dengan terlibatnya langsung beberapa komponen atau kelompok masyarakat seperti Pondok Pesantren dalam penyelenggaraan pendidikan. Kenyataan ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa pendidikan yang dilaksanakan di Pondok Pesantren sebenarnya telah berakar di dalam masyarakat dalam suatu kebudayaan sendiri. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Tilaar;

Apabila masyarakat melahirkan lembaga-lembaga pendidikan untuk kelangsungan hidup suatu masyarakat, maka isi pendidikan tersebut adalah nilai-nilai yang telah hidup dan dikembangkan didalam kebudayaan sebagai milik masyarakat. Kesatuan antara pendidikan, masyarakat dan kebudayaan, diwujudkan dalam pendidikan madrasah dan lebih lebih didalam pola kehidupan pesantren. (Tilaar, 2004: 175).

Dengan masuknya pendidikan pesantren sebagai sub-sistim dari sistim pendidikan nasional, menuntut satu konsekuensi bahwa lembaga pendidikan yang berada dibawah naungan pesantren secara otomatis harus mengikuti pola pembinaan yang mengacu kepada Sistim Diknas. Pasal 35 UU Sisdiknas menyebutkan bahwa standar nasional pendidikan terdiri dari standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Oleh sebab itu dalam rangka memenuhi harapan dan tercapainya standar nasional pendidikan, maka Pondok Pesantren selain harus menjalankan program pendidikan pesantrennya, juga hendaknya harus bekerja keras untuk dapat memenuhi tuntutan perkembangan pendidikan nasional dengan melaksanakan kurikulum pendidikan nasional.

Kenyataan yang kita dapatkan dilapangan dan sekaligus merupakan suatu permasalahan bagi PP Nurul Bayan sebagai institusi pelaksana kebijakan

pemerintah bahwa standar Diknas belum sepenuhnya bisa dijalankan dengan baik karena:

1. Sebagian besar guru masih belum memenuhi standar kualifikasi pendidikan, padahal tuntutan pendidikan nasional menghendaki tersedianya tenaga pendidik yang professional, yang memiliki kualifikasi minimum S1 dan sertifikasi sesuai dengan jenjang. Dari 41 guru, yang berkualifikasi S2 sebanyak 2 orang, S1 sebanyak 11 orang, D3 sebanyak 1 orang dan sisanya sebanyak 29 orang terdiri dari tamatan SLTA atau baru 31% yang memenuhi standar nasional Pendidikan.
2. Dalam rangka menghasilkan kualitas pendidikan dan lulusan yang memadai, disamping ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, diperlukan juga prasarana pendidikan yang memadai. Dari pengamatan sepintas di pondok Pesantren Nurul Bayan masih terlihat adanya keterbatasan ruang kelas, karena masih terdapat beberapa siswa yang masih belajar di Masjid dan di ruang-ruang kelas dengan kondisi yang kurang sempurna. Padahal tuntutan pendidikan nasional menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan hendaknya dapat menyediakan sarana dan prasarana yang dapat memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Dari 11 rombongan belajar yang ada, baru beberapa ruang kelas yang memenuhi standar Nasional Pendidikan sedangkan sisanya masih menempati ruang kelas semi permanen dan Masjid.

3. Banyaknya muatan kurikulum Pondok Pesantren yang harus diajarkan kepada para siswa, padahal disisi lain Pondok Pesantren tersebut juga harus memenuhi ketentuan kurikulum Diknas. Hal ini dapat dilihat dari jumlah mata pelajaran yang diajarkan pada TMI (setingkat SLTP dan SLTA) berjumlah 28 mata pelajaran terdiri dari 17 mata pelajaran merupakan kurikulum Pondok Pesantren dan 11 mata pelajaran merupakan kurikulum Diknas. Dengan demikian dapat diprosentasekan bahwa 61 % merupakan kurikulum pesantren dan 39 % merupakan Diknas. Menurut hemat penulis beberapa fenomena tersebut, telah membuat PP Nurul Bayan berada dalam satu dilema yang cukup sulit, karena disamping harus menjalankan pendidikan pesantren, juga harus memenuhi tuntutan dan peraturan Diknas.

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas, penulis ingin mencoba mengetahui lebih jauh implementasi Kebijakan Pendidikan Berbasis Masyarakat di Pondok Pesantren Nurul Bayan dikaitkan dengan Standar Nasional Pendidikan. Dari 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan yang ada, peneliti akan mencoba membatasi pembahasan pada 3 (tiga) standar, yaitu: Standar Isi (Kurikulum), Standar Tenaga Pendidik (Guru), dan standar sarana dan prasarana. Oleh sebab itu judul penelitian ini adalah "*Implementasi Kebijakan Pendidikan Berbasis Masyarakat di Pondok Pesantren Nurul Bayan Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat*".

#### **B. Perumusan Masalah.**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: *Bagaimana implementasi dan kinerja Output Pendidikan pada*

*Kebijakan Pendidikan Berbasis Masyarakat di Pondok Pesantren Nurul Bayan Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat.*

### **C. Tujuan penelitian.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa implementasi dan kinerja Output Pendidikan pada kebijakan Pendidikan Bebas Masyarakat di Pondok Pesantren Nurul Bayan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara teoritis dan praktis :

#### 1. Kegunaan Teoritis

Bagi peneliti merupakan upaya untuk mengembangkan ilmu administrasi Publik konsentrasi pelayanan publik khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pendidikan.

#### 2. Kegunaan Praktis

a. Sebagai bahan masukan bagi PP Nurul Bayan khususnya, dan pondok-pondok pesantren yang lain pada umumnya sehingga dapat dijadikan perbandingan dalam menerapkan, mengelola dan mengembangkan kebijakan pendidikan berbasis masyarakat sehingga mampu beradaptasi dan bersaing pada era globalisasi

b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah khususnya Dinas Pendidikan kabupaten Lombok Utara dalam mengambil suatu kebijakan Pendidikan khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan PBM di beberapa Pondok Pesantren.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teoritis

##### 1. Review terhadap hasil penelitian terkait

Kajian ini akan membahas hasil penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan rencana penelitian, sebagai bahan perbandingan dan rekomendasi peneliti. Fokus kajian ini akan melihat masalah, tujuan dan hasil penelitian. Semua ini diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap penulisan tesis ini dalam mengkaji dan menganalisa permasalahan penelitian.

- a. Agil, Mahmud (2005), dengan judul Pendidikan Berbasis Masyarakat sebagai model Pemberdayaan Sumber Daya Insani (Studi kasus di ISITEKS Bantul Yogyakarta, Thesis Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Penelitian ini berlokasi di Isiteks Imogiri, Bantul Daerah Ibukota Yogyakarta, bertujuan untuk mendeskripsikan komponen-komponen yang harus disiapkan dalam pelaksanaan pendidikan berbasis masyarakat di Isiteks, baik yang menyangkut environmental input, raw input maupun instrumental input. Menggambarkan tahapan-tahapan proses implementasi manajemen pendidikan berbasis masyarakat di Isiteks dalam memberdayakan sumber daya insani berupa siklus manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pembinaan, evaluasi dan pengembangan. Mengungkapkan hasil atau dampak pelaksanaan pendidikan berbasis masyarakat di Isiteks dalam memberdayakan sumber daya insani berupa aspek kognitif, afektif dan psikomotor.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan berbasis masyarakat di Isiteks dilandasi oleh kondisi environmental input yang kondusif di mana pendidikan Nasional tidak mampu memenuhi perkembangan dan kebutuhan masyarakat, didukung oleh raw input yang secara kognitif dan afektif telah siap karena para santri merupakan ilmuwan. Dan instrumental input, berupa guru diperankan oleh KH.Djaka Sasmita, namun lebih banyak direduksi karena pendekatan androgogi, kurikulumnya berbasis realitas dan Al Qur'an dan pendanaan atau sarana meskipun terbatas, namun dipenuhi sendiri oleh Isiteks. Pengelolaan manajemennya mengacu pada siklus perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, pembinaan, evaluasi dan pengembangan yang partisipatif dan dialogis sehingga memungkinkan berkembangnya kreativitas dan inisiatif.

Bagi peneliti Penelitian ini sebagai salah satu sumbangan pemikiran akademik berkaitan dengan dampak pelaksanaan pendidikan berbasis masyarakat di Isiteks dalam memberdayakan sumber daya insani, Penelitian ini menjelaskan beberapa komponen yang dipersiapkan dalam pendidikan berbasis masyarakat berupa aspek kognitif, afektif dan psikomotor, di mana pendidikan Nasional tidak mampu memenuhi perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah mendiskripsikan dan menganalisa pelaksanaan pendidikan berbasis masyarakat di Pondok Pesantren Nurul Bayan.

Oleh sebab itu penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut dan sesuai dengan rencana peneliti yaitu implementasi kebijakan pada pendidikan berbasis

masyarakat dikaitkan dengan Pelaksanaan standar nasional pendidikan yang akan dijelaskan secara mendalam.

- b. Harahap, Susilawati (2009), dengan judul Pengaruh Standar Nasional Pendidikan terhadap kesempatan kerja lulusan siswa SMK negeri di kota Medan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian kurikulum, guru, sarana dan prasarana pada SMK Negeri di Kota Medan dengan Standar Nasional Pendidikan, disamping itu untuk mengetahui pengaruh sebelum dan sesudah penerapan standar nasional pendidikan terhadap kesempatan kerja lulusan SMK.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualifikasi akademik guru yang mengajar di SMK Negeri di Kota Medan masih belum seluruhnya sesuai dengan standar yang telah ditentukan, sedangkan kurikulum dan sarana dan prasarana telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Faktor yang berpengaruh terhadap kesempatan kerja lulusan adalah kurikulum, sedangkan sesudah penerapan faktor yang berpengaruh adalah sarana prasarana dengan tingkat signifikansi 0, 1% dan kurikulum dengan tingkat signifikansi 0,5 atau tingkat kepercayaan 95 persen. Artinya bahwa kurikulum yang baik dan sarana prasarana yang memadai merupakan faktor pendukung terhadap kesempatan kerja siswa. Sedangkan faktor guru kurang berpengaruh terhadap kesempatan kerja lulusan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kota Medan, baik sebelum dan sesudah penerapan standar nasional pendidikan.

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa kurikulum yang baik dan sarana prasarana yang memadai sangat mendukung terhadap kesempatan kerja siswa. Sedangkan faktor guru pengaruhnya tidak signifikan terhadap kesempatan kerja lulusan SMK, baik sebelum dan sesudah penerapan standar nasional pendidikan.

Penelitian ini merupakan sumbangan pemikiran akademik berkaitan dengan pengaruh pelaksanaan standar nasional pendidikan terhadap kesempatan kerja lulusan SMK sebelum dan setelah diterapkannya Standar nasional pendidikan tersebut. Kalau dalam penelitian terdahulu penelitian terfokus pada kesesuaian dan pengaruh Pelaksanaan Standar nasional pendidikan terhadap kesempatan kerja lulusan SMK, maka penelitian yang peneliti lakukan adalah menekankan pada pelaksanaan pendidikan berbasis masyarakat dikaitkan dengan pelaksanaan tiga standar nasional pendidikan di pesantren Nurul Bayan

- c. Nyoman Ribek dan Endang Rahayu (2009), dengan judul Analisis Pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan di Jurusan Keperawatan Poltekes Dep Kes Denpasar (Jurnal Ilmiah Keperawatan Vol 2 No 1 Juni 2009).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan delapan standar nasional pendidikan pada Poltekes Dep Kes Denpasar. Permasalahan yang diajukan adalah, bagaimana penerapan Pelaksanaan standar nasional pendidikan di jurusan keperawatan Poltekes Dep Kes Denpasar. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah bahwa kedelapan standar

nasional pendidikan yang ada saling terkait antara yang satu dengan yang lain dalam rangka memperoleh lulusan yang berkualitas.

Penelitian sebelumnya mencoba menganalisa 8 standar yang ada pada Poltekkes Depkes Denpasar, maka pada penelitian ini akan melihat dan menganalisa pelaksanaan tiga saja diantara 8 (delapan) standar nasional pendidikan pada pendidikan berbasis masyarakat pada Pondok Pesantren Nurul bayan.

## 2. Konsep implementasi.

Implementasi merupakan salah satu elemen pokok dari tiga manajemen strategi, ketiga manajemen strategi tersebut adalah formulasi strategi, implementasi strategi dan evaluasi strategi. Nugraha (2009: 1.13) memberikan penjelasan tentang tahap-tahap manajemen strategic yaitu:

- a. Formulasi Strategi meliputi mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang-peluang dan ancaman-ancaman dari luar organisasi, menentukan kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan dari dalam organisasi, menetapkan tujuan-tujuan (sasaran-sasaran) jangka panjang, menghasilkan strategi-strategi alternative, dan memilih strategi-strategi tertentu untuk dijalankan.
- b. Mengimpletasikan strategi mencakup membangun suatu budaya yang mendukung strategi, menciptakan sebuah struktur organisasi yang efektif, mengarahkan kembali usaha-usaha pemasaran, menyiapkan anggaran, mengembangkan dan menggunakan sistim informasi dan menghubungkan kompensasi karyawan dengan kinerja organisasi.
- c. Penilaian strategi merupakan tahap akhir dalam manajemen strategic. Para manajer berusaha keras mengetahui kapan strategi tertentu tidak berjalan dengan baik; penilaian strategi merupakan alat utama untuk memperoleh informasi ini

Mazmanian dan Sebastiar melihat implementasi sebagai proses “meliputi pengurangan perbedaan antara kenyataan praktek dan harapan praktis oleh suatu inovasi. Implementasi adalah suatu proses perubahan perilaku dalam petunjuk anjuran oleh inovasi terjadi dalam tahapan, setiap waktu dan mengatasi halangan dalam perkembangannya.” (Rino, 2010: 29 - 30).

Disisi lain “implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai, dan sikap” (Susilo, 2007:174). Sementara itu, Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa: “Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan” (Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, 2001:65).

Dari beberapa pengertian implementasi di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: (1) Implementasi merupakan pelaksanaan sesuatu kebijakan baik berupa Undang Undang maupun Peraturan Pemerintah yang tidak terlepas dari dampak yang ditimbulkan. (2) Implementasi merupakan suatu tindakan individu, pejabat, maupun kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya suatu tujuan. (3) implementasi merupakan pelaksanaan kegiatan atau kebijakan dengan menggunakan metode.

### 3. Kaitan antara implementasi dan kebijakan public.

Apabila pengertian implementasi dikaitkan dengan kebijakan public, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai pelaksanaan suatu kebijakan public yang telah ditetapkan dengan menggunakan sarana untuk mencapai tujuan. Untuk mengetahui sejauh mana keterkaitan antara implementasi dan kebijakan public, maka dibawah ini akan dijelaskan pengertian kebijakan public dan keterkaitan antara implementasi dan kebijakan public.

Kebijakan seringkali dipahami dengan istilah seperti politik, program, keputusan, undang-undang, aturan, ketentuan-ketentuan, kesepakatan, dan rencana strategis. “Publik berasal dari kata *public* diartikan beraneka ragam, dalam bahasa Indonesia, diartikan sebagai umum, rakyat, masyarakat, publik, dan Negara atau pemerintahan” (Kismartini dkk, 1989: 1.7).

Sedangkan pengertian kebijakan public disampaikan oleh beberapa tokoh administrasi publik diantaranya Thomas R. Dye, mengemukakan: “Apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan”. Sedangkan George C. Edwards III dan Ira Sharkansky mengartikan kebijakan publik sebagai

Apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan atau dalam *policy statement* yang berbentuk pidato-pidato dan wacana yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat pemerintah yang segera ditindaklanjuti dengan program-program dan tindakan pemerintah”. Sedangkan menurut James E. Anderson: “adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah (Kismartini dkk, 1989: 1.9).

Dari beberapa pengertian kebijakan public di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam suatu kebijakan public terdapat unsur-unsur sebagai berikut: (1) Adanya tindakan berupa program-program untuk mencapai tujuan. (2) Adanya aktor-aktor kebijakan public yang terdiri dari pemerintah dan lembaga diluar pemerintah. (3) Adanya pengalokasian nilai-nilai masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah.

Dengan demikian terdapat keterkaitan antara implementasi dan kebijakan, dimana implementasi menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Dengan demikian implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik

direalisasikan melalui beberapa kegiatan yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.

#### 4. Model implementasi kebijakan

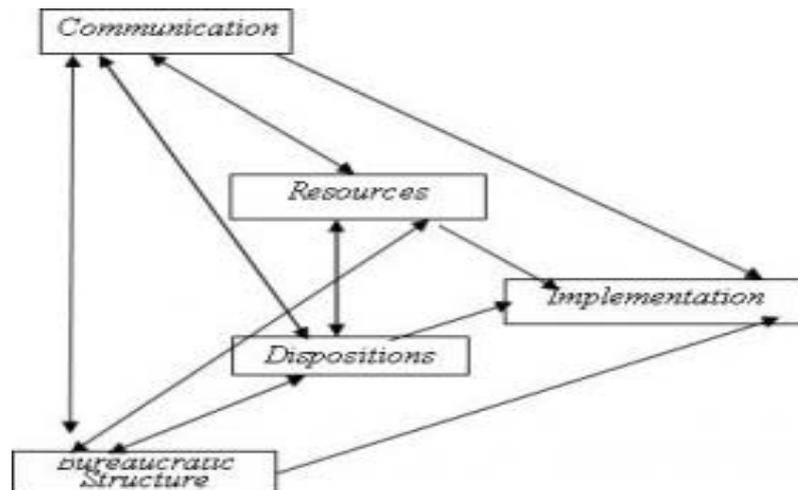
Beberapa tokoh yang ikut memberikan warna pada model implementasi kebijakan seperti Model Jones, Model Van Meter and Van Horn, Model Mazmanian, Daniel and Paul A. Sabatier, Model Grindle, Merilee S, Model Hogwood and Gunn Model Dunn dan Model Edwards III. Dari beberapa model implementasi kebijakan yang ada, peneliti akan mencoba menguraikan model yang terakhir yaitu Model Edwards III, yang sekaligus peneliti jadikan panduan dalam kerangka berfikir dalam penelitian ini.

Pendekatan implementasi kebijakan publik yang diperkenalkan oleh (Edwards III. 1984: 9-10) adalah *implementation problems approach*. Edwards III mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan dua pertanyaan pokok, yakni: faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan? Dan faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan?. Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut dirumuskan empat factor keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi. Keempat faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan.

Menurut Sopyan bahwa: Model yang dikemukakan oleh Edwards III ini sifatnya *top down* dan cocok diimplementasikan pada level birokrasi yang terstruktur pada suatu lembaga pemerintahan hal ini dimaksudkan:

- a. Untuk memudahkan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan pada masing-masing level birokrasi mulai dari pemerintah pusat sampai ke tingkat pelaksana dilapangan.
- b. Untuk menghindari terjadinya rintangan dan hambatan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan dan model ini efektif bila perumusan kebijakan yang dibuatnya memperhatikan implementasi kebijakan yang akan dilaksanakan. (Aripin, 2009: 39).

Komunikasi suatu program akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan. Sumber daya, meliputi empat komponen yaitu kesediaan SDM baik jumlah maupun mutu, kejelasan informasi, kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau tanggung jawab dan fasilitas yang memadai. Disposisi merupakan komitmen pelaksana terhadap pelaksanaan suatu program. Dan Struktur birokrasi didasarkan pada *standard operating procedure* (SOP) yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan. Hubungan antara variabel-variabel diatas dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2.1. Hubungan antara variabel-variabel menurut Edward III.

Keempat faktor atau variabel penyebab tidak terimplementasikannya kebijakan atau program tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Komunikasi.

Komunikasi merupakan faktor penting bagi para administrator dalam mengkomunikasikan setiap kegiatan implementasi kebijakan karena administrator merupakan pelaksana keputusan atau perintah yang mana dalam administrator itu sendiri terdiri dari beberapa jenjang hirarki. Adapun indikator yang berkaitan dengan dimensi komunikasi yang dikemukakan oleh Edwards III terdiri dari: transmisi (*transmission*), konsistensi (*consistency*), dan kejelasan (*clarity*).

2) Sumber daya (*resources*).

Sumber daya juga merupakan daya dukung terhadap pelaksanaan kebijakan oleh administrator publik agar dapat menjalankan suatu kebijakan dengan baik, konsisten, dan dengan transmisi yang tepat. Sumber-sumber daya ini terdiri dari staf (*staff*), wewenang (*authority*), dan fasilitas.

3) Kecenderungan-kecenderungan/tingkah laku (*dispositions*).

Kecenderungan adalah bagaimana sikap para administrator dalam melaksanakan suatu kebijakan secara efektif sesuai dengan keinginan pembuat kebijakan. Hal ini menunjukkan rasa tanggungjawab administrator untuk mengimplementasikan kebijakan dengan penuh kesungguhan.

#### 4) Struktur birokrasi (*bureaucratic structure*).

Struktur birokrasi pada umumnya merupakan pelaksana kebijakan yaitu bagaimana *standard operating procedures (SOP)* mendukung efektifitas implementasi kebijakan dan *fragmentation* yaitu bagaimana tupoksi masing-masing unit/badan dapat mengimplementasikan kebijakan secara bertanggungjawab, sehingga akan menghindarkan adanya lempar tanggungjawab antara satu unit/badan dengan unit/badan lain dalam melaksanakan suatu kebijakan (Aripin, 2009: 86- 88).

Dengan demikian tahap implementasi merupakan tahap yang sangat penting dan memerlukan kerjasama semua pihak demi terlaksananya suatu kebijakan. Sebelum dilaksanakannya suatu program, diperlukan persiapan yang matang menyangkut komunikasi program, sarana dan prasarana, kualifikasi SDM yang terlibat didalamnya, disposisi, dan structure birokrasi.

#### 5. Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pendidikan berbasis masyarakat merupakan suatu pendidikan yang memberikan kemandirian dan kebebasan kepada masyarakat untuk menentukan bidang pendidikan yang sesuai dengan keinginan masyarakat dimana pendidikan itu diselenggarakan. Dalam undang-undang no 20 tahun 2003 pasal 1 ayat (16), dikemukakan pengertian PBM adalah: "Penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya,

aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat”.

Dalam undang-undang tersebut di kemukakan juga tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan yang tertuang pada pasal 54 ayat (1) “Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam menyelenggarakan dan pengendalian mutu pada satuan pendidikan. Ayat (2) masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber pelaksanaan dan pengguna hasil pendidikan”. (PP No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 2011: 139).

Adapun peran masyarakat dalam pendidikan berbasis masyarakat tertuang pada pasal 55 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

- a. Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan social dan budaya untuk kepentingan masyarakat ayat.
- b. Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standard nasional pendidikan.  
(PP No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, 2011: 139).

Sedangkan menurut Aris Pongtuluran (2002: 122), bahwa inti dari Pendidikan Berbasis Masyarakat adalah bahwa masyarakat yang menentukan suatu program dan kegiatan dan ikut berpartisipasi didalam menanggung beban pendidikan, bersama seluruh masyarakat setempat dalam upaya menciptakan pendidikan yang bermutu bagi anak anak mereka. Oleh sebab itu masyarakat tidak bisa begitu saja menyerahkan urusan pendidikan anak-anak mereka kepada sekolah semata-mata, tetapi perlu ikut serta bertanggungjawab demi tercapainya kualitas pendidikan bagi anak-anak mereka.

Aris Pongtuluran, dan Theresia K. Brahim memberikan indikator Pendidikan berbasis Masyarakat yang sekaligus dapat dilakukan oleh masyarakat lokal maupun nasional adalah:

- a. Penurunan angka anak usia sekolah yang tidak bersekolah.
- b. Pengurangan ketimpangan antar wilayah atau antar kelompok social ekonomi dalam masyarakat.
- c. Pengurangan ketimpangan sebaran guru, sistem insentif, dan mutasi guru.
- d. Peningkatan sarana/prasarana pendidikan.
- e. Peningkatan Sosial ekonomi anak-anak lingkungan ekonomi rendah.
- f. Peningkatan kesadaran orangtua dalam hal membantu anaknya belajar.
- g. Peningkatan kesadaran anak akan daya tarik bidang studi tertentu.
- h. Peningkatan kemampuan guru dalam pendayagunaan alat dan sumber pendidikan.
- i. Pendokumentasian sumberdaya pendidikan.
- j. Penetapan kebutuhan sumberdaya pendidikan sesuai dengan identifikasi dan rumusan kebutuhan pendidikan setempat.
- k. Identifikasi perorangan, kelompok atau badan/lembaga yang potensial dengan berbagai jenis tertentu sumberdaya pendidikan (Pongtuluran, Aris. 2002: 122).

Pemaparan di atas memberikan pemahaman kepada kita bahwa pendidikan berbasis masyarakat merupakan sebuah gerakan yang memotivasi masyarakat agar terus belajar sepanjang hayat dalam mengisi tantangan global, dan sekaligus merupakan perwujudan demokratisasi pendidikan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat pesantren untuk melaksanakan dan ikut bertanggung jawab pada kegiatan pendidikan demi terwujudnya kualitas pendidikan.

## 6. Standar Pendidikan Nasional

Dalam Peraturan Pemerintah tahun 2010 dijelaskan:

- a. Standar Nasional Pendidikan Terdiri dari Standar Isi, Proses, kompetensi kelulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.

- b. Standar Nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.
- c. Pengembangan Standar Nasional Pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan (PP 2010, 2011: 135).

Sedangkan fungsi standar pendidikan berdasarkan PP No. 19 th 2005, adalah sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu yang bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional yang dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dan untuk mengukur kualitas pendidikan.

Untuk kepentingan tersebut, Standar tersebut bukan merupakan ukuran yang statis yang tidak berubah tetapi semakin lama semakin ditingkatkan demi tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan. Standar-standar tersebut meliputi: 1. standar isi, 2. standar proses, 3. standar kompetensi lulusan, 4. standar pendidik dan tenaga kependidikan, 5. standar sarana dan prasarana, 6. standar pengelolaan, 7. standar pembiayaan dan 8. standar penilaian pendidikan. (PP No. 19 th 2005: 8).

Berikut ini akan diuraikan tiga satandar dari delapan standar yang ada sesuai dengan batasan masalah. Satandar tersebut adalah standar isi (kurikulum), standar pendidik dan tenaga kependidikan dan standar sarana dan prasarana.

a. Standar isi.

Standar Isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan

kajian, kompetensi mata pelajaran dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Hal tersebut tertuang dalam BAB III Pasal 5 bahwa:

Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan.

Sedangkan pengertian kurikulum menurut Nurdin (2005: 32) merupakan sejumlah mata pelajaran di sekolah atau di akademi yang harus ditempuh oleh siswa untuk mencapai sesuatu tingkatan atau ijazah. Sedangkan menurut Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dijelaskan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Dengan demikian kurikulum merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekolah yang diperuntukkan bagi siswa dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai suatu tujuan.

Dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum, dijelaskan dalam Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 beberapa prinsip-prinsip sebagai berikut:

(a) berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya, (b) beragam dan terpadu, (c) tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, (d) relevan dengan

kebutuhan kehidupan, (e) menyeluruh dan berkesinambungan, (f) belajar sepanjang hayat, (g) seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.

Adapun yang berkaitan dengan Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum dijelaskan pada Pasal 6, bahwa:

Kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: a. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; b. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; c. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; d. kelompok mata pelajaran estetika; e. kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan. (PP No. 19 tahun 2005: 8 - 9).

Dalam upaya menciptakan kualitas pendidikan yang diharapkan, diperlukan beberapa konsep dan tindakan institusi pelaksana pendidikan dengan memperbaiki sistem pendidikan yang ada termasuk didalamnya penyempurnaan dan pelaksanaan kurikulum dengan baik dan memperhatikan ketuntasan belajar siswa sehingga tujuan yang dicanangkan dapat diwujudkan dalam rangka menghasikan sumber daya manusia yang berkualitas yang dapat bersaing dalam era globalisasi.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Saud dan Makmun (2005: 6) yang menyatakan bahwa “Pendidikan merupakan upaya yang dapat mempercepat pengembangan potensi manusia untuk mampu mengembangkan tugas yang dibebankan padanya, karena hanya manusia yang dapat didik dan mendidik. Pendidikan dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, emosional, moral serta keimanan dan ketakwaan manusia”.

Dengan demikian kewajiban setiap lembaga pendidikan hendaknya meningkatkan usaha pendidikannya dengan penyempurnaan kurikulum dan

meningkatkan kriteria ketuntasan belajar secara berkesinambungan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan.

Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan, bahwa “Satuan pendidikan diharapkan meningkatkan kriteria ketuntasan belajar secara terus menerus untuk mencapai kriteria ketuntasan ideal. Pelaporan hasil belajar (raport) peserta didik diserahkan pada satuan pendidikan dengan memperhatikan rambu-rambu yang disusun oleh direktorat teknis terkait”. (BSNP, 2006: 12).

Adapun kriteria kelulusan menurut ketentuan PP 19/2005 Pasal 72 Ayat (1) adalah:

Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah, apabila peserta didik tersebut telah: a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran; b. memperoleh nilai minimal untuk seluruh mata pelajaran yang ditentukan c. lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan d. lulus Ujian Nasional.

b. Standar sarana dan prasarana.

Dalam rangka menunjang efektifitas dan efisiensi pengajaran disuatu sekolah, dibutuhkan sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai. Standar Sarana dan Prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berekreasi, serta sumber belajar lainnya, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam Pasal 42 dinyatakan bahwa: (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta

perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. (2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Kemudian pada Pasal 43 disebutkan: bahwa Standar keragaman jenis peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA), laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan peralatan pembelajaran lain pada satuan pendidikan dinyatakan dalam daftar yang berisi jenis minimal peralatan yang harus tersedia. (2) Standar jumlah peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rasio minimal jumlah peralatan perpeserta didik. (3) Standar buku perpustakaan dinyatakan dalam jumlah judul dan jenis buku di perpustakaan satuan pendidikan. (4) Standar jumlah buku teks pelajaran di perpustakaan dinyatakan dalam rasio minimal jumlah buku teks pelajaran untuk masing-masing mata pelajaran di perpustakaan satuan pendidikan untuk setiap peserta didik (PP No. 19 th 2005: 332- 333).

Adapun yang berkaitan dengan kelengkapan sarana dan prasarana, tertuang dalam Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 dimana Kelengkapan sarana dan prasarana yang harus dilengkapi sekurangnya adalah sebagai berikut: a) ruang kelas, b) ruang perpustakaan, c) laboratorium, d) ruang pimpinan, e) ruang guru, f) ruang tata usaha, g) tempat beribadah,

h) ruang konseling, i) ruang UKS, j) ruang organisasi kesiswaan, k) jamban, l) gudang, m) ruang sirkulasi, n) tempat bermain/berolahraga,

c. Standar Pendidik dan tenaga kependidikan

Guru merupakan panutan teladan bagi para siswanya sebagaimana yang disampaikan Sutadipura dalam Nurdin (2005: 6) bahwa: "Guru adalah orang yang layak digugu dan ditiru". Pendapat tersebut diperkuat dengan pengertian yang diberikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam Nurdin ( bahwa: Guru adalah seseorang yang mempunyai gagasan yang harus diwujudkan untuk kepentingan anak didik, sehingga menunjang hubungan sebaik baiknya dengan anak didik, sehingga menjunjung tinggi, mengembangkan dan menerapkan keutamaan yang menyangkut agama, kebudayaan, keilmuan. (Nurdin, 2005: 7).

Adapun yang berkaitan dengan tugas, hak dan kewajiban Pendidik dan tenaga kependidikan, dijelaskan pada Pasal 39 dan 40 UU RI nomer 20 tahun 2003, bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Sedangkan Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Adapun hak-hak Pendidik dan tenaga kependidikan: 1) penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai; 2) penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; 3) pembinaan karier sesuai dengan

tuntutan pengembangan kualitas; 4) perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan 5) kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Sedangkan kewajibannya adalah: 1) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis; 2) mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan 3) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Sedangkan untuk kualifikasi pendidik disebutkan bahwa:

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional,
  - (2) Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.
- (PP No.17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 2010: 135).

#### 7. Kinerja pendidikan

Konsep kinerja diberikan oleh beberapa pakar diantaranya Ambar. T Sulistiyani dan Rosidah (2003: 223) menjelaskan “bahwa Kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil karyanya”. Sedangkan menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2005: 67) “Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya”. Sedangkan Maluyu S.P. Hasibuan (2001:34) mengemukakan bahwa kinerja (prestasi kerja) adalah “suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu”.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah Prestasi atau hasil kerja yang dicapai oleh seseorang dalam tugas yang

diberikan kepadanya yang dilakukan berdasarkan kecakapan, pengalaman, kesempatan dan kesungguhan yang dimilikinya.

Dengan demikian untuk mengetahui kinerja output pendidikan, tidak bisa hanya dilihat dari tingkat kelulusan seseorang tapi lebih dari itu seberapa jauh dampak yang ditimbulkan dari kecakapan, pengalaman, kesempatan dan kesungguhan yang dimilikinya terhadap pembentukan keperibadiannya. Oleh sebab itu dalam upaya menciptakan kualitas pendidikan yang diharapkan, diperlukan beberapa tindakan institusi pelaksana pendidikan dengan memperbaiki sistem pendidikan yang ada termasuk didalamnya penyempurnaan dan pelaksanaan kurikulum dengan baik dan memperhatikan ketuntasan belajar siswa sehingga tujuan yang dicanangkan dapat diwujudkan dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas yang dapat bersaing dalam era globalisasi.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Saud dan Makmun (2005: 6) yang menyatakan bahwa “Pendidikan merupakan upaya yang dapat mempercepat pengembangan potensi manusia untuk mampu mengembangkan tugas yang dibebankan padanya, karena hanya manusia yang dapat didik dan mendidik. Pendidikan dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, emosional, moral serta keimanan dan ketakwaan manusia”.

Dengan demikian kewajiban setiap lembaga pendidikan hendaknya meningkatkan usaha pendidikannya dengan penyempurnaan kurikulum dan meningkatkan kriteria ketuntasan belajar secara berkesinambungan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan.

Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan, bahwa “Satuan pendidikan diharapkan meningkatkan kriteria ketuntasan belajar secara terus menerus untuk mencapai kriteria ketuntasan ideal. Pelaporan hasil belajar (raport)

peserta didik diserahkan pada satuan pendidikan dengan memperhatikan rambu-rambu yang disusun oleh direktorat teknis terkait”. (BSNP, 2006: 12).

Adapun kriteria kelulusan menurut ketentuan PP 19/2005 Pasal 72 Ayat (1) adalah: Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah, apabila peserta didik tersebut telah: a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran; b. memperoleh nilai minimal untuk seluruh mata pelajaran yang ditentukan c. lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan d. lulus Ujian Nasional.

## **8. Pondok Pesantren**

### **a. Konsep Pondok Pesantren**

Pondok Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat, sebagian besar masyarakat telah mengakui keberadaan dan peranannya dimana Pondok Pesantren dalam perjalannya telah mampu membekali masyarakat dengan ilmu pengetahuan dan telah berperan aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Perkataan Pondok Pesantren terdiri dari dua kata yaitu pondok dan pesantren, selain itu sebutan Pondok Pesantren juga sering menggunakan istilah pesantren. Beberapa pakar memberikan pengertian yang berbeda tentang pesantren atau Pondok Pesantren, tetapi pada hakekatnya mengandung pengertian yang sama. Hasbullah(1999:142), misalnya memeberikan pengertian pondok sebagai “tempat sederhana yang merupakan tempat tinggal kyai bersama para santrinya”. Sementara itu Dhofier (1985:18)

memberikan pengertian pesantren sebagai “tempat yang dipakai untuk makan dan istirahat. Sedangkan menurut Abdurrahman Wahid, “pondok pesantren mirip dengan akademi militer atau biara (monestory, convent) dalam arti bahwa mereka yang berada di sana mengalami suatu kondisi totalitas” (Wahid 2001:171).

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pondok Pesantren adalah tempat tinggal kyai bersama para santrinya untuk menjalankan segala aktifitas kesehariannya baik yang berkaitan kegiatan individu, sosial dan pendidikan.

Adapun peran pondok pesantren adalah sebagai berikut:

1. Pondok Pesantren lebih kepada pendidikan berbasis masyarakat, dalam penyelenggaraannya berdasarkan kekhasan agama, social, budaya, aspirasi dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, dan untuk rakyat.
2. Pondok Pesantren sampai sekarang tetap eksis dan konsisten melaksanakan fungsinya dengan baik, dan bahkan telah mengembangkan perannya sebagai pusat pengembangan masyarakat (Departemen Agama RI, 2005: 10).

Dengan demikian secara umum, pondok pesantren memiliki beberapa peran antara lain sebagai lembaga pendidikan Islam, lembaga dakwah dan agen pengembangan pembangunan masyarakat.

#### b. Elemen-elemen Pesantren

Pondok pesantren memiliki beberapa elemen diantaranya kyai, santri, masjid, pondok, dan kitab-kitab Islam klasik atau kitab kuning. Untuk lebih jelasnya dibawah ini akan diuraikan secara berturut-turut elemen-elemen tersebut.

### 1) Kyai.

Kiyai merupakan salah satu unsure yang paling dominant dalam kehidupan suatu pesantren. Keberadaan seorang kiyai dalam suatu Pondok pesantren merupakan suatu keharusan, karena beliau adalah tokoh sentral yang memberikan bimbingan, pendidikan dan pengajaran bagi para santri. Perkembangan kelanggengan suatu Pondok pesantren sangat dipengaruhi oleh kedalaman ilmu dan keahlian seorang kiyai dalam mengelola pesantrennya.

Menurut Hasbullah (1999:144), “Peran penting kyai dalam pendirian, pertumbuhan, perkembangan dan pengurusan sebuah pesantren berarti dia merupakan unsur yang paling esensial. Sebagai pemimpin pesantren, watak dan keberhasilan pesantren banyak bergantung pada keahlian dan kedalaman ilmu, karismatik dan wibawa, serta ketrampilan kyai”.

Sedangkan istilah kyai menurut Dhofier (1985:55), “berasal dari bahasa Jawa dan dipakai untuk tiga jenis gelar yang berbeda, yaitu: 1.sebagai gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap keramat. 2. gelar kehormatan bagi orang-orang tua pada umumnya; 3.gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada orang ahli agama Islam yang memiliki pesantren. Sedangkan pengertian kiyai menurut Nafis:

Seorang santri belajar kepada kyai tidak karena ilmu dan kompetensi yang dimiliki seorang kiyai, namun figur seorang tokoh yang suci, dekat dengan Tuhan, dan mempunyai kekuatan spiritual yang tinggi. Bagi santri, kyai tidak hanya sebagai seorang bapak yang telah diberi amanah orangtua santri yang di rumah, namun juga sebagai bapak spiritual yang dapat memberikan “rambu-rambu” jalan kebenaran” (Nafis , 2008 : 3).

Dari beberapa pengertian kyai sebagaimana tersebut diatas, maka menurut peneliti istilah kyai dalam konteks pesantren merupakan gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada ahli agama Islam yang memimpin Pondok Pesantren.

## 2) Santri.

Santri merupakan elemen yang cukup penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan dan perkembangan suatu pesantren karena langkah awal dalam pembangunan sebuah pesantren adalah harus ada murid yang datang untuk belajar dari seorang kyai. Setelah itu dilanjutkann dengan membangun beberapa fasilitas pondok seperti asrama, ruang belajar Masjid atau mushalla dan lain sebagainya.

Dhofier mengelompokan santri menjadi dua kelompok, yaitu santri kalong dan santri mukim. "Santri kalong merupakan bagian santri yang tidak menetap dalam pondok tetapi pulang ke rumah masing-masing sesudah selesai mengikuti suatu pelajaran di pesantren. Sedangkan santri mukim adalah santri yang menetap di dalam pondok pesantren dan biasanya berasal dari daerah jauh" (Dhofier, 1985:52).

Dari penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa terdapat 2 kelompok santri yaitu santri kalong (yang tidak tinggal di pondok) kecuali pada saat mengikuti pelajaran. Sedangkan santri mukim yang tinggal di pondok dan mengikuti semua kegiatan yang ditetapkan oleh pondok.

## 3) Masjid.

Masjid merupakan elemen penting dari sebuah Pondok pesantren. Dalam konteks ini, masjid berfungsi sebagai pusat kegiatan ibadah dan belajar mengajar, sebagai tempat melakukan sholat berjama'ah setiap waktu, juga

berfungsi sebagai tempat pertemuan atau musyawarah. menurut Dhofier (1985: 49), fungsi masjid merupakan “tempat yang paling tepat untuk mendidik para santri, terutama dalam praktek sembahyang lima waktu, khutbah, dan sembahyang Jumat, dan pengajaran kitab-kitab Islam klasik”.

Dengan demikian masjid dalam suatu Pondok pesantren merupakan tempat belajar tempat praktek sholat lima waktu, tempat sholat Jumat, tempat pengajaran kitab-kitab kuning dan tempat pertemuan.

#### 4) Pondok.

Pondok atau asrama santri merupakan suatu elemen penting sebagai tempat tinggal dan tempat beristirahat para santri setelah mengikuti beberapa kegiatan pesantren. Pengertian pondok adalah merupakan “tempat sederhana yang merupakan tempat tinggal kyai bersama para santrinya”(Hasbullah, 1999:142). Sedangkan zamahsari Dhofier menjelaskan pengertian dan fungsi pondok merupakan: “Salah satu niat pondok selain dari yang dimaksudkan sebagai tempat asrama para santri adalah sebagai tempat latihan bagi santri untuk mengembangkan ketrampilan kemandiriannya agar mereka siap hidup mandiri dalam masyarakat sesudah tamat dari pesantren” (Dhofier, 1985:45).

Dengan demikian Pondok merupakan asrama tempat tinggal kiyai bersama para santrinya untuk menjalankan kegiatan pesantren. Sedangkan peran pondok pesantren merupakan tempat pendidikan dan latihan bagi para santri untuk belajar hidup mandiri, saling tolong menolong dan sekaligus tempat menimba ilmu dari kiyainya.

#### 5) Kitab Islam klasik.

Elemen lain yang merupakan elemen Pondok Pesantren adalah kitab Islam klasik atau biasa disebut kitab kuning dan hal inilah yang membedakan antara pesantren dengan lembaga lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan global, maka diantara Pondok pesantren telah memasukkan pengetahuan umum sebagai salah satu bagian penting dalam pendidikan pesantren, namun pengajaran kitab-kitab Islam klasik masih diberi peluang yang cukup besar. Menurut Hasbullah teknik pengajaran kitab kuning, “Pada umumnya, pelajaran dimulai dengan kitab-kitab yang sederhana, kemudian dilanjutkan dengan kitab-kitab yang lebih mendalam dan tingkatan suatu pesantren bisa diketahui dari jenis kitab-kitab yang diajarkan (Hasbullah, 1999:144).

Adapun macam bidang ilmu yang diajarkan dalam kitab-kitab kuning, secara garis besar ada delapan macam: “ 1. Nahwu dan saraf (morfologi); 2. Fiqh; 3. Usul fiqh; 4. Hadis; 5. Tafsir; 6. Tauhid; 7. Tasawwuf dan Etika; dan 8. Cabang-cabang lain seperti tarikh dan balaghah (Dhofier 1985:5).

Dengan demikian kitab kuning merupakan salah satu unsure yang cukup penting dalam kehidupan pesantren, karena keberadaannya merupakan faktor penunjang keilmuan seorang santri, karena ilmu yang diperoleh dari kitab kuning tersebut akan dijadikan bekal dimasyarakat setelah menyelesaikan studinya di suatu Pondok Pesantren. Hanya dalam mengikuti tuntutan global dan perkembangan zaman, diantara pesantren telah menambahkan kurikulum pendidikan umum sebagai bagian dari kurikulum pesantren.

#### c. Tipologi Pondok Pesantren.

Terdapat beberapa pendapat tentang tipe pondok pesantren sebagaimana yang di berikan oleh beberapa pakar namun bila dicermati secara faktual ada

beberapa tipe pondok pesantren yang berkembang dalam masyarakat yang meliputi Pondok Pesantren tradisional, Pondok Pesantren Modern dan Pondok Pesantren komprehensif. Oleh sebab itu dalam melihat tipologi Pondok Pesantren, peneliti mencoba membagi Pondok Pesantren menjadi tiga tipe sebagaimana akan diuraikan dibawah ini:

1) Pondok Pesantren Tradisional.

Departemen Agama menyebut Pondok Pesantren ini dengan istilah Pondok Pesantren *salafiyah*: yaitu Pesantren yang masih tetap mempertahankan sistim pendidikan khas Pesantren, baik kurikulum maupun metode pendidikannya. Bahan ajar meliputi ilmu-ilmu agama Islam dengan menggunakan kitab-kitab kuning berbahasa Arab (Depag RI, 2005: 1).

Sedangkan menurut Zamakhsyari Dlofier: “Pesantren salafi merupakan pesantren yang tetap mempertahankan pengajaran kitab-kitab klasik dengan tetap memperhatikan tradisi lama dengan pengajaran sistem *sorogan* dan *wetonan* sebagai inti pendidikannya. Adapun pengajaran umum tidak banyak diberikan” (Dhofier 1985:5).

Dengan demikian Pondok pesantren salafi masih merupakan Pondok Pesantren yang tetap mempertahankan bentuk aslinya dengan mengajarkan kitab kitab kuning yang di tulis disusun oleh ulama’ terdahulu dan pengajarannya dengan menggunakan sistim halaqah yang dikenal dengan sistem *sorogan* dan *wetonan*.

2) Pondok Pesantren Modern.

Pondok Pesantren Modern merupakan salah satu tipe Pondok Pesantren yang telah beradaptasi dengan tuntunan pendidikan nasional, dimana selain

mengajarkan kitab-kitab kuning, juga mengikuti perkembangan kemajuan dengan melaksanakan program pendidikan nasional, hal ini dapat dilihat dari penyesuaian kurikulumnya, penyediaan tenaga guru dan kelengkapan sarana dan prasarana dengan berpedoman pada sistim Pendidikan Nasional.

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Nafis (2008: 3), bahwa: “Pesantren Modern tampaknya menerima hal-hal baru yang dinilai baik, di samping tetap mempertahankan tradisi lama yang baik. Pesantren jenis ini mengajarkan pelajaran umum di madrasah dengan sistem klasikal dan membuka sekolah-sekolah umum di lingkungan pesantren”.

Dari pendapat Nafis tersebut, Pondok Pesantren modern merupakan Pondok Pesantren yang telah menyesuaikan diri dengan sistem sekolah demi memenuhi kebutuhan global dan tuntutan perkembangan. Sebagai konsekwensinya Pondok Pesantren tersebut perlu menyesuaikan kurikulumnya dengan kurikulum pemerintah atau kurikulum pendidikan nasional sebagaimana yang terlihat pada beberapa Pondok Pesantren yang dengan menyelenggarakan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah atau yang menyelenggarakan pendidikan umum seperti SD, SMP, SMA/SMK bahkan sampai Perguruan Tinggi.

### 3) Pondok Pesantren Komprehensif.

Seiring dengan laju perkembangan masyarakat maka pendidikan pesantren baik tempat bentuk hingga substansi telah banyak mengalami perubahan. Pesantren tak lagi sesederhana tetapi telah mengalami perubahan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan zaman. Oleh sebab itu Pondok Pesantren Komprehensif merupakan Pondok Pesantren yang memdukan antara

pendidikan agama dengan pendidikan nasional dengan tetap mempertahankan pengajaran kitab kuning. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ghazali (3003:15) bahwa: “Sistem pesantren ini disebut komprehensif merupakan sistem pendidikan dan pengajaran gabungan antara yang tradisional dan yang modern. Artinya didalamnya diterapkan pendidikan dan pengajaran kitab kuning dengan metode sorogan, bandongan dan watonan, namun secara regular sistem pesekolahan terus dikembangkan”.

d. Metode Pembelajaran.

Menurut Mastuhu (1994: 104), Metode yang digunakan di pesantren dalam pengajaran kitab kuning ada empat, yaitu Sorogan, bandongan, halaqoh dan hapalan. Sedangkan Abdullah Syukri Zarkasyi berpandangan bahwa metode yang dominan diterapkan pada lembaga pendidikan pesantren adalah metode sorogan dan bandongan, disebabkan oleh sarana yang masih belum memadai. Sedangkan pada pesantren yang telah maju, telah mengakomodasi metode-metode modern, hal ini selain disesuaikan dengan keinginan para pengelola pesantren, juga disebabkan oleh tuntutan perkembangan dan tersedianya sarana yang memadai (Zarkasyi, 2005: 77).

Dari penyampaian Abdullah Syukri Zarkasyi dapat dipahami bahwa penggunaan masing masing metode, sangat tergantung dari jenis pesantren yang menjalankannya. Metode Sorogan dan bandongan merupakan metode yang banyak dijalankan di beberapa Pesantren Salafi, sedangkan metode yang lainnya seperti halaqoh, hapalan dan muzakarah banyak diterapkan di pondok pesnatren khalafi atau modern.

Berkaitan dengan metode pembelajaran, peneliti mencoba membagi metode pengajaran di Pondok Pesantren menjadi dua yaitu Metode Pembelajaran tradisional dan Metode Pembelajaran modern.

1) Metode Pembelajaran Tradisional.

Metode tradisional seperti sorogan dan bandongan merupakan metode yang dilaksanakan oleh beberapa pesantren salaf sejak awal dengan mengajarkan kitab kuning atau kitab-kitab agama yang ditulis oleh para ulama abad pertengahan.

a) Metode Sorogan.

Metode sorogan merupakan salah satu metode pengajaran yang digunakan oleh pesantren salaf. Adapun teknis pelaksanaannya menurut (Hasbullah, 1999: 50-51): “Para Santri belajar secara bersama-sama dihadapan kiyai, kemudian mereka antri menunggu giliran masing-masing, dengan system pengajaran ini, terjadi hubungan yang harmonis antara kyai dengan santri, sebab kyai dapat mengenal kemampuan santri secara satu persatu”.

Sementara itu Abdullah Syukri Zarkasyi menjelaskan Metode sorogan: sebagai bentuk pengajaran yang bersifat individual, dimana para santri secara satu persatu menghadap kyai dengan membawa kitab kitab tertentu. Selanjutnya kyai membacakan kitab tersebut beberapa baris dengan menterjemahkannya kedalam bahasa jawa. Setelah kyai selesai membaca kitab, para santri disuruh membacanya secara bergiliran (Zarkasyi, 2005: 73).

Menurut Arifin (1991: 38). Metode Sorogan merupakan bentuk metode yang dianggap rumit, dikarenakan metode tersebut memerlukan kesabaran, kerajinan, dan kedisiplinan santri secara pribadi. Dengan demikian keberhasilan dalam metode ini sangat ditentukan oleh ketaatan santri terhadap kyainya,

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa sistem sorogan merupakan belajar secara individual, dimana seorang santri berhadapan dengan seorang guru untuk didengarkan bacaannya. Dengan sistem ini seorang dapat mengawasi, menilai dan membimbing kemampuan setiap santri dalam penguasaan materi.

b) Metode Wetonan/bandongan.

Menurut Zarkasyi, (2005:74). Metode Wetonan adalah cara belajar secara berkelompok yang diikuti oleh para santri dengan menterjemahkan kalimat demi kalimat dari kitab yang dipelajarinya. Bentuk pelaksanaannya adalah dimana seorang kyai membacakan kitab tertentu, sedangkan para santri mendengarkan dan menyimak bacaan kyai. Metode ini bisa dikatakan metode bebas, karena tidak terdapat sistem evaluasi dan perjenjangan (kenaikan tingkat).

Menurut Sarijo (1989 ; 108):

Metode Wetonan identik dengan metode kuliah, yaitu para santri mengikuti pelajaran secara duduk di sekeliling kyai yang menerangkan secara kuliah dan para santri menyimak kitab masing-masing dan membuat catatan padanya. Metode ini berasal dari kata wektu (jawa) yang berarti waktu, karena pengajaran ini diberikan pada waktu-waktu tertentu, biasanya pada saat sebelum dan setelah melaksanakan shalat fardhu.

Dengan demikian metode wetonan lebih bersifat umum dibandingkan dengan metode sorogan, kalau dalam metode sorogan seorang kyai mengawasi, menilai dan membimbing kemampuan seorang santri dalam menguasai materi yang dipelajari. Sedangkan dalam metode wetonan seorang kyai memberikan pengajaran kitab secara umum dan tidak mengawasi pemahaman santri.

c) Metode pembelajaran modern.

Terdapat beberapa metode pembelajaran modern sebagaimana yang disampaikan Abdullah Syukri seperti metode halaqoh, bandongan, hapalan, Muhawarah, mudzakah dan metode metode majlis taklim.

Dibawah ini akan dijelaskan pengertian masing masing metode sebagai berikut: *Metode halaqah* adalah metode yang mirip dengan *bandongan*. metode ini merupakan metode diskusi. Diskusi yang dilakukan bukan untuk mempertanyakan kemungkinan benar atau salahnya apa yang diajarkan oleh kiyai, akan tetapi diskusi dimaksudkan untuk memahami makna yang terkandung dalam kitab yang diajarkan oleh kiyai.

Metode hapalan dalah merupakan metode dimana para santri diharuskan menghafal beberapa materi dalam suatu kitab untuk diperdengarkan kepada kiyai. Metode *muhawarah* merupakan suatu kegiatan yang melatih para santri untuk melakukan komunikasi dengan menggunakan bahasa Arab. Metode ini biasanya dilakukan pesantren satu kali dalam satu minggu atau dua kali dalam satu minggu.

Adapun metode *mudzakah* merupakan suatu kegiatan pertemuan ilmiah yang diikuti para santri secara khusus membahas masalah-masalah *diniyah* seperti masalah ibadah, akidah serta masalah-masalah keagamaan secara umum. Dan Metode *majlis ta'lim* adalah suatu metode yang menggunakan media penyampaian ajaran islam yang bersifat umum dan terbuka. Biasanya para peserta pengajaran (pengajian) terdiri dari berbagai lapisan dengan latar belakang pengetahuan yang beragam, begitu juga dengan tingkatan usia dan jenis kelaminnya (Zarkasyi, 2005: 75 - 77).

## B. Kerangka berfikir

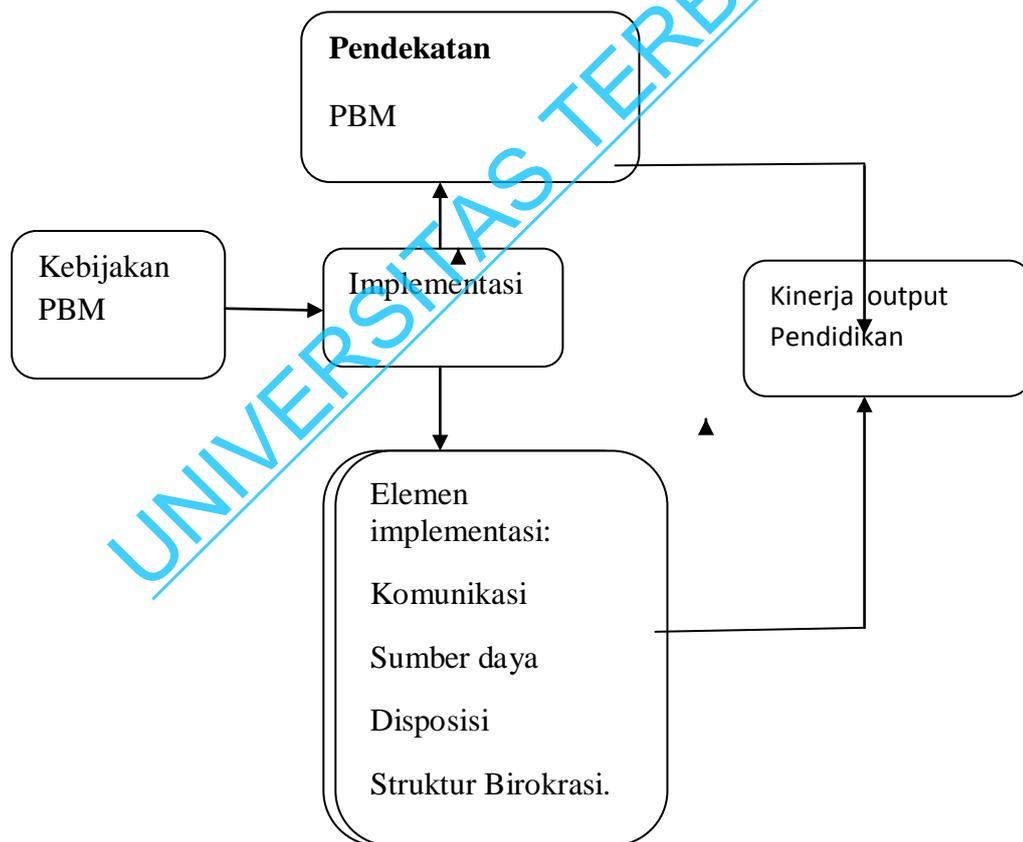
Suatu kebijakan tidak pernah memberikan makna apabila kebijakan tersebut tidak diimplementasikan kepada target kebijakan. Karena implementasi kebijakan merupakan proses nyata yang akan dirasakan langsung oleh target kebijakan tersebut. Demikian pula halnya dengan Kebijakan pemerintah tentang Pendidikan berbasis masyarakat yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Nurul Bayan tidak akan pernah memberikan makna kecuali setelah diimplementasikan kepada target kebijakan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa implementasi Pendidikan Berbasis Masyarakat di Pondok Pesantren Nurul Bayan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan kualitatif dengan metode diskriptif. Tehnik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dalam melakukan wawancara, peneliti melibatkan informan kunci yaitu Pimpinan Pondok Pesantren, kepala sekolah Tsanawiyah, Direktur Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiyah dan sektrtris Pondok Pesantren Nurul Bayan. Sedangkan untuk analisis data, langkah-langkah yang diambil adalah Mereduksi, Memahami dan Menguji data dengan menganalisis data yang telah terorganisir, dan langkah terakhir menginterpretasikan apa-apa yang diperoleh dari setiap analisis pertanyaan penelitian dan menarik kesimpulan.

Untuk mengetahui implementasi Pendidikan Berbasis masyarakat di Pondok Pesantren Nurul Bayan, peneliti mencoba melihat indikator yang diberikan oleh Aris Pongtulan, dan Theresia K. Brahim tentang indikator Pendidikan berbasis Masyarakat.

Konsep Edwards III tentang implementasi digunakan sebagai pedoman untuk mengetahui seberapa jauh elemen-elemen yang dirumuskan Edward III memberikan pengaruh terhadap keberhasilan implementasi Pendidikan Bebas Masyarakat di Pondok Pesantren Nurul Bayan. Menurut Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi (*Communications*), Sumber Daya (*resources*), sikap (*dispositions atau attitudes*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Hasil penelitian ini berupa laporan diskriptif tentang implementasi Pendidikan Berbasis masyarakat di Pondok Pesantren Nurul Bayan sebagaimana terlihat pada gambar kerangka berpikir dibawah ini.



Gambar 2.2. Kerangka Berpikir.

Sumber; Dielaborasi dari Edward III, 1980.

### C. Definisi Operasional

#### Implementasi:

Pelaksanaan kebijakan pemerintah tentang Pendidikan berbasis masyarakat melalui kegiatan pendidikan dengan melibatkan beberapa pihak yang berkepentingan demi tercapainya suatu tujuan.

#### PBM (Pendidikan berbasis masyarakat):

Penyelenggaraan pendidikan di pondok Pesantren, sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.

#### Kebijakan publik:

Suatu keputusan pemerintah yang ditetapkan dalam bentuk peraturan atau undang-undang untuk ditindaklanjuti dengan program-program dan tindakan kepada target kebijakan.

#### Pondok Pesantren:

Tempat tinggal kiyai bersama para santrinya dengan sistem asrama untuk menjalani beberapa kegiatan dan aktifitas yang berkaitan dengan kehidupan individu, social dan pendidikan.

#### Pendekatan PBM:

Kegiatan yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Nurul Bayan dalam rangka pelaksanaan Pendidikan berbasis masyarakat dengan menggunakan beberapa pendekatan baik yang bersifat internal maupun eksternal.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Desain Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan kualitatif dengan metode diskriptif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran secara komprehensif tentang implementasi Pendidikan Berbasis Masyarakat di Pondok Pesantren Nurul Bayan apa adanya. Untuk mempermudah dan memperlancar tercapainya tujuan penelitian, maka dilakukan kegiatan observasi lapangan, pelaksanaan wawancara dan didukung dengan metode dokumentasi.

#### B. Pemilihan Informan

Dalam menentukan informan, peneliti memilih informan yang banyak mengetahui dan menguasai permasalahan yang diteliti, dengan harapan agar informan dapat memberikan gambaran tentang beberapa hal yang berkaitan dengan implementasi pendidikan berbasis masyarakat di Pondok Pesantren Nurul Bayan. Adapun yang dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini adalah: Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Bayan, kepala Madrasah Sanawiyah Direktur Tarbiyatul Muallimin Al- Islamiyah dan Sekretaris Pondok.

#### C. Instrumen penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti terjun ke lapangan dan berusaha mengumpulkan data dan informasi dan berusaha untuk dapat memproses data tersebut dan selanjutnya memanfaatkan kesempatan untuk mengklarifikasikan dan mengikhtisarkan data. Sedangkan untuk memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data dan informasi, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dalam rangka memperoleh data primer adalah dengan menggunakan instrumen

wawancara terarah dengan menyiapkan pedoman wawancara. Sedangkan untuk data skunder, peneliti menggunakan instrumen pedoman review dokumen.

Oleh sebab itu untuk memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data dan informasi, peneliti membawa alat bantu berupa kamera tape recorder, pedoman wawancara dan alat tulis. Sedangkan untuk pedoman wawancara terdiri dari: Daftar pertanyaan Indikator Implementasi, Daftar Pertanyaan indicator PBM, dan Daftar Pertanyaan tentang sejarah dan perkembangan pondok Pesantren Nurul Bayan.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

“Data adalah unsure paling penting dalam penelitian. Semua penelitian mengandung data. Tanpa data penelitian akan mati dan tidak bisa disebut sebagi penelitian. Begitu pula dengan kualitas penelitian, sangat ditentukan oleh data yang kita kumpulkan. Jika kualitas data buruk, tidak valid, tidak reliable, maka hasil penelitian kita pun akan buruk. Sesuai dengan ungkapan *garbage in garbage out* maka jika data yang kita olah tidak jelas, hasilnyapun tidak jelas. (Irawan, Prasetya: 2009: 5.2). Melihat dari sumbernya, maka data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder.

##### **1. Data Primer.**

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sebagaimana yang disampaikan Irawan, bahwa “data primer adalah data yang diambil langsung, tanpa perantara dari sumbernya. Sumber ini dapat berupa benda-benda, situs atau manusia” (Irawan, 2009: 5.4).

Dalam penelitian data primer diperoleh melalui wawancara dengan Pimpinan Pondok, Kepala sekolah Sanawiyah, Direktur Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiyah Nurul Bayan dan Sekretaris Pondok.

## 2. Data Sekunder.

Data skunder merupakan data yang mendukung pembahasan yang bisa diperoleh dari dokumen-dokumen seperti laporan, karya tulis orang lain, Koran, atau majalah. Menurut Prasetya Irawan adalah; “Data skunder adalah data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya. Data skunder biasanya diambil dari dokumen-dokumen (laporan, karya tulis orang lain, Koran, majalah). Atau seseorang mendapat informasi dari “orang Lain” Orang lain inilah yang mendapatkan data primer. Bila orang lain ini bercerita kepada kita maka kita mendapatkan data skunder”. (Irawan, Prasetya 2009: 5.5)

Walaupun sudah tersedia data sekunder secara fisik, akan tetapi dalam melengkapi data peneliti berusaha melengkapi dengan mengumpulkan beberapa dokumen penting yang sesuai dengan tujuan penelitian. Oleh sebab itu data sekunder diperoleh dari Pondok Pesantren berupa dokumen dari Sekretaris Pondok, Lembaga TMI(Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiyah), Madrasah Aliyah dan Madrasah Sanawiyah atau lembaga terkait yang berhubungan dengan penulisan ini.

## **E. Prosedur Pengumpulan Data.**

Tehnik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah tehnik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berikut ini akan dijelaskan masing masing tehnik sebagai berikut:

### 1. Pengumpulan data Primer.

Wawancara adalah “sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (interviewee), interviu digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang, misalnya untuk mencari data tentang variabel latar belakang murid, orang tua, pendidikan, perhatian, sikap terhadap sesuatu” (Arikunto. 2008: 155).

Terdapat dua jenis wawancara: 1). wawancara mendalam di mana peneliti menggali informasi secara mendalam dengan terlibat langsung dengan kehidupan informan dan bertanya jawab secara bebas tanpa pedoman pertanyaan yang disiapkan sebelumnya sehingga suasananya hidup, dan dilakukan berkali-kali; 2) wawancara terarah di mana peneliti menanyakan kepada informan hal-hal yang telah disiapkan sebelumnya. (Diambil 8 Agustus 2011 dari, <http://www.mudjiarahardjo.com/materi-kuliah/336.html?task=view>).

Dalam pengumpulan data Primer ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan Pimpinan Pesantren, kepala sekolah Tsanawiyah, Direktur Tarbiyatul Muallimin Al- Islamiyah Nurul Bayan dan Sekretaris Pesantren.

### 2. Pengumpulan Data Sekunder.

Tehnik yang dilakukan dalam mengumpulkan data sekunder adalah dengan menggunakan tehnik dokumentasi yang merupakan bahan acuan dan data awal dalam melakukan wawancara dengan mengadakan penelusuran lebih jauh tentang fenomena yang terjadi dalam data yang ada melalui observasi dan wawancara dan sekaligus dapat dijadikan sebagai bahan pembanding dari informasi yang diperoleh dari observasi dan wawancara.

Dengan demikian Peneliti berusaha mengkaji dan menganalisa beberapa program dan kegiatan Pondok pesantren dan UU yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan berbasis masyarakat di pondok pesantren Nurul Bayan dikaitkan dengan kesesuaian pelaksanaan tiga standar yaitu standar guru, kurikulum dan sarana prasarana dengan standar nasional pendidikan.

Untuk kepentingan tersebut, peneliti mengumpulkan beberapa dokumen yang relevan untuk mendukung data penelitian yang diperoleh dari Pondok Pesantren berupa dokumen dari Sekretaris Pondok, Lembaga TMI, Madrasah Aliyah dan Madrasah Tsanawiyah.

#### F. Metode Analisa Data.

Menurut Prasetya Irawan (5.23- 5.29), Langkah-langkah dalam analisa data adalah sebagai berikut:

##### 1) Pengumpulan data mentah

Sebagaimana disebutkan terdahulu, bahwa dalam pengumpulan data mentah, dilakukan dengan wawancara dengan beberapa informan, observasi lapangan dan kajian pustaka dengan menggunakan alat bantu seperti tape recorder dan kamera.

##### 2) Mentranskrip data.

Pada langkah ini peneliti berusaha mengubah catatan yang diperoleh dari informan baik dari hasil rekaman atau catatan tulisan tangan ke bentuk tertulis.

##### 3) Pengkodingan data.

Membaca ulang seluruh data yang sudah di transkrip dengan harapan untuk menemukan hal-hal penting yang diupayakan untuk dibuat kata kuncinya.

4) Pengkategorian data.

Menyederhanakan data dengan mengikat kata-kata kunci dalam kategori.

5) Penyimpulan Sementara.

Membuat kesimpulan sementara dengan tetap berdasarkan pada data yang diperoleh.

6) Triangulasi.

Merupakan proses check and recheck antara satu sumber data dengan sumber data lainnya dengan memperhatikan dan mengakomodasi semua pendapat dari setiap informan.

7) Penyimpulan akhir.

Membuat pernyataan umum dan logis yang ditarik dari beberapa kasus, dan menunjukkan pola yang menggambarkan ciri-ciri kasus-kasus tersebut.

## BAB IV

### TEMUAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Nurul Bayan

##### 1. Sejarah dan perkembangan PP Nurul Bayan

Pondok Pesantren Nurul Bayan terletak di kecamatan Bayan berada sekitar 40 Km dari ibu kota Kabupaten Lombok Utara. Pondok Pesantren ini didirikan oleh H. Abdul Karim pada tanggal 19 November 1991 dengan dibantu dana oleh kedua orang tua beliau H. Abdul Ghofur Rowi, dan Hj. Mudrikah Salamah. Pemberian nama Nurul Bayan, dimaksudkan untuk mengenang dan mengambil barokah dari nama seorang da'i yang berda'wah dan membawa Islam ke di Bayan kala itu bernama Nurul Bayan Al-Anshari (Wawancara dengan pimpinan PP Nurul Bayan).

Pendirian Pondok Pesantren ini dilatarbelakangi oleh rasa tanggung jawab para pendiri terhadap agama, bangsa dan negara untuk dapat melahirkan kader munzirul qoum dan ummahat sholihah yang mampu dalam berbagai lapangan kehidupan disamping untuk memenuhi hajat dan keinginan masyarakat pada saat itu untuk mendambakan pendidikan Islam dalam bentuk pesantren. Hal ini sesuai dengan pernyataan pimpinan PP:

Yang melatar belakangi pendirian pondok ini adalah karena hajat masyarakat pada saat itu untuk mendambakan pendidikan pesantren, disamping didorong oleh rasa tanggung jawab terhadap agama, bangsa dan negara untuk dapat melahirkan kader munzirul qoum dan ummahat sholihah yang mampu dalam berbagai lapangan kehidupan. (wawancara dengan pimpinan PP Nurul Bayan).

Pondok Pesantren Nurul Bayan termasuk salah satu lembaga pendidikan Islam yang berusaha melalui kegiatannya memadukan antara pendidikan sekolah, pendidikan keluarga dan pendidikan masyarakat. Pendidikan sekolah

terlihat dari kegiatan belajar mengajar yang dijalankan secara klasikal yang dimulai dari pagi hari sampai dengan siang hari. Pendidikan rumah tangga dapat dilihat dari kehidupan santri di Pondok Pesantren yang santri santrinya dikelompokkan dan bertempat tinggal di beberapa kamar dan di dalam setiap kamar dipimpin oleh ketua, sekretaris, dan bendahara dibawah asuhan para guru. (Wawancara dengan sekretaris PP Nurul Bayan).

Sedangkan pendidikan kemasyarakatan terlihat dari beberapa kegiatan santri yang diawasi oleh organisasi santri dengan beberapa kegiatan seperti; shalat berjamaah, bimbingan membaca Alquran, pelajaran berpidato, kegiatan pramuka dan beberapa kegiatan keterampilan dan kesenian. Beberapa kegiatan santri dapat dilihat dilihat pada Jadwal kegiatan harian dan mingguan Pondok Pesantren Nurul Bayan. (Untuk kegiatan harian dan mingguan dapat dilihat pada daftar tabel 4.3 dan 4.4 dihalaman 73).

KH. Abdul Karim merupakan putra ke enam dari pasangan TGH Abdul Ghafur dan Mudrikah salamah, mempunyai 7 saudara, 4 laki dan 3 perempuan. Sejak kecil, Abdul Karim telah banyak menerima pendidikan agama dari kedua orang tuanya. bapak beliau adalah seorang pengusaha, ustadz dan Muballig. Bahkan beliau berhijrah dari asal kelahirannya di Nganjuk ke Lombok Barat tepatnya di Pondok Pesantren Darul Qur'an Bengkel kecamatan Labuapi sekitar tahun 1955 dengan niat untuk mengamalkan ilmu yang diperoleh beliau dari Pondok Pesantren di Jawa. Karena suhu politik yang kurang mendukung akhirnya sekitar tahun 1967 TGH Abdul Ghafur bersama putra putrinya hijrah dari bengkel ke Tanjung Lombok Utara untuk melanjutkan da'wahnya, pada

saat itu Abdul karim baru berusia beberapa hari saja. (Wawancara dengan H. Mudrikah Salamah).

Abdul Karim dikirim ke Pondok Modern Gontor sampai tamat dan sempat mengabdikan ilmunya di Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Madura. Untuk menambah bekal dimasa depan, beliau sempat belajar dan mendalami kitab kuning di Pondok milik embah beliau di Pondok Pesantren Darussalam Krempeyang Nganjuk sebelum melanjutkan studinya di Universitas Bagdad di Irak. Di Bagdad disaat beliau hampir menyelesaikan studinya terpaksa harus pulang ke tanah air karena adanya perang Irak dan Iran. Setelah pulang ke tanah air dia kawin dengan seorang putri dari Mojekerto Halimatussa'diyah. Dan pada bulan september 1991 beliau bersama istrinya memulai membuka pengajian di desa Sukadana. (wawancara dengan Pimpinan PP Nurul Bayan).

Perintisan Pondok Pesantren ini diawali Di desa Sukadana dengan menyewa rumah seorang penduduk dan pada saat itulah beliau mulai merintis pengajian yang diikuti oleh 4 siswa yang berasal dari desa sekitar dan dalam waktu yang tidak lama telah berkembang menjadi puluhan siswa. Melihat tempat belajar mereka yang begitu memperhatikan dan sudah tidak mampu lagi menampung para santri yang kian hari jumlah santri kian bertambah, maka pada akhir Mei 1992 dilakukan pemindahan lokasi pondok pesantren dari Sukadana ke Telaga Bagek desa Anyar Bayan diatas tanah seluas 4 ha, Tanah tersebut merupakan tanah yang dibeli oleh kedua orang tua beliau dengan persetujuan KH. Abdul Karim. Hal ini sesuai dengan pernyataan Pimpinan PP Nurul Bayan bahwa:

PP Nurul Bayan berdiri pada tanggal 19 November 1991, diatas tanah sewaan seluas 4 are dengan santri pertama hanya 4 orang. Alhamdulillah

satu tahun kemudian Pondok Pesantren Nurul Bayan sudah memiliki lahan sendiri seluas 4 Hektar, dari situlah segalanya dimulai. Pendidikan dikemas dengan system mu'alimin dengan masa belajar 6 tahun. (wawancara dengan Pimpinan PP Nurul Bayan).

Dari tahun ketahun tampak adanya peningkatan dan pengembangan, maka pada th 1995 didirikan MTs disusul dengan berdirinya Madrasah Aliyah pada th 1998 untuk dapat mengikuti tuntunan pendidikan nasional dengan tetap mempertahankan sitim TMI. Dan dalam rangka memenuhi hajat tenaga pengajar dalam rangka memantapkan dan mengembangkan kualitas guru-guru, maka pada th 2008 telah berdiri pula Ma'had Aly dengan masa belajar 4 tahun.

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Pimpinan PP Nurul Bayan:

Pada tahun 1995 didirikanlah Madrasah Tsanawiyah dan pada tahun 1998 didirikan pula Madrasah Aliyah. Tapi tetap mengutamakan program Mu'allimin. Dalam rangka peningkatan dan pemantapan guru-guru, maka pada tahun 2008 telah berdiri pula Ma'had Aly dengan masa belajar 4 tahun. Dari tahun ke tahun Alhamdulillah respon dan kepercayaan masyarakat terus meningkat. Dengan mujahadah dan taufiq Allah SWT. Pada Tahun Pelajaran ini (2011-2012) Pondok Pesantren Nurul Bayan sudah berdiri diatas lahan 6,5 Hektar dengan jumlah santri 328 putra-putri dan jumlah guru 40 orang. (wawancara dengan Pimpinan PP Nurul Bayan).

Setelah pesantren menjalankan misinya selama 7 tahun dan terlihat beberapa kemajuan santri baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, maka berkat kemurahan Allah pada tahun 2000, Lokasi pesantren yang dulunya berjumlah 4 ha, bertambah menjadi 6 are ha yang merupakan wakaf seorang dermawan bernama H. Abdullah bin Hizam dari mataram sebanyak 2 ha. Berselang beberapa tahun kemudian tepatnya tahun 2009 seorang dermawan dari Bayan bernama Raden Dewanom mewakafkan tanahnya, sehingga sampai dengan akhir tahun 2011, luas tanah yang dimiliki pesantren berjumlah 6,5 ha. (wawancara dengan Sekretaris PP Nurul Bayan).

## B. Visi dan Misi Dan Tujuan Pendidikan Pondok Pesantren.

Sebagai lembaga pendidikan Pondok Pesantren Nurul Bayan memiliki Visi dan misi sebagaimana terlihat dari hasil wawancara dengan pimpinan adalah:

Visinya adalah Menjadikan Pondok Pesantren Nurul Bayan sebagai Tempat Penyemaian Kader Umat yang memiliki Kompetensi dalam bidang ilmu-ilmu ke Islaman, bahasa Al-Qur'an dan ilmu-ilmu social. Sedangkan Misinya adalah: Membentuk lembaga-lembaga pendidikan, Memperluas unit-unit usaha ekonomi Pondok Pesantren dan Meningkatkan pelayanan umat. Tujuan Pendidikannya untuk melahirkan kader *Munzirulqoum* dan *Ummahat Solihat* yang mampu terjun di berbagai lapangan kehidupan. (wawancara dengan Pimpinan PP Nurul Bayan).

Dengan demikian visi Pondok Pesantren Nurul Bayan sebagai Tempat Penyemaian Kader Umat yang memiliki Kompetensi dalam bidang ilmu-ilmu ke Islaman, bahasa Al-Qur'an dan ilmu-ilmu social. Sedangkan misinya adalah Membentuk lembaga-lembaga pendidikan, Memperluas unit-unit usaha ekonomi Pondok Pesantren dan Meningkatkan pelayanan umat. Sedangkan tujuan pendidikannya adalah untuk melahirkan kader *Munzirulqoum* dan *Ummahat Solihat* yang mampu terjun di berbagai lapangan kehidupan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, Pondok Pesantren Nurul Bayan telah berusaha sejak awal pendiriannya untuk memadukan antara sistim Pendidikan Pesantren dengan sistim pendidikan nasional. Untuk kepentingan tersebut, Pesantren telah membentuk Lembaga Pendidikan formal dengan nama TMI (Tarbiyatul Muallimin al-Islamiyah). Dengan demikian kurikulum yang diterapkan adalah perpaduan antar kurikulum pesantren dan kurikulum pendidikan nasional dalam hal ini kurikulum departemen Agama dan kurikulum Departemen Pendidikan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Pimpinan Pondok Pesantren:

“Pembelajaran di pondok ini menggunakan sistem klasikal dan dalam kurikulumnya memadukan antara kurikulum pesantren (Kurikulum Pondok Gontor) dan kurikulum pendidikan nasional”. (wawancara dengan Pimpinan PP Nurul Bayan). Untuk mengetahui struktur kurikulum TMI dapat dilihat pada tabel 4.8.

Dalam Pelaksanaan Kurikulum Diknas sudah dapat berjalan sesuai dengan harapan hanya masih terkendala pada masalah waktu karena harus menyesuaikan dengan keadaan pesantren. Menurut Pimpinan PP Nurul Bayan:

Kurikulum yang dilaksanakan di pesantren ini adalah merupakan perpaduan antara kurikulum Pondok Modern Gontor dengan Kurikulum Pendidikan Nasional. Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Nasional sudah berjalan dengan baik dan semua materi yang ditetapkan oleh pemerintah sudah diajarkan semua hanya masalah waktu/forsi waktunya harus menyesuaikan dengan keadaan pesantren.

Dengan demikian kurikulum yang diterapkan di Pondok Pesantren Nurul Bayan adalah merupakan perpaduan antara kurikulum Pesantren dan kurikulum Diknas.

## 2. Metode pembelajaran di Pondok Pesantren Nurul Bayan.

Dalam rangka mengikuti tuntutan dan perkembangan zaman, Metode pembelajaran yang digunakan di Pondok Pesantren Nurul Bayan, selain menggunakan metode tradisional juga menggunakan metode modern. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan pimpinan pondok bahwa:

Metode Pembelajaran yang digunakan di pondok ini adalah selain menggunakan metode modern, pondok ini juga tetap mempertahankan metode pesantren salaf/tradisional seperti wetonan, bandongan atau sorogan. Metode tradisional ini tetap dipertahankan dengan maksud untuk mendidik para santri tentang keptuhan kepada para kiyai dan pembantu kiyai/Ustadz dan untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan. (wawancara dengan Pimpinan PP Nurul Bayan).

Berdasarkan hasil observasi, bahwa metode pembelajaran modern seperti metode halaqoh, hapalan dan muzakarah digunakan untuk proses belajar mengajar yang bersifat klasikal. Sedangkan metode pembelajaran tradisional digunakan dalam pengajaran kitab-kitab kuning seperti metode sorogan dan bandongan hal ini dimaksudkan untuk mendidik para santri tentang kepuhuan kepada para kiyai dan untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan.

Menurut peneliti tipe Pondok Pesantren ini adalah tipe Pondok Pesantren modern, karena dalam pembelajarannya selain menggunakan metode sorogan dan bandongan sebagai ciri khas sistim pembelajaran pesantren, juga telah mengikuti perkembangan zaman dengan mengakomodasi beberapa metode modern. Dengan demikian kehadiran Pondok Pesantren Nurul Bayan, telah memberikan nuansa baru bagi perkembangan pendidikan Islam di Bayan dan merupakan salah satu alternatif lembaga pendidikan Islam yang diminati masyarakat saat ini, hal ini terbukti dari peningkatan jumlah santri yang belajar di Pondok Pesantren tersebut yang dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan.

### **C. Implementasi Pendidikan Berbasis masyarakat.**

#### **1. Pendekatan pendidikan berbasis masyarakat.**

Konsep pendidikan berbasis masyarakat merupakan pendidikan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Konsep tersebut memberikan gambaran bahwa pendidikan berbasis masyarakat merupakan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di masyarakat dan diperuntukkan untuk masyarakat.

Dengan demikian partisipasi masyarakat pada setiap kegiatan belajar mengajar mutlak dibutuhkan demi tercapainya tujuan yang diinginkan. Untuk mengetahui pendekatan pendidikan berbasis masyarakat di Pondok Pesantren Nurul Bayan, beberapa pertanyaan disusun dengan mengacu pada beberapa indikator yang sekaligus dapat dijadikan sebagai pendekatan PBM sebagaimana yang diberikan oleh Aris Pongtuluran.

Sebagai lembaga pendidikan yang berbasiskan masyarakat, Pondok Pesantren Nurul Bayan tidak saja mencurahkan perhatian pada proses pelaksanaan pendidikan secara internal, namun juga telah memberikan perhatian pada lingkungan eksternal dengan memperhatikan beberapa masalah yang berkembang di masyarakat seperti upaya penurunan angka anak usia sekolah yang tidak bersekolah, pengurangan ketimpangan antar wilayah atau antar kelompok social ekonomi dalam masyarakat dan peningkatan kesadaran orangtua dalam membantu anaknya belajar. Berikut ini akan dijelaskan masing masing pendekatan:

a. Pendekatan eksternal.

1) Penurunan angka anak usia sekolah yang tidak bersekolah.

Agar pendidikan berbasis masyarakat berjalan dengan baik beberapa langkah antisipasif dilakukan pesantren dalam rangka menurunkan angka anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan pondok pesantren Nurul Bayan:

Dalam rangka menurunkan angka anak usia sekolah yang tidak bersekolah, pesantren menugaskan beberapa guru yunior secara terjadwal untuk membimbing dan mengajar anak-anak usia sekolah sekitar pesantren untuk belajar membaca Alquran, dengan harapan dapat terotivasi untuk melanjutkan studi di pesantren, karena persyaratan khusus yang diberlakukan pesantren adalah bahwa setiap calon siswa yang ingin belajar

dipesantren Nurul Bayan harus lulus dalam test Alquran selain test bahasa Indonesia , matematika, menulis arab dan psycho test.

Dengan demikian langkah yang diambil pesantren adalah dengan menugaskan beberapa guru pesantren untuk mengajarkan anak-anak usia sekolah dilingkungan pesantren untuk belajar membaca Alqur'an diharapkan dapat terotivasi untuk melanjutkan studi di pesantren.

b) Pengurangan ketimpangan antar kelompok social ekonomi dalam masyarakat.

Selain menyalurkan dana BSM, Pondok Pesantren juga memberdayakan masyarakat atau wali murid yang membutuhkan pekerjaan dengan ikut mengambil bagian pada beberapa jenis usaha seperti usaha pengiriman kelapa, usaha koperasi dan usaha peternakan.

Berdasarkan wawancara dengan pimpinan Pondok Pesantren Nurul Bayan bahwa:

Dalam upaya menanggulangi ketimpangan antar kelompok social ekonomi, ada beberapa langkah yang ditempuh pesantren diantaranya menyalurkan dana BSM (Bantuan Sosial Miskin) kepada siswa yang kurang mampu dengan sepengetahuan wali murid masing-masing dan melibatkan wali murid atau sanrti yang membutuhkan pekerjaan dengan ikut mengambil bagian pada beberapa jenis usaha seperti usaha pengiriman kelapa, usaha koperasi dan usaha peternakan. (Wawancara dengan pimpinan Nurul Bayan)

Usaha peternakan terdiri dari peternakan sapi dan itik petelur. Untuk pemeliharaan itik petelur, pesantren menugaskan beberapa santri untuk memelihara itik dengan catatan bahwa hasil yang diperoleh dapat dimanfaatkan santri untuk meringankan beban hidupnya di pesantren. Adapun peternakan sapi, "Pesantren memberikan kesempatan kepada wali murid yang membutuhkan dengan sistim bagi hasil. Setiap wali murid dapat memelihara 2

sampai dengan 3 ekor sapi di rumah masing-masing. Saat ini pesantren memiliki 37 ekor sapi yang dipelihara oleh 13 orang” (Wawancara dengan Sekretaris Pondok Pesantren).

Dibawah ini diberikan tabel yang menjelaskan jenis usaha milik Pesantren

Tabel 4.1 Jenis usaha milik Pesantren

NO	JENIS USAHA	TEMPAT KEGIATAN	PENGELOLA
1.	Koperasi Yayasan	Di dalam pondok	Guru dan Santri
2	Peternakan Sapi	Diluar Pondok	Wali Murid
3	Peternakan itik	Didalam pondok	Santri
4	Usaha Pertanian	Diluar Pondok	Wali Murid
5	Usaha pengiriman kelapa	Didalam pondok	Guru dan Wali Santri

Sumber: Data hasil survey.

Dari tabel diatas dapat dipahami bahwa Pondok Pesantren Nurul Bayan memiliki beberapa kegiatan usaha diantaranya koperasi, usaha peternakan, usaha pertanian dan pengiriman kelapa.

Dalam pelaksanaan pendekatan eksternal, kendala yang dihadapi Pondok Pesantren adalah lemahnya standar ekonomi sebagian santri disebabkan oleh rendahnya ekonomi orang tua mereka. Oleh sebab itu menurut pimpinan pondok pesantren:

Bagi siswa yang sudah belajar di pesantren dan tidak memiliki kemampuan finansial, pesantren memberikan keringanan bagi para siswa dalam pembayaran iuran pondok. Mereka diberikan keringanan dengan membayar setengah dari nilai yang sudah ditentukan (yaitu sejumlah Rp 60.000, perbulan). Mereka yang tergolong sangat tidak mampu dibebaskan dari pembayaran iuran. Dan untuk mengetahui para siswa yang dianggap kuarang mampu yaitu dengan melihat tunggakan mereka dan setelah itu mengundang orang tua mereka untuk datang ke pondok, dan apabila ternyata orang tua mereka betul-betul tidak mampu maka anak tersebut berhak mendapat bantuan atau keringanan dengan persetujuan pimpinan pesantren. Selain bantuan langsung, pesantren juga menyalurkan bantuan

pemerintah berupa BSM (Bantuan Sosial Miskin) kepada siswa yang kurang mampu (wawancara dengan PP Pesantren Nurul Bayan).

Dengan demikian kendala yang dihadapi pesantren dalam pelaksanaan PBM adalah rendahnya kemampuan ekonomi sebagian santri disebabkan oleh rendahnya tingkat ekonomi para wali santri. Untuk itu langkah yang ditempuh pihak pesantren adalah :

- a) Meringankan beban santri dengan membebaskan biaya pendidikan dan biaya asrama atau membayar setengah dari ketentuan.
  - b) Memberdayakan santri dan wali murid yang tinggal dilingkungan pondok dengan menyelenggarakan koperasi yayasan dan menyiapkan beberapa kegiatan usaha seperti usaha peternakan sapi dan itik, usaha pengiriman kelapa dan kegiatan pertanian.
- 2) Peningkatan kesadaran orangtua dalam membantu anaknya belajar.

Selain bantuan langsung dan pemberdayaan santri dan wali murid, Pondok Pesantren juga mengadakan komunikasi dengan wali-murid dengan mengajak mereka memikirkan upaya perkembangan dan kemajuan putra putri mereka yang ada di Pondok Pesantren agar dapat belajar dengan baik.

Berdasarkan wawancara dengan pimpinan pondok bahwa:

Dalam upaya mengarahkan wali murid agar putra-putri mereka bisa belajar dengan baik, pesantren mengadakan beberapa kegiatan diantaranya; a. Musyawarah Bulanan untuk para wali murid yang dikemas dalam bentuk pengajian yang dilaksanakan setiap bulan. b. Pertemuan rutin yang diadakan 3 kali dalam satu tahun yaitu pada pertemuan awal tahun, pertemuan akhir tahun dan pada pertemuan pembagian raport sekolah. Pada kesempatan ini dimanfaatkan untuk memberikan pengarahan, masukan, motivasi dan evaluasi bagi perkembangan putra putri mereka.

Dengan demikian beberapa kegiatan yang dilakukan Pondok Pesantren dalam meningkatkan kesadaran orangtua dalam membantu anaknya belajar diantaranya:

- a) Mengadakan musyawarah bulanan wali murid yang dikemas dalam bentuk pengajian.
- b) Mengadakan pertemuan rutin wali murid diadakan 3 kali dalam satu tahun dan memanfaatkan kesempatan ini untuk memberikan pengarahan, masukan, motivasi dan evaluasi bagi perkembangan putra-putri mereka.

**b. Pendekatan internal.**

Sedangkan terkait dengan proses pelaksanaan pendidikan secara internal, Pondok Pesantren Nurul Bayan telah melaksanakan beberapa pendekatan diantaranya: Peningkatan kesadaran anak akan daya tarik bidang studi tertentu, pengurangan ketimpangan sebaran guru, sistem insentif, dan mutasi guru, peningkatan kualitas guru dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.

Untuk Pendekatan internal yang dilakukan Pondok Pesantren Nurul Bayan, dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Peningkatan kesadaran anak akan daya tarik bidang studi tertentu.

Terkait dengan peningkatan kesadaran anak akan daya tarik bidang studi tertentu. Pihak pesantren telah membuat program Kompil (Kompetensi Pilihan) dengan mengikuti bidang studi yang di siapkan seperti program eksak, bahasa, seni kaligrafi dan hafalan alqur'an.

Hal ini dapat dilihat dari wawancara dengan pimpinan PP Nurul Bayan bahwa: Untuk memberikan kesadaran kepada para santri agar tertarik dalam bidang studi tertentu, pesantren telah membuat program Kompil (Kompetensi Pilihan) dengan memanfaatkan jam siang dimulai dari jam 2.00 s/d jam 3.30. Dalam Kompil ini diberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk memilih satu diantara beberapa bidang studi yang

disiapkan seperti program eksak, bahasa, seni kaligrafi dan hafalan alqur'an.

2) Pengurangan ketimpangan sebaran guru, sistem insentif, dan mutasi guru.

Agar program pendidikan dan pengajaran dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang ditentukan, pihak pesantren telah mendokumentasikan sumberdaya pendidikan baik yang berkaitan dengan sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Selain itu pihak pesantren juga telah menetapkan kebutuhan sumberdaya pendidikan sesuai dengan identifikasi dan rumusan kebutuhan pendidikan. Menurut Pimpinan Pondok Pesantren:

“Walaupun sumber daya yang tersedia masih jauh dari harapan, namun pesantren berusaha memanfaatkan sumber daya yang ada secara maksimal, khusus yang berkaitan dengan laboratorium bahasa selain LAB yang ada, pesantren juga telah mengoptimalkan pemanfaatan LAB alami yang ada”. (Wawancara dengan pimpinan PP Nurul Bayan).

Mengenai kesejahteraan para guru, pesantren memberikan *ihsaniyah* atau insentif yang disesuaikan dengan kualitas pengabdian. Hal ini dapat dari wawancara dengan pimpinan PP Nurul Bayan bahwa:

“Para guru diberikan insentif (*ihsaniyah*). Pemberian *ihsaniyah* di sesuaikan dengan pengabdian dan bukan berdasarkan jumlah jam mengajar. Pengabdian yang dimaksud disini adalah lama pengabdiannya dipesantren dan tingkat keilmuannya. Dalam menentukan jumlah *ihsaniyah* yang diberikan ditentukan oleh pimpinan pesantren”. (Wawancara dengan PP pesantren Nurul Bayan).

Pelaksanaan mutasi di Pondok Pesantren Nurul Bayan adalah bukan mutasi guru dari satu sekolah ke sekolah lain, namun mutasi disini adalah

perpindahan atau pertukaran kegiatan dari satu bagian ke bagian lain dan hal ini dimaksudkan sebagai cross-duty bagi para guru dalam rangka memberikan kesempatan dan pengalaman agar bisa bermanfaat setelah mereka terjun ke masyarakat.

Menurut pimpinan Pesantren,

Guru di Pondok Pesantren Nurul Bayan mempunyai tiga peran yaitu peran sebagai pengajar, peran sebagai santri/mahasiswa agar terus belajar sepanjang hayat, dan peran sebagai petugas operasional lembaga dengan menugaskan para guru di beberapa bagian yang ada di pesantren seperti bagian pembangunan, peternakan, tata usaha, pengajaran, pengasuhan dan lain-lain. Hal tersebut dimaksudkan untuk cross-duty bagi para guru agar nantinya dapat dijadikan pelajaran dan pengalaman setelah mereka terjun ke masyarakat. (wawancara dengan pimpinan PP Nurul Bayan).

3) Peningkatan kemampuan guru dalam pendayagunaan alat dan sumber pendidikan.

Dalam mewujudkan tujuan Pondok Pesantren, beberapa upaya telah dilakukan dalam meningkatkan kualitas guru diantaranya dengan mengikuti beberapa pelatihan dan work-shop yang diadakan baik oleh Dikpora atau oleh pesantren sendiri. Selain itu juga pesantren memberikan tugas belajar untuk para guru.

Hal ini dapat dilihat dari wawancara dengan pimpinan PP Nurul Bayan:

“Untuk meningkatkan kemampuan guru dalam penggunaan alat dan sumber daya pendidikan, diadakan work-shop 2 kali dalam satu tahun yang diikuti oleh semua guru. Kegiatan tersebut diadakan oleh pesantren pada setiap awal tahun ajaran dan pada tengah tahun ajaran”.

Adapun hubungan pesantren dengan Dikpora cukup baik hal ini dapat dilihat dari diikutkannya Pondok Pesantren dalam beberapa pelatihan, sosialisasi pendidikan dan sosialisasi Ujian Nasional,

Kendala yang dihadapi pesantren terkait tenaga pengajar atau guru adalah kurangnya tenaga guru yang professional khususnya guru-guru bahasa Arab dan ilmu ilmu agama. Menurut pimpinan PP Nurul Bayan:

Masalah serius yang dihadapi pesantren adalah kurangnya tenaga guru yang professional khususnya guru-guru bahasa Arab dan ilmu ilmu agama, karena pengajaran agama dipesantren ini menggunakan bahasa Arab, Adapun untuk guru guru pada bidang studi umum tidak ada kendala karena pihak pesantren telah memanfaatkan guru- guru dari luar pondok yang memiliki kualifikasi sesuai dengan jenjang. Oleh sebab itu untuk mengantisipasi kekurangan tenaga guru yang professional telah dibuka program ma'had Ali bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Nurul Hakim dengan membuka fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Selain itu langkah yang diambil pesantren adalah dengan mengirim para kader dari lulusan pesantren/para guru untuk melanjutkan studi di beberapa perguruan tinggi di beberapa Pondok pesantren di Jawa seperti di ISID Gontor dan IDIA di Madura untuk menempuh program S 1 dan S 2 . (wawancara dengan pimpinan PP Nurul Bayan).

#### 4) Peningkatan sarana/prasarana pendidikan.

Peningkatan sarana dan prasaran di pesantren merupakan program jangka panjang pesantren yang dilakukan pesantren secara berkesinambungan.

Menurut pimpinan Pesantren:

Setiap tahun dana yang dikeluarkan tidak kurang dari 200 juta. Sedangkan sumber dananya berasal dari dana pemerintah seperti dana stimulan, block grand, dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), bantuan Dunia Islam (Haiatul Igosah Al-Islamiyah) dan selain itu diperoleh juga dari para anshor pondok dan para muhsinin yang diperoleh dari para wali murid, keluarga besar haji baik dalam bentuk zakat, infaq dan sadaqoh. Dan untuk dana donatur ini dana yang diterima pesantren tidak kurang dari 100 juta untuk setiap tahunnya. Adapun bentuk bantuan yang diterima pesantren selain dalam bentuk uang, juga diterima dalam bentuk material seperti pasir, batu bata, bata merah dan semen. (wawancara dengan Pimpinan PP Nurul Bayan).

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pendidikan Berbasis Masyarakat yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Nurul Bayan:

- a) Sudah dapat berjalan baik dengan menggunakan beberapa pendekatan baik pendekatan internal maupun pendekatan eksternal. Dan dari pendekatan yang

digunakan dapat dipahami bahwa masyarakat pesantren merupakan stakeholder utama dari pelaksanaan pendidikan berbasis masyarakat di Pondok Pesantren tersebut sehingga mereka bukan saja sebagai penonton tapi telah berperan sebagai pemain utama.

- b) Pelaksanaan pendidikan berbasis masyarakat di Pondok Pesantren Nurul Bayan telah sesuai dengan amanat UU nomor 2 tahun 1989 dan GBHN 1993 dimana UU tersebut mengamanatkan perlunya peran serta masyarakat, keluarga dan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan.
- c) Pelaksanaan pendidikan berbasis masyarakat di Pondok Pesantren Nurul Bayan telah sesuai dengan PP No. 17 Tahun 2010, dimana pendidikan tersebut dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan yaitu pondok pesantren sehingga Pondok Pesantren tersebut telah berperan sebagai sumber pelaksanaan dan pengguna hasil pendidikan. Sedangkan dalam penyelenggaraannya, telah mengembangkan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standard nasional pendidikan. Adapun dana penyelenggaraannya bersumber dari masyarakat dan pemerintah.

## 2. Elemen-Element Implementasi Pendidikan Berbasis masyarakat

Pengertian implementasi sebagaimana yang diberikan oleh Van Meter dan Van Horn merupakan suatu tindakan yang dilakukan baik oleh individu, pejabat, maupun kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya suatu tujuan tertentu karena tahap implementasi merupakan tahap yang sangat penting dan memerlukan kerjasama semua pihak demi terlaksananya suatu kebijakan. Sebelum dilaksanakannya suatu

program diperlukan beberapa persiapan menyangkut komunikasi program, penyediaan SDM yang terlibat didalamnya, sarana dan prasarana, disposisi, dan structure birokrasi.

Pondok Pesantren Nurul Bayan sejak awal berdirinya telah menjalankan pendidikan berbasis masyarakat, hal ini terlihat dari beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan baik yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan atau kegiatan non pendidikan.

Dibawah ini akan dijelaskan beberapa elemen yang merupakan faktor pendorong implementasi pendidikan berbasis masyarakat di PP Nurul Bayan, akan dijelaskan hal hal sebagai berikut:

a. Komunikasi

Komunikasi suatu kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila para pelaksana kebijakan sudah memahami dengan baik kebijakan tersebut baik yang berkaitan dengan proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan. Kejelasan Informasi mengenai sasaran dan tujuan, berarti pihak yang merumuskan kebijakan dalam hal ini pimpinan Pondok Pesantren, direktur TMI, kepala Tsanawiyah dan kepala Aliyah perlu memberikan penjelasan dan pemahaman tentang sasaran dan tujuan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan kepada para pelaksana kebijakan dalam hal ini para guru.

Dari hasil pengamatan dilapangan terlihat bahwa sebahagian besar guru belum memahami kebijakan Pendidikan Berbasis Masyarakat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Pimpinan PP bahwa:

“Kebijakan pemerintah tentang Pendidikan Berbasis Masyarakat belum dipahami secara teori oleh sebahagian besar ustadz di Pondok Pesantren ini, namun secara praktis sudah dapat dijalankan dengan baik”. Sedangkan menurut Direktur TMI: “Kebijakan Pendidikan Berbasis Masyarakat Belum dipahami oleh semua ustadz namun secara garis besar mereka sudah menjalankan. Adapun menurut Kep Tsanawiyah: “Belum semua ustadz memahami Kebijakan pemerintah tentang Pendidikan Berbasis Masyarakat namun secara garis besar mereka sudah menjalankan”. Dari beberapa pernyataan diatas dipahami bahwa dilihat secara teori belum semua guru memahami kebijakan PBM, walaupun secara prktis mereka sudah melaksanakannya.

Oleh sebab itu langkah yang diambil pesantren adalah meberikan pemahaman kepada para guru dengan mengadakan work-shop dua kali dalam satu tahun pada setiap awal tahun ajaran dan pada awal memasuki semester genap. Selain itu Pondok Pesantren juga mengadakan pertemuan rutin guru-guru yang diadakan setiap hari kamis siang untuk membicarakan bebrapa hal yang berkaitan dengan program dan upaya-upaya pengembangan pendidikan dan pengajaran di Pondok Pesantren. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan dengan Pimpinan Pondok bahwa, “Langkah yang diambil pesantren dengan mengadakan work-shop sebanyak dua kali dalam setahun yaitu pada awal tahun dan pada pertengahan tahun”., Sedangkan menurut Kepala Tsanawiyah , bahwa “Langkah yang diambil pesantren dengan mengadakan work-shop pada awal tahun dan pada

pertengahan tahun, selain itu kesempatan kamisan digunakan untuk menyampaikan beberapa agenda termasuk program pendidikan”.

Adapun yang berkaitan dengan hubungan Pondok pesantren dengan Dikpora sudah berjalan dengan baik sebagaimana yang disampaikan kepala MTs Nurul Bayan bahwa “Hubungan antara Pesantren, dengan Dikpora cukup harmonis terbukti dengan diikutkannya Pesantren dalam beberapa pelatihan dan sosialisasi Ujian Nasional”. Disisi lain menurut Peneliti beberapa jenis bantuan yang diberikan Dikpora seperti bantuan Labortorium bahasa, ruang belajar dan pemberian kesempatan dalam beberapa kegiatan, menunjukkan ujud hubungan baik pesantren dengan Dikpora.

Dengan demikian langkah yang diambil pesantren dalam meningkatkan pemahaman para guru tentang kebijakan PBM adalah dengan mengadakan work-shop dua kali dalam satu tahun dan mengadakan pertemuan rutin guru-guru yang diadakan setiap hari kamis siang untuk membicarakan bebrapa hal yang berkaitan dengan program dan upaya-upaya pengembangan pendidikan dan pengajaran di Pondok Pesantren. Adapun agenda kamisan:

Untuk Pertemuan Kamisan biasanya membahas beberapa hal diantaranya: Laporan pengontrolan kelas, Evaluasi program pendidikan dan pengajaran, *Naqdul Mudarrisin* (Supervisi pelaksanaan pengajaran) bagi guru-guru baru, dan Penyampaian informasi tentang program-program pendidikan. Untuk memberikan pemahaman kepada para ustadz di pondok pesantren ini, diadakan work-shop 2 kali dalam satu tahun. (Wawancara dengan Direktur TMI)

Agar komunikasi program dapat berjalan dengan baik, Pondok Pesantren Nurul Bayan telah merancang dan menetapkan jadwal kegiatan yang mencakup kegiatan harian, mingguan dan tahunan/ tengah tahunan yang

menyangkut seluruh kegiatan santri baik yang menyangkut pendidikan formal di sekolah, kegiatan intra kurikuler, dan kegiatan ekstra kurikuler.

Hal tersebut dapat dilihat pada beberapa tabel dibawah ini:

Tabel 4.2. Jadwal kegiatan Harian di Pondok Pesantren Nurul Bayan

No	Waktu	Kegiatan
1	04.00-06.00	1. bangun tidur/ shalat malam 2. Shalat subuh berjamaah 3. Halaqah Qur'aniyah 4. Penambahan kosa kata dalam bahasa arab dan
2	06.00-07.30	Olahraga, mandi, mencuci dan persiapan masuk kelas.
3	07.30-12.40	Kegiatan Pendidikan formal di sekolah (pagi)
4	12.40-14.30	Sholat Dzuhur berjamaah, makan siang dan istirahat
5	14.30-15.15	Kegiatan Pendidikan formal di sekolah (sore)
6	15.15-16.00	Sholat Ashar berjamaah.
7	16.00-17.30	Kegiatan pengembangan bakat santri dalam bentuk olahraga, kesenian dan keterampilan dan mandi.
8	17.30-18.30	Halaqah diniyah
9	18.30-19.00	Sholat maghrib berjamaah
10	19.00-19.30	Membaca al-qur'an secara kolektive
11	19.30-20.15	Sholat isya berjamaah
12	20.15-22.00	Makan malam belajar mandiri
	22.00-04.00	Tidur / istirahat

Sumber: Dokumentasi Pondok Pesantren Nurul Bayan dikutip pada tanggal 9 Nopember 2011.

Tabel 4.3. Jadwal Mingguan Santri di Pondok Pesantren Nurul Bayan

No	Hari	Kegiatan
1	Kamis siang	Latihan berpidato dalam bahasa Arab dan Inggris.
2	Kamis sore	Kegiatan kepramukaan
3	Kamis malam	Latihan berpidato bahasa Indonesia, Arab dan Inggris.
4	Jumat pagi	percakapan bahasa Arab dan Inggris, lari pagi dan pembersihan umum sekitar asrama.

Dokumentasi Pondok Pesantren Nurul Bayan bagian pendidikan dan pengasuhan Asrama, dikutip pada tanggal 9 Nopember 2011.

Tabel 4.4 Jadwal Bulanan di Pondok Pesantren Nurul Bayan

No	Waktu	Kegiatan
1	Setiap akhir bulan	Lomba pidato antar lurah di asrama
2	Setiap akhir ujian/ Tengah semester	lomba Pengetahuan agama
3	Setiap akhir semester	Kegiatan lomba keagamaan, olah raga dan pramuka

Sumber: Dokumentasi Pondok Pesantren Nurul Bayan dikutip pada tanggal 9 Nopember 2011.

Dengan demikian, dalam mendukung pelaksanaan proses komunikasi, Pondok Pesantren Nurul Bayan telah menetapkan jadwal kegiatan yang mencakup kegiatan harian, mingguan dan tahunan/ tengah tahunan yang menyangkut seluruh kegiatan santri baik pada pendidikan formal di sekolah, kegiatan intra kurikuler, dan kegiatan ekstra kurikuler.

Penetapan jadwal tersebut dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan pendidikan karena keberadaan guru dan murid dalam sistim asrama akan memungkinkan terjadinya komunikasi demi terlaksananya proses pendidikan dan pembelajaran sepanjang hayat.

b. Sumber daya

Di Pondok Pesantren Nurul Bayan terdapat beberapa lembaga seperti lembaga pendidikan, lembaga pengasuhan santri, lembaga dakwah dan Lembaga social. Agar semua kegiatan yang telah diprogramkan dapat berjalan dengan baik maka pada disetiap lembaga diperlukan sumber daya sehingga kebijakan tersebut dapat dijalankan dengan baik, konsisten, dan dengan transmisi yang tepat.

Sumber-sumber daya yang dimaksud adalah tersedianya para pengurus organisai dan para guru disamping itu yang tidak boleh dilupakan adalah tersedianya fasilitas sarana dan Prasarana. Adapun jenis lembaga yang ada di

pondok pesantren Nurul Bayan dan para penanggung jawabnya dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 4.5 Jenis lembaga di Pondok Pesantren Nurul Bayan

No	JENIS LEMBAGA	NAMA LEMBAGA	Penanggung jawab
1.	Lembaga Pendidikan	TK Sangkuriang	Hj. Halimatussa'diyah
		MTS Nurul Bayan	Baharuddin A Ma
		MA Nurul Bayan	Abdul Malik Sos
		TMI	L.Nurul Bayanil Huda, Mphil.
		Ma'had A'ly	K.H. Drs. Turaihan Azhuri
2.	Lembaga Pengasuhan santri	Lembaga Pengasuhan santri	Ust. Satriadi
			Ust. Muniri Abbas
3.	Lembaga Da'wah	Majelis Ta'lim	
4.	Bimbingan Haji	KBIH Azzanzam	K.H. Abdul Karim
			K.H. Abdul Karim
	Lembaga social	Lembaga social:	Dewan Guru

Sumber: Data hasil survey.

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa selain lembaga pendidikan, Pondok Pesantren Nurul Bayan juga memiliki lembaga pengasuhan, Lembaga Da'wah dan lembaga sosial yang mana setiap lembaga tersebut perlu ditangani oleh tenaga-tenaga yang berpengalaman. Lembaga-lembaga selain lembaga pendidikan sebagaimana tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan demi terwujudnya kualitas dan tujuan pendidikan yang diharapkan. Sumber daya yang dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1) Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang dimaksud disini adalah tersedianya tenaga pengurus organisasi dan tenaga pengajar. Untuk tenaga pengurus pondok pesantren Nurul Bayan terdiri dari 1 orang Pimpinan Pondok, 3 orang

sekretaris, 1 orang tata usaha. Dan untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan di Pondok Pesantren ini, dibentuklah bagian bagian sebagaimana disebutkan dibawah ini:

Bagian Pengajaran, MPO Putra dan MPO Putri (Organisasi siswa), Bagian Pramuka, P3SP, bagian Koperasi, IKMAL, Bagian dapur, Bagian kesehatan, Bagian Konveksi, Bagian tata boga, Bagian Kerajinan Tangan, Bagian Pelayanan Masyarakat, dan Bagian Publikasi & Media. Hal ini dapat dilihat pada daftar lampiran formasi pengurus Pondok Pesantren Nurul Bayan (Lampiran 4).

Adapun yang berkaitan dengan guru, pondok pesantren Nurul Bayan telah memiliki 41 guru yang terdiri dari tenaga S 2 sebanyak 2 orang, tenaga S 1 sebanyak 11 orang, tenaga D 3 sebanyak 1 orang dan sisanya terdiri dari para hafiz Alqur'an, para A'lim dalam bidang hadist dan fikih dan tamatan SLTA.

Adapun hasil wawancara dengan Pimpinan Pondok bahwa: "Tenaga pengajar (ustadz) masih belum memadai baik secara kualitas maupun kuantitas sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah, lebih lebih pada mata pelajaran agama". Demikian pula dengan pernyataan Direktur TMI bahwa "Tenaga pengajar (ustadz) cukup memadai, walaupun secara formal masih banyak guru yang belum sesuai dengan ketentuan pemerintah". Sedangkan menurut Kepala Tsanawiyah, "Secara kuantitas tenaga pengajar (ustadz) cukup memadai, namun secara kualitas belum karena masih banyak guru yang masih berijazah SLTA dan belum sesuai dengan ketentuan pemerintah".

Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara diketahui bahwa kualifikasi tenaga pengajar di Pondok Pesantren belum memadai secara

kualitas walaupun secara kuantitas sudah mencukupi, karena diantara guru masih banyak yang belum memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dengan ketentuan pemerintah yaitu jenjang S 1.

#### 1) Sarana Prasarana.

Keadaan sarana dan prasarana pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Bayan sudah cukup memadai walaupun disana sini masih ada kekurangan dan perlu penyempurnaan. Oleh sebab itu dalam upaya melengkapi kekurangan tersebut, Pimpinan Pondok telah melaksanakan program pembangunan secara berkelanjutan dengan menugaskan bagian pembangunan.

Berdasarkan pengamatan di lapangan dan hasil wawancara bahwa luas tanah yang dimiliki Pondok pesantren Nurul Bayan seluas 6,5 hektare dan di atasnya berdiri beberapa bangunan yang terdiri dari ruang kelas, ruang perpustakaan, laboratorium, ruang pimpinan (ruang kepala sekolah), ruang guru, tempat beribadah (Masjid), Ruang OSIS, jamban (toilet/kamar mandi), gudang, tempat bermain dan olahraga, dan ruang Keterampilan.

Selain beberapa prasarana sebagaimana tersebut diatas, untuk mencukupi kebutuhan dan hajat para santri dan santriwati, telah dilengkapi dengan beberapa gedung dan bangunan seperti Asrama Guru, asrama santri dan santriwati, Ruang dapur, ruang makan, Lapangan sepak bola, Lapangan volley dan lapangan basket. Untuk lebih jelasnya untuk Fasilitas yang dimiliki Pondok pesantren Nurul dapat dilihat pada Tabel 4.6. (terdapat pada daftar lampiran).

Sedangkan hasil wawancara dengan pimpinan pondok bahwa, “Sarana dan prasarana pendidikan sudah cukup memadai walaupun disana sini masih ada

kekurangan dan perlu penyempurnaan”. Sedangkan menurut direktur TMI bahwa, “Sarana dan prasarana pendidikan dipesantren ini sudah lebih dari cukup walaupun disana sini masih perlu disempurnakan”. Adapun menurut kepala Tsanawiyah, bahwa “Sarana dan prasarana pendidikan dipesantren ini sudah cukup memadai walaupun masih ada beberapa kekurangan seperti ruang kelas yang belum permanen”.

Dengan demikian sarana dan prasarana pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Bayan sudah cukup memadai walaupun disana sini masih ada kekurangan seperti ruang kelas dan perlu penyempurnaan.

## 2) Sumber Dana.

Dalam melaksanakan kebijakan Pendidikan Berbasis masyarakat di Pondok Pesantren ini, selain tersedianya SDM yang memadai dan kelengkapan sarana dan prasarana, tidak terlepas juga dari faktor finansial, untuk kepentingan tersebut Pondok Pesantren telah memberlakukan iuran sekolah yang dibayarkan setiap bulan dan uang pembangunan.

Selain itu Pondok Pesantren ini telah menghimpun dana dari beberapa sumber baik dari pemerintah maupun masyarakat. Menurut pimpinan Pondok: “setiap tahun dana yang dikeluarkan tidak kurang dari 200 juta. Sedangkan sumber dananya berasal dari berbagai pihak baik pemerintah maupun pihak swasta atau masyarakat. Dana pemerintah berupa dana stimulan, block grand, dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), dan juga dana bantuan Dunia Islam. (wawancara dengan Pimpinan PP Nurul Bayan).

Selain dari sumber tersebut, dana bantuan juga diperoleh dari dana donatur yang diberikan oleh para *anshor pondok* dan para *muhsinin* yang diperoleh dari para wali murid, para keluarga besar haji baik dalam bentuk infaq, sadaqoh dan zakat. Dan untuk dana donatur ini tidak kurang dari 100 juta untuk setiap tahunnya. Adapun bentuk bantuan yang diterima pesantren selain dalam bentuk

uang, juga diterima dalam bentuk material seperti pasir, batu bata, bata merah dan semen (wawancara dengan pimpinan Pondok).

Dari beberapa uraian diatas dapat dipahami bahwa Sumber daya yang dimiliki Pondok Pesantren diantaranya sumberdaya manusia berupa pengurus organisasi, para guru, Kelengkapan sarana dan prasarana dan sumber dana.

c. Disposisi.

Disposisi atau sikap implementor merupakan elemen penting yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan. Oleh sebab itu dalam melaksanakan suatu kebijakan, hendaknya para pelaksana kebijakan bersepakat untuk melaksanakan kebijakan tersebut, karena kalau tidak maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Oleh sebab itu berkaitan dengan pelaksanaan Pendidikan Berbasis Masyarakat di Pondok Pesantren Nurul Bayan, para kepala sekolah dan guru telah berusaha menjalankan kebijakan tersebut dengan penuh tanggung jawab.

Untuk Kepentingan tersebut, pimpinan pondok dan kepala sekolah telah menjalin kerjasama yang baik dengan para pengurus dan para guru dengan menggunakan pendekatan kemanusiaan dan pendekatan program, bukan dengan deligasi atau perintah. Hal ini terlihat dari apa yang disampaikan Pimpinan Pondok bahwa: “Hubungan antara pimpinan Pesantren, Kepala sekolah dan para pengajar cukup baik karena pendekatan yang digunakan oleh para pimpinan baik pimpinan Pesantren maupun kepala sekolah adalah pendekatan kemanusiaan dan pendekatan program, bukan merupakan deligasi atau perintah”. (wawancara dengan pimpinan Pondok).

Untuk mewujudkan itu semua para pelaksana kebijakan dalam hal ini pimpinan pondok dan para guru telah berusaha menjalankannya dengan serius dan penuh tanggung jawab.

“komitmen pihak pesantren untuk menjalankan Standar Nasional Pendidikan pada Pendidikan Berbasis Masyarakat cukup serius karena beberapa Standar Nasional Pendidikan yang ditetapkan pemerintah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan kurikulum pesantren”. (wawancara dengan Direktur TMI).

Dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi tersebut tidak terlepas dari kesungguhan dan ketulusan para pelaksana kebijakan dalam hal ini para guru, disamping dukungan para pimpinan pondok dan kepala MTs dan Aliyah. Wujud dari dukungan pimpinan tersebut terlihat dari pandangan pimpinan yang mengatakan bahwa program kebijakan PBM tersebut merupakan bagian yang tidak dipisahkan dengan nilai-nilai dan kultur pondok. Untuk kepentingan tersebut, pimpinan pesantren telah menugaskan pelaksana kebijakan sesuai dengan kualifikasi dan keahliannya, selain itu tersedianya dana guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka dapat mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan program tersebut.

#### d. Struktur Birokrasi.

Struktur Birokrasi merupakan penjelasan tugas dari para pelaksana kebijakan, dengan menetapkan Standar operasional prosudur. Terdapat 2 indikator penting dalam Struktur Birokrasi yaitu Standar operasional prosudur (SOP) dan Fragmentasi organisasi. SOP (Standar operasional prosudur)

merupakan tatanan prosedur kerja birokrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yang secara internal birokrasi dapat mengatur sumber-sumber yang dimilikinya, baik berkaitan dengan sumber daya manusia, waktu, sarana dan prasarana. Sedangkan Fragmentasi organisasi merupakan kemampuan birokrasi dalam menghadapi faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi birokrasi,

Berdasarkan pengamatan dilapangan dan wawancara, di Pondok Pesantren Nurul Bayan belum tersedia Sop, namun sudah ada pembagian tugas pada masing masing bagian, sehingga dengan demikian masing-masing bagian dapat melaksanakan tugas dengan baik.

Hasil wawancara dengan Pimpinan Pondok Direktur TMI dan Kepala Tsanawiyah menunjukkan bahwa "Di pondok pesantren ini belum tersedia SOP, namun telah ada pembagian tugas pada masing-masing bagian,, bentuk pembagian tugas tersebut dimana masing-masing bagian melaksanakan tugas sesuai dengan bagian masing-masing. Dan untuk pembagian tugas masing-masing bagian dapat dilihat pada lampiran formasi pengurus Pondok Pesantren Nurul Bayan. (Untuk formasi pengurus Pondok Pesantren Nurul Bayan terdapat pada daftar lampiran).

Sedangkan yang berkaitan dengan pola hubungan antar bagian dalam organisasi sudah ada hubungan yang jelas baik secara vertical atau horizontal sehingga terhindar dari saling mengandalkan dan lempar tanggungjawab hal ini dapat dilihat dari gambar struktur Organisasi Pondok Pesantren Nurul Bayan. (dapat dilihat pada daftar gambar).

Agar pendidikan berbasis Masyarakat dapat berjalan baik di pesantren ini menurut Pimpinan Pondok Pesantren, diperlikukan perhatian dan kebijakan

khusus dari pemerintah tentang beberapa hal yang berkaitan dengan standar nasional pendidikan untuk dilaksanakan di Pondok Pesantren. Menurut Pimpinan Pondok, “Agar pendidikan berbasis Masyarakat dapat berjalan baik di pesantren ini, Selain usaha-usaha yang dilakukan pesantren, pemerintah perlu memberikan kebijakan tersendiri kepada pesantren khususnya yang berkaitan dengan standar nasional pendidikan”. (Wawancara dengan Pimpinan Pondok).

Adapun wawancara dengan Direktur TMI dan Kepala Tsanawiyah menunjukkan bahwa, “Bentuk perhatian yang perlu diberikan Pemerintah kepada Pondok adalah dengan memberikan bantuan berupa tenaga guru dan kelengkapan sarana dan prasarana”. Dari struktur Birokrasi tersebut, terlihat adanya pola hubungan antar bagian dalam organisasi dan kejelasan tugas dan tanggung jawab masing masing bagian.

Selain itu struktur tersebut mencerminkan adanya sistim dan pola manajerial dalam tata pengelolalaannya dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang teratur sehingga masing-masing bagian dapat menjalankan kegiatannya sesuai dengan tugas yang diamanatkan oleh pimpinan pondok.

Berdasarkan penjelasan diatas, beberapa indikator dari elemen implementasi sudah dapat dijalankan, walaupun masih ada beberapa indikator implementasi yang belum terpenuhi seperti indikator kejelasan pada elemen komunikasi, SDM yang belum memenuhi standar kualifikasi, dan kekurangan ruang belajar pada elemen sumber daya. Termasuk belum tersedianya SOP pada elemen struktur birokrasi. Namun dapat dijelaskan disini bahwa ke empat faktor implementasi tersebut tetap memberikan pengaruh terhadap

keberhasilan implementasi Pendidikan Berbasis masyarakat di Pondok Pesantren Nurul Bayan.

#### D. Keadaan Kurikulum, Tenaga Pendidik, Sarana dan Prasarana

Peningkatan kualitas pendidikan tidak terlepas dari upaya upaya yang dilakukan sekolah dalam memenuhi hajat anak didiknya. Untuk kepentingan tersebut, sekolah seharusnya mengimbangi usahanya dengan penyediaan sarana fisik dan non fisik pendidikan. Sarana fisik yang dimaksud bisa berupa bangunan sekolah dengan menyiapkan berbagai fasilitas yang memadai untuk menunjang proses belajar mengajar. Sedangkan sarana non-fisik adalah tenaga pendidik yang memadai dan profesional. Selain sarana fisik dan non fisik, yang tidak kalah pentingnya adalah kurikulum pendidikan yang merupakan acuan bagi suatu lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

##### 1. Keadaan kurikulum.

Pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Bayan bertujuan untuk melahirkan kader *Munzirulqoum* dan *Ummahat Solihat* yang mampu terjun di berbagai lapangan kehidupan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut Pondok pesantren Nurul Bayan telah membentuk Lembaga pendidikan formal yang diberi nama TMI (*Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiyah*) yang merupakan perpaduan antara kurikulum pondok Modern Gontor dengan kurikulum pendidikan nasional.

Oleh sebab itu pihak pesantren telah mengemas pendidikan Pesantren dalam dua program yaitu program 4 tahun dan program 6 tahun. Program tersebut merupakan Program regular untuk tamatan SD/MI dengan masa studi 6 tahun (untuk jenjang Tsanawiyah dan Aliyah), dikemas dalam 1 paket. Dan Program

intensif untuk tamatan SMP/MTS dengan masa studi 4 tahun untuk jenjang Aliyah (Wawancara dengan Pimpinan Pondok).

Adapun komponen mata pelajaran yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Nurul Bayan terdiri dari Mata Pelajaran Agama dan kepesantrenan, dan mata pelajaran umum. Mata Pelajaran Agama dan kepesantrenan terdiri dari Alqur'an Tajwid, Hadits, Tauhid, SKI, Fikih, Faroid, Insya', Mutallah, Bahasa Arab, Nahwu, Tarbiyah Ilmiah, Mahfuzot, Imla', Sorof, Khot Arobi dan kepesantrenan. Sedangkan mata pelajaran umum terdiri dari Bahasa Inggris English Grammar Composition English Wise word, Matematika, Fisika, Biologi, Sejarah Indonesia, PPKN, Antropologi dan Bahasa Indonesia. Dibawah ini dapat dilihat Struktur kurikulum TMI (Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiah):

UNIVERSITAS TERBUKA

Tabel 4.8 : Struktur kurikulum  
Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiyah PP Nurul Bayan

NO	Mata pelajaran	Kelas/alokasi waktu					
		I	II	III	IV	V	VI
A.	Mata pelajaran kepesantrenan						
	1. Alqur'an- Tajwid	1	1	-	-	-	-
	2. Hadits	2	1	1	2	2	-
	3. Tauhid	2	1	1	-	-	-
	4. Fikih	2	2	2	2	2	-
	5. SKI	2	2	-	-	-	2
	6. Mutallah	-	2	2	2	2	2
	7. Arabiyah	6	2	2	2	2	2
	8. Nahwu	-	2	2	2	3	3
	9. Sorof	-	2	1	2	2	-
	10. Balagoh	-	-	-	-	2	2
	11. Muhadasah	-	-	-	-	2	2
	12. Mahfuzot	1	1	1	-	-	-
	13. Imla'						
	14. Khot Arobi	1	1	1	-	-	-
	15. Teori Mengajar	-	-	-	-	-	2
16. Kepesantrenan				2	2	2	
B.	Mata Pelajaran Umum						
	17. Bahasa Inggris	6	4	2	2	3	3
	18. English Wise word	1	1	1	-	-	-
	19. English Grammar			2	2	2	2
	20. Composition	-	-	-	-	2	2
	21. Matematika	4	3	3	3	3	3
	22. Fisika	2	2	2	-	-	-
	23. Biologi	2	2	2	-	-	-
	24. Sejarah Indonesia	-	-	2	2	3	2
	25. PPKN	-	-	-	2	-	2
	26. Antropologi	-	-	-	-	-	2
27. Bahasa Indonesia	2	2	2	2	2	2	
Jumlah		34	34	34	34	34	34

Sumber: Kantor TMI Pondok pesantren Nurul Bayan dikutip pada tanggal 20 Desember 2011.

Dari 27 jumlah mata pelajaran yang diajarkan di Pondok pesantren Nurul Bayan, 16 mata pelajaran merupakan mata pelajaran kepesantrenan dan 11 mata pelajaran merupakan mata pelajaran umum Sehingga apabila di prosentasekan Forsi mata pelajaran pesantren lebih besar dari Forsi mata

pelajaran umum, dimana 39 % merupakan krikulum nasional dan.61 % merupakan krikulum pesantren. Untuk Komponen Mata Pelajaran di TMI Pondok Pesantren Nurul Bayan, dapat dilihat pada Tabel 4.8 yang termuat dalam daftar lampiran.

Selain melaksanakan kurikulum sebagaimana tersebut diatas, TMI Pondok Pessantren Nurul Bayan juga memberlakukan Kompetensi Pilihan bagi para santrinya, dan hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

Tabel 4.9 Struktur Kompetensi Pilihan di TMI Pondok Pesantren Nurrul Bayan

NO	KOMPETENSI PILIHAN	KELAS/ ALOKASI WAKTU					
		I	II	III	IV	V	VI
1	Hafalan Alqur'an	2	2	2	2	2	2
2	Bahasa Arab	2	2	2	2	2	2
3	Bahasa Inggris	2	2	2	2	2	2
4	Matematika	2	2	2	4	4	4
5	Seni Kaligrafi dan Leter	2	2	2	-	-	-
Jumlah		10	10	10	10	10	10

Sumber: Kantor TMI Pondok pesantren Nurul Bayan dikutip pada tanggal 10 Desember.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kurikulum yang dilaksanakan di Pondok pesantren Nurul Bayan terdiri dari komponen agama dan komponen umum yang berisikan: a) pendidikan agama, b) pendidikan kewarganegaraan, c) bahasa d) matematika e) ilmu pengetahuan alam f) ilmu pengetahuan social g) seni dan budaya i) keterampilan/kejuruan, dan j) muatan lokal. Sedangkan untuk pendidikan jasmani dan olahraga tidak dimasukkan dalam program intrakurikuler, namun diprogramkan pada kegiatan ekstrakurikuler dalam bentuk praktek.

Agar kurikulum dan kegiatan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan, Pondok Pessantren Nurul Bayan untuk setiap tahunnya

membuat kalender akademik sebagai acuan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Kalender akademik tersebut disesuaikan dengan keadaan pesantren, dan hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 4.10 Kalender Pendidikan di TMI Pondok Pessantren Nurul Bayan, Tahun Pelajaran 2011 – 2012

SEMESTER	BULAN	TANGGAL	KEGIATAN
II	<b>Juli</b>	1 – 14	Pendaftaran Santri Baru, ujian masuk dan yudisium
		21 – 22	Kedatangan santri baru dan lama
	<b>Agustus</b>	1 – 7	Pekan Perkenalan (KHUTBATUL ‘ARSY)
	<b>September</b>	11 – 30	Nurul Bayan CUP, Lomba Cerdas Cermat
	<b>Oktober</b>		Ujian Mid Semester
	<b>Desember</b>	10 – 31	Ujian Semester 1 (Ujian Pertengahan Tahun)
II	<b>Januari</b>	1 – 10	Libur Pertengahan Tahun
		25 – 30	Lomba pidato 3 bahasa
	<b>Februari</b>	1 – 10	Libur Pertengahan Tahun, PERGARUS
		25 – 30	Lomba Pidato 3 Bahasa, Amalia Tutadris.
	<b>Maret</b>	1 – 22	Ujian Mid Semester II Ujian UAN-UAS,
	<b>April</b>	1 – 10	Ujian Mid Semester II
		20 – 22	Perkemahan Mid Semester II
	<b>Mei</b>	20 – 30	Rihlah Ilmiah Wal Iqtishodiah
	<b>Juni</b>	5 – 25	Ujian Semester II ( Ujian Akhir
		30	Acara Tutup Tahun

Sumber: Kantor TMI Pondok pesantren Nurul Bayan dikutip pada tanggal 20 Desember 2011.

## 2. Keadaan Tenaga Pendidik.

Tenaga pendidik atau Guru merupakan salah satu faktor pendukung terlaksananya proses belajar dan mengajar. Berdasarkan pengamatan dilapangan dan dari hasil studi dokumentasi, dapat disampaikan bahwa kualifikasi akademik guru pada TMI Pondok Pessantren Nurul Bayan belum seluruhnya memenuhi standar Nasional Pendidikan yaitu minimal Diploma

IV atau S-1, karena diantara guru yang ada, masih banyak yang belum memiliki kualifikasi pendidikan yang telah ditetapkan. Dari 41 jumlah guru yang ada terdapat 28 orang guru yang masih berkualifikasi SLTA, 1 guru berkualifikasi D 2 , 10 orang berkualifikasi S 1, dan 2 guru berkualifikasi, dan S 2. (Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.16).

### 3. Keadaan Sarana dan Prasarana

Selain Sarana, Pondok pesantren Nurul Bayan juga memiliki beberapa prasarana. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa luas kampus Pondok pesantren Nurul Bayan seluas 6,5 Hektare dan memiliki beberapa sarana dan fasilitas seperti fasilitas olahraga dan Pergedungan. Beberapa prasarana pergedungan terdiri Auditorium, Ruang Pimpinan, Perpustakaan, Asrama Guru Masjid, Mushalla, Asrama santri, Asrama Santriwati, Asrama Guru Kantor BP dan OSIS, Kantor MTs-MA, Laboraturium Bahasa, Ruang Makan Santri dan guru, Gudang, Tempat Memasak dan Balai latihan dan keterampilan. Sedangkan fasilitas olahraga terdiri dari lapangan sepak bola, Lapangan volley dan lapangan basket. Dan untuk uraian prasarana yang dimiliki dapat dilihat (pada tabel 4.11 pada daftar lampiran).

Berdasarkan wawancara dengan Pimpinan Pondok, bahwa “Sarana dan prasarana pendidikan sudah cukup memadai walaupun disana sini masih ada kekurangan dan perlu penyempurnaan”. Adapun menurut Direktur TMI bahwa “Sarana dan prasarana pendidikan dipesantren ini sudah cukup memadai walaupun disana sini masih perlu disempurnakan”. Dan menurut Kepala Tsanawiyah bahwa “Sarana dan prasarana pendidikan dipesantren ini sudah cukup memadai walaupun masih ada beberapa kekurangan seperti ruang kelas yang belum permanen”. Adapun Fasilitas Ruang kelas yang dimiliki Pondok pesantren Nurul Bayan terdiri dari ruang permanen dan semi permanen, dan hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 4.12: Fasilitas Ruang kelas di Pondok Pesantren Nurul Bayan

NO	KEADAAN BANGUNAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Ruang Permanent	7 buah	Ruang kelas
2	Ruang semi permanent	3 buah	Ruang kelas
3	Ruang Darurat/emperan masjid	1 buah	Masjid
Jumlah		11 buah	

Sumber: Sekretasis Pondok Pesantren Nurul Bayan dikutip pada tanggal 20 Desember 2011.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki Pondok pesantren Nurul Bayan cukup memadai karena terdiri dari ruang kelas, ruang perpustakaan, laboratorium, balai pertemuan, ruang pimpinan (ruang kepala sekolah), ruang guru, tempat beribadah( Masjid), Ruang OSIS, jamban (toilet/kamar mandi), gudang, tempat bermain dan olahraga, ruang keterampilan dan beberapa asrama. Hanya yang berkaitan dengan ruang kelas masih belum memadai karena dari 11 ruang kelas, baru 7 ruang kelas yang permanen. Sedangkan 4 buah terdiri dari Ruang semi permanent dan emperan masjid. Dengan demikian untuk Prasarana Pendidikan belum khususnya ruang kelas belum mencukupi.

E. Kesesuaian Kurikulum, Tenaga Pendidik, dan Sarana Prasarana dengan Standar Nasional Pendidikan.

#### 1. Kesesuaian Kurikulum

Pelaksanaan Standar Nasional pendidikan di Pondok pesantren Nurul Bayan sudah dapat berjalan sesuai dengan harapan, walaupun disana sini masih terdapat beberapa kekurangan hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan kurikulum, luas kampus yang dimiliki pesantren, ketersediaan sarana dan prasarana dan

tersedianya SDM yang memadai. Untuk melahirkan kader *Munzirulqoum* dan *Ummahat Solihat* yang mampu terjun di berbagai lapangan kehidupan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai oleh Pondok pesantren Nurul Bayan, maka para santri tidak saja dijejali dengan ilmu-ilmu agama tapi harus diimbangi dengan Ilmu-ilmu umum. Terkait dengan hal tersebut maka kehadiran kurikulum pendidikan nasional mutlak diperlukan. Oleh sebab itu kurikulum yang dilaksanakan di pondok ini merupakan perpaduan antara kurikulum Pondok Modern Gontor dengan Kurikulum Pendidikan Nasional. Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Nasional sudah berjalan dengan baik, kendatipun masih terkendala oleh limitnya waktu karena banyaknya muatan kurikulum pesantren.

Berdasarkan wawancara dengan Pimpinan Pondok Pesantren, bahwa:

Kurikulum yang dilaksanakan di pesantren ini adalah merupakan perpaduan antara kurikulum Pondok Modern Gontor dengan Kurikulum Pendidikan Nasional. Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Nasional sudah berjalan dengan baik dan semua materi yang ditetapkan oleh pemerintah sudah diajarkan semua hanya masalah waktu/forsi waktunya harus menyesuaikan dengan keadaan pesantren.

Menurut direktur Kulhiyatul MualliminAl-Islamiyah bahwa:

Kurikulum yang dilaksanakan di pesantren ini adalah merupakan perpaduan antara kurikulum Pondok Modern Gontor dengan kurikulum pendidikan nasional. Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Nasional sudah berjalan dengan baik dan semua materi yang ditetapkan oleh pemerintah sudah diajarkan semua hanya terkendala pada kurangnya waktu karena materi pesantren cukup banyak.

Sedangkan menurut Kepala Tsanawiyah bahwa “Pelaksanaan kurikulum nasional tidak merugikan pondok, karena dengan diberlakukannya kurikulum nasional berarti kita mengikuti perkembangan khususnya berkaitan dengan bidang sains dan ilmu-ilmu umum”.

Kendala yang dihadapi pondok dalam Pelaksanaan kurikulum adalah banyaknya muatan kurikulum pesantren yang menyebabkan kurangnya alokasi waktu yang dapat dipakai untuk pelaksanaan kurikulum pendidikan nasional. dampak langsung yang ditimbulkan adalah target kurikulum pesantren tidak sesuai dengan harapan. Menurut Direktur TMI bahwa:

Pelaksanaan standar Nasional pendidikan sudah dapat berjalan sesuai dengan tujuan, walaupun disana sini masih terdapat beberapa kekurangan hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan kurikulum, luas kampus yang dimiliki pesantren dan beberapa program penunjang termasuk juga pemanfaatan LAB alami. Kendatipun demikian kendala yang dihadapi pesantren adalah terbatasnya waktu yang dimiliki pesantren hal ini disebabkan banyaknya muatan kurikulum pesantren, keadaan tersebut menyebabkan tersisih dan berkurangnya waktu untuk beberapa materi pesantren yang merupakan tujuan utama pelaksanaan PBM di pesantren sehingga target pesantren tidak sesuai dengan harapan.

Disisi lain pesantren merasa cukup terbebani dengan beberapa standar nasional. Menurut Pimpinan pondok:

Pemerintah perlu memberikan kebijakan tersendiri bagi pesantren khususnya, lebih lebih yang berkaitan dengan kurikulum, karena dampak yang terjadi dari pelaksanaan kurikulum nasional, target kurikulum pesantren tidak sesuai dengan harapan. Kendatipun demikian pihak pesantren berkomitmen untuk menjalankan Standar Nasional Pendidikan karena Standar Nasional Pendidikan yang sudah ditetapkan pemerintah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan kurikulum pesantren.

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan dan data yang diperoleh, terlihat bahwa Standar Isi di TMI Pondok pesantren Nurul Bayan telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 22 Tahun 2006 tentang standar isi dan muatan kurikulum. Standar isi pada pendidikan berbasis masyarakat di Pondok pesantren Nurul Bayan memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan.

Sedangkan yang berkaitan dengan muatan kurikulum bahwa muatan kurikulum di Pondok pesantren Nurul Bayan berisikan: (a) berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya, (b) beragam dan terpadu, (c) tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, (d) relevan dengan kebutuhan kehidupan, (e) menyeluruh dan berkesinambungan, (f) belajar sepanjang hayat, (g) seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya program pengabdian (khidmat) dan kerjasama antara pondok pesantren Nurul bayan dengan beberapa pondok Pesantren diluar pondok pesantren, dimana para alumni pondok sebelum melanjutkan studi ke perguruan tinggi diberikan tugas untuk memberikan pengabdian selama satu tahun di pondok pesantren Nurul bayan atau di beberapa pondok pesantren di luar Pesantren. Selain itu para tenaga alumni pondok pesantren Nurul bayan dimanfaatkan untuk membantu dalam pengajaran Al-qur'an, bahasa Arab dan ilmu-ilmu agama diluar pondok pesantren Nurul bayan, Sedangkan di pondok pesantren Nurul bayan sendiri para alumni atau guru baru (junior) ditugaskan untuk membantu mengajar beberapa materi pada mata pelajaran agama dan umum pada jenjang Tsanawiyah.

Adapun yang berkaitan dengan struktur kurikulum TMI telah sesuai dengan PP 19/2005 Pasal (7) tentang Struktur dan muatan KTSP pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kurikulum TMI Pondok pesantren Nurul Bayan meliputi lima kelompok mata pelajaran yaitu: a) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia b) Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian c) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dan d) Kelompok mata pelajaran estetika. Hanya dalam kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga

dan kesehatan tidak dimasukkan dalam program intrakurikuler, tapi diprogramkan dalam kegiatan ekstrakurikuler.

Dengan demikian pelaksanaan kurikulum TMI Pondok pesantren Nurul Bayan telah mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 22 Tahun 2006 tentang standar isi dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 9 tahun 2005 Pasal (7) tentang Struktur dan muatan KTSP pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

## 2. Kesesuaian Tenaga Pendidik

Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

Kualifikasi akademik yang dimaksudkan adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pengamatan di lapangan dan data yang diperoleh terlihat bahwa tingkat pendidikan guru di Pondok Pesantren Nurul Bayan, sebagian besar belum memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan yaitu minimal D-IV atau S-1. Dari 41 guru yang mengajar di Tarbiyatul Muallimin Ali Islamiyah yang berpendidikan S 2 sebanyak 2 orang, yang berpendidikan S 1 sebanyak 11 orang, yang

berpendidikan D 3 sebanyak 1 orang dan yang berpendidikan SLTA sebanyak 27 orang.

Dari para guru yang berpendidikan SLTA tersebut beberapa diantara mereka merupakan penghafal Al-Qur'an, Alumni Ma'had A'li Nurul Bayan (setara D 2) dan sisanya sedang berstudi di Fakultas Tarbiyah Nurul Hakim. Untuk melihat jumlah guru berdasarkan berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.16. Persentase Jumlah Guru Berdasarkan Tingkat Pendidikan tahun 2011-2012

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PROSENTASE	KETERANGAN
	S 2	2 orang	4,487 %	Lulusan SLTA terdiri dari: 3 orang Hafiz Alqur'an, 12 orang alumni Ma'had A'li, dan 12 orang Mahasiswa.
	S 1	11 orang	26,829 %	
3	D 3	1 orang	2,490 %	
4	SLTA	27 orang	65,853 %	
	Jumlah	41 orang	100 %	

Sumber; Data Hasil Survey

Dari Tabel di atas, dapat dipahami bahwa kualifikasi akademik guru yang mengajar pada TMI yang sesuai dengan standar diknas hanya sebesar 32 % dan yang belum memenuhi standar sebesar 68 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar guru di Pondok Pesantren Nurul Bayan belum memenuhi standar kualifikasi akademik.

Oleh sebab itu untuk meningkatkan kemampuan dan pengembangan guru, dilaksanakan program ma'had Ali bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Nurul Hakim. dengan mengSelain itu m pengutus para guru lulusan pesantren untuk melanjutkan studi di beberapa perguruan tinggi di beberapa pesantren di Jawa seperti di ISID (Institut Studi Islam Darussalam) di Gontor dan di Perguruan tinggi Al-Amin Madura untuk menempuh

program S 1 dan S 2. Sedangkan untuk guru guru pada bidang studi umum tidak terlalu banyak kendala karena pihak pesantren telah memanfaatkan tenaga tenaga guru dari luar pondok yang memiliki kulifikasi sesuai dengan jenjang. (Wawancara dengan pimpinan pondok).

Dengan demikian tenaga Pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Bayan telah mengacu pada Permndiknas No 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Walaupun pada kenyataannya masih banyak guru yang belum memenuhi standar kualifikasi.

### 3. Kesesuaian Sarana Prasarana

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), bahwa Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Berdasarkan pengamatan di lapangan dan data yang diperoleh, bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki Pondok pesantren Nurul Bayan telah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, dimana luas tanah yang dimiliki Pondok pesantren Nurul Bayan seluas 6,5 hektare. Sedangkan luas

bangunan keseluruhan berjumlah 2.175. m 2, yang terdiri beberapa bangunan dan fasilitas olahraga seperti tertera dibawah ini:

- 1) Gedung sekolah dibuat dengan pondasi permanen dan berlokasi didalam kampus pondok pesantren, aman dan nyaman, gedung dilengkapi dengan fasilitas instalasi listrik dengan daya yang memadai. Dari 11 rombongan belajar, baru 7 ruang belajar yang tersedia, sedangkan sisanya terdiri dari ruangan semi permanen.
- 2) Selain ruang kelas, Lembaga pendidikan ini, dilengkapi juga dengan ruang perpustakaan, laboratorium bahasa, ruang pimpinan (ruang kepala sekolah), ruang guru, tempat beribadah (Masjid dan mushalla), ruang OSIS, jamban (toilet/kamar mandi), gudang, tempat bermain dan olahraga, dan ruang keterampilan.
- 3) Disamping itu karena para Santri dan santriwati semuanya bertempat tinggal didalam asrama, maka untuk kepentingan tersebut pihak pesantren memiliki beberapa prasarana selain yang tersebut terdahulu dan merupakan kelengkapan asrama. Sarana dan Prasarana tersebut adalah, Asrama Guru 4 buah, asrama santriwati dan santriwati 8 buah, Ruang dapur 1 buah, ruang makan 2 buah, tempat bermain/olahraga yang terdiri dari Lapangan sepak bola, Lapangan volley dan lapangan basket, dan tenis meja.

Sedangkan hasil wawancara dengan pimpinan pesantren. kepala Tsanawiyah dan Direktur KMI tentang Sarana dan Prasarana menunjukkan bahwa: "Sarana dan prasarana pendidikan di Pondok pesantren Nurul Bayan sudah cukup memadai walaupun disana sini masih ada kekurangan dan

perlu penyempurnaan. Oleh sebab itu upaya pembangunan dan penyempurnaan terus dilakukan”.

Menurut Pimpinan Pondok, “bahwa peningkatan sarana dan prasarana di pesantren merupakan program jangka panjang pesantren yang dilakukan pesantren setiap waktu tanpa berhenti. Adapun upaya yang dilakukan pesantren adalah dengan melaksanakan program pembangunan yang dilaksanakan setiap hari tanpa berhenti dengan koordinasi Bagian Pembangunan” (Wawancara Pimpinan Pondok).

Untuk sumber dana pembangunan menurut pimpinan Pondok, bahwa setiap tahun dana yang dikeluarkan tidak kurang dari 200 juta. Sedangkan sumber dananya berasal dari berbagai pihak baik pemerintah, pihak swasta dan masyarakat. Dana pemerintah berupa dana stimulan, block grand, dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), dan juga dana bantuan Dunia Islam (Haiatul Igosah Al-Islamiyah).

Selain dari sumber tersebut, dana bantuan juga diperoleh dari dana donatur yang diberikan oleh para *anshor pondok* dan para *muhsinin* yang diperoleh dari para wali murid, para keluarga besar haji baik dalam bentuk infaq, sadaqoh dan zakat. Dan untuk dana donatur ini tidak kurang dari 100 juta untuk setiap tahunnya. Adapun bentuk bantuan yang diterima pesantren selain dalam bentuk uang, juga diterima dalam bentuk material seperti pasir, batu bata, bata merah dan semen (Wawancara dengan Pimpinan Pondok).

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Sarana dan Prasarana yang ada di Pondok pesantren Nurul Bayan telah sesuai dengan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana.

#### F. Kinerja Output Pendidikan

Tujuan pendidikan di Pondok pesantren merupakan penjabaran dan perluasan dari tujuan pendidikan Nasional. Dalam pendidikan menengah pada pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Sedangkan Pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Bayan bertujuan untuk melahirkan kader *Munzirulqoum* dan *Ummahat Solihat* yang mampu terjun di berbagai lapangan kehidupan.

Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa kurikulum yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Nurul Bayan adalah memadukan antara kurikulum pendidikan Pondok Pesantren dan pendidikan Nasional. Dengan demikian kalau kedua tujuan pendidikan tersebut dipadukan, maka output pendidikan yang diinginkan oleh Pondok Pesantren Nurul Bayan adalah: Pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan siswa sehingga memiliki kepribadian yang mampu mengamalkan ilmunya di berbagai lapangan kehidupan dan dapat melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.

Oleh sebab itu untuk mengetahui Kinerja Output Pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Bayan, peneliti melihat dari dua sisi yaitu sisi tingkat kelulusan siswa dan sisi kegiatan alumni di masyarakat. Menurut pimpinan Pondok Pesantren Nurul Bayan bahwa: Keberhasilan santri di Pondok

Pesantren Nurul Bayan, tidak bisa hanya dilihat dari kelulusan santri dalam ujian nasional, tapi yang lebih penting adalah bagaimana nilai-nilai kepesantrenan dapat dijalankan dan diterapkan di masyarakat setelah selesai di pondok Pesantren (Wawancara dengan pimpinan Pondok).

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa prestasi lulusan yang diharapkan pesantren adalah selain kelulusan santri pada jenjang formal agar dapat melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, juga menekankan pada segi manfaat alumni setelah keluar dari Pondok Pesantren yaitu mampu menjadi *Munzirulqoum* dan *Ummahat Solihat* yang mampu terjun di berbagai lapangan kehidupan. Untuk mengetahui tingkat kelulusan siswa dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 4.15. Data tingkat kelulusan Siswa MTs dan MA Nurul Bayan

No	Jenjang Pendidikan	Tahun Ajaran	JUMLAH SISWA			
			Peserta	Lulus	Tdk lulus	Prosentase
1	Madrasah Tsanawiyah	2010 - 2011	40	38	2	95 %
		2011 - 2012	46	46	-	100 %
2	Madrasah Aliyah	2010 - 2011	22	22	-	100 %
		2011 - 2012	30	30	-	100 %

Sumber: Sekretaris Pondok Pesantren Nurul Bayan

Dari tabel diatas dapat dipahami bahwa tingkat kelulusan siswa pada jenjang Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah cukup tinggi. Dan hal ini dapat dilihat dari tingkat kelulusan siswa pada jenjang Aliyah untuk 2 tahun terakhir yaitu tahun ajaran 2009 – 2010 dan tahun ajaran 2010 – 2011 mencapai 100 %, Sedangkan untuk jenjang Tsanawiyah tingkat kelulusannya mencapai 95 % untuk tahun ajaran 2009 – 2010, dan untuk

tahun ajaran 2011 -2012 mencapai 100 %,.. Namun demikian dalam rangka mempertahankan prestasi yang sudah dicapai perlu kebijakan Pesantren yang berkaitan dengan alokasi waktu dan peningkatan tenaga guru untuk beberapa materi yang di ujian nasionalkan.

Adapun yang berkaitan dengan kegiatan alumni, selain melanjutkan studi, mereka juga ikut berkiprah di masyarakat dalam berbagai kegiatan seperti guru mengaji di kampung-kampung, guru di beberapa lembaga Pendidikan seperti MTs dan Pondok Pesantren, da'i, pedagang dan pengusaha.

Berdasarkan wawancara dengan pimpinan PP Nurul Bayan, bahwa Para alumni PP Nurul Bayan telah tersebar di beberapa lapangan kegiatan seperti melanjutkan studi, Pengabdian masyarakat baik sebagai pengajar pada sekolah sekolah agama seperti Tsanawiyah dan beberapa Pondok Pesantren, mengajar mengaji di kampung-kampung, sebagai muballig dan Da'i dan sebagai pedagang dan pengusaha.

Adapun beberapa perguruan tinggi dalam negeri yang dimamasuki diantaranya seperti di UIN Malang, Jakarta, Jogjakarta, IAIN Surabaya dan Mataran , dan beberapa perguruan tinggi swasta seperti ISID di Gontor, IDIA di Madura, Universitas Nahdlatul Wathan dan Universitas Muhammadiyah. Sedangkan perguruan tinggi Luar negeri seperti di Al-Azhar University di Mesir. Universitas Bangsa-Banga di Malaisia dan Perguruan tinggi di Yaman (Wawancara dengan Pimpinan Pondok).

Dengan demikian berdasarkan hasil wawancara dan data yang diperoleh, menunjukkan bahwa kinerja output pendidikan di PP Nurul Bayan cukup baik dan menggembirakan.

Apabila kinerja output pendidikan di PP Nurul Bayan dikaitkan dengan konsep Edwards III tentang implementasi, maka tidak semua elemen dan faktor yang dikemukakan Edwards III dapat mempengaruhi implementasi PBM di PP Nurul Bayan karena beberapa indikator dari elemen-elemen implementasi tersebut belum terpenuhi sebagaimana disebutkan dibawah ini:

1. Faktor komunikasi belum dapat dipenuhi karena kebanyakan guru di Pondok Pesantren Nurul Bayan belum memahami dengan baik Kebijakan PBM.

2. Sumber daya

Menurut Edwards III sumber daya merupakan daya dukung terhadap pelaksanaan suatu kebijakan agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik, konsisten, dan dengan transmisi yang tepat. Namun kenyataan dilapangan bahwa baru sumber daya yang berkaitan dengan wewenang yang baru bisa dilaksanakan. Sedangkan yang berkaitan dengan sumber-sumber daya yang lain seperti SDM dan fasilitas ruang belajar belum terpenuhi, terbukti dari jumlah guru yang ada baru 31 % yang memenuhi kualifikasi standar nasional Pendidikan. Sedangkan untuk sarana prasara khususnya ruang kelas, dari 11 rombongan belajar, baru tersedia 7 ruang kelas permanen, sedangkan sisanya belum memenuhi standar.

### 3. Struktur birokrasi (*bureaucratic structure*).

*Standard operating procedures (SOP)* belum tersedia, namun berkaitan dengan *fragmentation* sudah dapat dijalankan, karena di Pondok Pesantren Nurul Bayan, Pimpinan telah menugaskan beberapa bagian dalam mengimplementasikan kebijakan sehingga masing-masing bagian terhindar dari lempar tanggungjawab antara satu bagian dengan bagian lain. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang mengatakan bahwa “Sudah ada pembagian tugas diantara para pelaksana kebijakan di pondok pesantren, bentuk pembagian tugas tersebut telah diatur sesuai dengan tugas dan jabatan masing-masing”. (Wawancara dengan Pimpinan Pondok Pesantren).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Beberapa faktor yang dikemukakan Edwards III, belum berpengaruh terhadap kebijakan PBM di PP Nurul Bayan kecuali faktor disposisi dan *fragmentation* pada faktor struktur birokrasi. Menurut hemat peneliti terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi selain yang disebutkan Edwards III yaitu faktor lingkungan dan motivasi.

#### 1. Faktor lingkungan

Berkaitan dengan faktor lingkungan, para siswa di Pondok Pesantren terbiasa hidup dengan penuh kedisiplinan dimana para siswa selama 24 jam tetap dalam pengawasan guru, hal ini terlihat dari jadwal kegiatan yang telah ditetapkan oleh Pondok Pesantren baik berkaitan dengan jadwal harian, mingguan dan tengah tahunan. Dari semua kegiatan yang dilaksanakan siswa, telah terwujud kultur

pendidikan dan berdampak pada pembentukun keperibadian siswa yang taat dan patuh dengan aturan yang ditetapkan dibawah bimbingan para guru-gurunya. Untuk jadwal kegiatan harian, bulanan dan tengah tahunan santri dapat dilihat pada tabel 4.2, 4.3 dan 4.4.

## 2. Faktor motivasi.

Pimpinan Pondok Pesantren, para guru dan para siswa hidup selama 24 jam didalam asrama dengan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan. Dengan demikian keberadaan pimpinan dan guru telah memberikan arti dalam kehidupan para siswa dan sekaligus telah berperan sebagai motivator dan sugesor bagi perkembangan mereka . Sedangkan untuk faktor motivasi guru para siswa memperoleh bimbingan langsung bukan saja pada kegiatan klasikal namun juga melalui kegiatan kompi dan kegiatan muawajahah dan bimbingan studi pada malam hari. Kegiatan *Muwajahah* merupakan kegiatan tambahan berupa studi kolektive yang diadakan pesantren dengan mengambil jam sore atau malam diluar kegiatan kelas. Berdasarkan wawancara dengan Direktur TMI menunjukkan bahwa “Pengontrolan pelaksanaan PBM tetap ada yaitu dilaksanakan setiap pertemuan kamisan. Selain itu para guru juga mengadakan *muwajahah* dan pengontrolan belajar siswa yang diadakan pada malam hari “.

Selain itu berdasarkan pengamatan dilapangan, para guru diberikan tugas secara terjadwal untuk pengontrolan siswa belajar di kamar dan tempat masing masing. Para guru berkeliling dari satu kamar ke kamar lain untuk melihat dan mengawasi siswa yang belajar, dan

kesempatan ini digunakan guru untuk menjelsakan beberapa pelajaran yang ditanyakan siswa. Sedangkan agenda pertemuan kamisan menurut Direktur TMI:

“Untuk Pertemuan Kamisan biasanya membahas beberapa hal diantaranya laporan pengontrolan kelas, Evaluasi program pendidikan dan pengajaran, *Naqdul Mudarrisin* (Supervisi pelaksanaan pengajaran) bagi guru-guru baru dan Penyampaian informasi tentang program-program pendidikan”.

Dengan demikian menurut peneliti fakto-faktor yang mempengaruhi adalah faktor disposisi, *fragmentation* pada factor struktur birokrasi, faktor lingkungan dan faktor motivasi.

UNIVERSITAS TERBUKA

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan PBM di PP Nurul Bayan telah berjalan sesuai dengan amanat undang-undang no 20 tahun 2003 pasal ayat 16. Dengan menggunakan pendekatan internal dan eksternal. Pelaksanaan standar isi, standat guru dan standar sarana prasarana telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk kualifikasi akademik guru mengacu pada Permendiknas No 22 Tahun 2006, dan Permendiknas No 9 tahun 2005 walaupun secara kenyataan di antara guru belum semua berkualifikasi S-1. Sedangkan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Permendiknas No 24 Tahun 2007. Beberapa faktor yang diberikan oleh Edwards III seperti komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi tidak semua memberikan pengaruh pada keberhasilan implementasi Kebijakan PBM di Pondok Pesantren Nurul Bayan, namun juga dipengaruhi oleh faktor lain yaitu faktor lingkungan dan faktor motivasi.
2. Untuk Kinerja Output Pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Bayan, dapat dilihat dari tingkat kelulusan siswa pada jenjang MTs dan MA untuk 2 tahun terakhir yaitu TA 2009 – 2010 dan TA 2010 – 2011

menunjukkan hasil yang cukup baik. Sedangkan kegiatan alumni selain melanjutkan studi di beberapa Perguruan Tinggi dalam negeri dan luar negeri, mereka juga berhidmat dan bekerja di berbagai lapangan kegiatan seperti menjadi guru mengaji di kampung-kampung, guru MTs dan Pondok Pesantren, da'i, pedagang dan pengusaha.

## **B. Saran**

1. Berdasarkan hasil penelitian, beberapa upaya yang telah dilakukan Pondok Pesantren dalam melaksanakan kebijakan pemerintah tentang PBM namun perlu perhatian semua pihak baik dari Pondok Pesantren sendiri maupun lembaga terkait.

### **a. Pondok Pesantren**

Diperlukan upaya-upaya peningkatan dan pengembangan guru-guru bidang studi umum, karena sampai saat ini masih menggunakan guru-guru dari beberapa sekolah negeri. Untuk itu para guru perlu diberikan kesempatan untuk mengembangkan dirinya dengan pemberian beasiswa, agar pada gilirannya Pondok Pesantren bukan saja memiliki tenaga agama yang handal tapi juga memiliki tenaga-tenaga umum yang memadai. Selain itu diharapkan agar bisa mempertimbangkan alokasi waktu untuk kurikulum Diknas sehingga diharapkan dapat berjalan sesuai dengan harapan dan tuntutan pendidikan nasional.

### **b. Dikpora, Depag dan Pemda kabupaten Lombok Utara,**

Agar bisa memberikan perhatian kepada lembaga-lembaga pendidikan swasta khususnya PP Nurul Bayan dengan memberikan bantuan berupa tenaga pengajar, kelengkapan sarana dan prasarana terutama

ruang kelas sehingga pelaksanaan PBM di Pondok Pesantren tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

2. Perlu ada penelitian lanjutan untuk mengetahui dan mengkaji lebih jauh tentang implementasi kebijakan-kebijakan Pendidikan sehingga akan dapat memberikan masukan berharga bagi perkembangan ilmu dan pengetahuan khususnya dalam ilmu administrasi publik.

UNIVERSITAS TERBUKA

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU – BUKU

- Arikunto, Suharsimi, (2006), *Prosedir Penelitian, suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Cochran, Charles L & Eloise F. Malone, (1999), *Public Policy, Perspectives And Choices, Second Edition*. Boston: McGraw-Hill College.
- Dhofier, Zamakhsyari, (1985). *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES.
- Edwards III, George C. (1980), *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Inc. Washington D.C.
- Grindle, Merillee .S (ed). (1980), *Politics and Policy Implementation and Public Policy in the third World*. New Jersey.Princeton University Press.
- Hasbullah, Drs. (1999), *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasibuan, Malayu, 2002 *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Grasindo.
- Hornby, A S. (1995) *Oxford Advance Learner Dictionary Of current English*. Oxford University Press.
- Irawan, prasetya (Edisi 1). (2009), *Metodologi Penelitian Administrasi*. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.
- Imran Arifin, (1989). *Kepemimpinan Kyai, kasus Pondok pesantren tebuireng, jombang: kalimasada press*.
- Kismartini dkk, *Analisa Kebijakan Publik*. Jakarta.Universitas Terbuka.
- Saridjo, Marwan. (1989). *Sejarah pondok Pesantren di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Sa'ud, Syaefudin & Makmun, Syamsuddin Abin, (2007), *Perencanaan Pendidikan Suatu Pendekatan Komprehensif*, Bandung: Kerjasama Program Pascasarjana UPI dengan PT. Remaja Rosdakarya.
- Mangkunegara, Anwar Prabu, 2005. *Managemen Sumber Daya Perusahaan*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya

- Mastuhu (1994). *Dinamika Sistem Pendidikan pesantren*. Jakarta: INIS
- Moleong, Lexy. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugraha, Muhammad Qudrat. (2009). *Manajemen Strategic Organisasi Publik*, Jakarta: Universitas Terbuka.
- Nurdin, Syafruddin, (2005), *Guru Profesional & Implementasi Kurikulum*, Jakarta: Quantum Teaching.
- Rino. (2010). *Strategi Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Sebuah Kajian Pengembangan KTSP Berbasis Keunggulan Daerah Menuju Kemandirian Sekolah, fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Sulistiyani, Ambar. T dan Rosidah . 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha ilmu.
- Susilo, Muhammad Joko, ( 2007). *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Manajemen Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tamyiz Burhanuddin (2001) , *Ahlak Pesantren : Solusi bagi Kerusakan Akhlak* , ITTIQA Jogjakarta Press, , hal 101.
- Tilaar, H A R, (2004), *Paradigma baru Pendidikan Nasional*, Cetakan ke dua, Rineka Cipta, Jakarta,
- Wahab, S A, (2004), *Analisis Kebijaksanaan dari formulasi ke Implementasi kebijaksanaan Negara*, edisi kedua, Bumi Aksara Jakarta.
- Wahab, Solichin Abdul, (1991), *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara Wahid,
- Abdurrahman, (2001), *Menggerakkan Tradisi: Esai-Esai Pesantren*, LkiS, Yogyakarta.
- Zarkasyi, Abdullah syukri, (2005), *Gontor dan Pemahaman Pendidikan Pesantren*, PT raja Grafindo Persada, Jakarta, ed. 1.

## B. Makalah-Makalah

Arifin, Sopfjan. (2009), *Kajian pustaka, kerangka pemikiran, dan hipotesis*. Makalah yang tidak dipublikasikan.

Badan Standar Nasional Pendidikan. (2006) *Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan Jenjang pendidikan Dasar dan Menengah*,

Chariri, A. (2009), "*Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif*", Paper disajikan pada *Workshop Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Laboratorium Pengembangan Akuntansi (LPA), Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, 31 Juli – 1 Agustus 2009.

Depag RI (2005), *Perangkat Administrasi Penyelenggaraan Wajib Belajar 9 tahun pada pondok Pesantren salafiyah tingkat ula dan Wustha*, Jakarta.

Nafis, Muhammad Muntahibun. (2008). *Pesantren dan Pluralisme: Upaya Modernisasi Pendidikan Pesantren Menuju Masyarakat Madani*. Jurnal Pemikiran Alternatif pendidikan, Vol. 13|No. 2|Mei-Ags 243- 270.

## C. Peraturan Pemerintah

*Himpunan PP 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan, Seri Perundang-undangan*, cetakan 1, 2011, Penerbit Pustaka Yustisia, Jogjakarta.

Himpunan PP RI No. 17 Tahun 2010 *Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan*. 2011.

Peraturan Pemerintah Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Permen Diknas Nomer 22 tahun 2006  *tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan dasar dan Menengah*.

Undang undang Republik Indonesia, Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistim Pendidikan Nasioanal.

## D. Artikel Dari Internet.

<http://rakim-ypk.blogspot.com/2008/06/desain-penelitian.html>, diambil, 6 Agustus 2011

dari <http://searchcrm.techtarget.com/difination/implemantion>). diambil  
20 Juli 2011

<http://ikmasatu.multiply.com/jurnal/item/2>, Diambil 20 juli 2011

<http://www.mudjarahardjo.com/materi-kuliah/336.html?task=view>,  
Diambil 8 Agustus 2011

[http://blog.re.or.id/pondok-pesantren-sebagai-lembaga-pendidikan-islam-  
html](http://blog.re.or.id/pondok-pesantren-sebagai-lembaga-pendidikan-islam-html). Diambil 12 Agustus 2011.

UNIVERSITAS TERBUKA

## Lampiran 1: Jadwal kegiatan Penelitian

Jadwal kegiatan Penelitian di Pondok pesantren Nurul Bayan  
kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara.

NO	INFORMAN	HARI/TGL	WAKTU	TEMPAT
1	Pimpinan pondok	10 Dec 2011	9.00 – 11.30	Rumah pimpinan
		12 Dec 2010	14.00 – 15.30	Rumah pimpinan
		08 Juni 2010	9.00 – 10.30	Rumah pimpinan
2	Diretur TMI	09 Dec 2010	8.30 - 11.00	Kantor TMI
3	Kepala Sanawiyah	17 Dec 2010	9.00 - 11.00	Kantor TMI
		18 Dec 2010	8.30 - 11.00	Kantor TMI
4	Sekretaris Pondok	15 Dec 2010	9.00 - 11.00	Kantor TMI
		26 Dec 2010	9.00 - 11.30	Ruang Tamu
			16.00 - 17.30	Kantor TMI
		08 Juni 2010	09.00 – 12.00	Rumah pimpinan

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

### PEDOMAN WAWANCARA

#### A. pertanyaan Indikator Implementasi:

1. Apakah kebijakan pemerintah tentang Pendidikan Berbasis Masyarakat telah dipahami oleh para ustadz di pondok pesantren ini?
2. (kalau belum), Apakah ada langkah langkah yang diambil pesantren dalam rangka sosialisasi kebijakan pemerintah tersebut?
3. Menurut bapak, pemerintah telah memberlakukan Standar nasioanal pendidikan, Apakah dengan diberlakukan Standar nasioanal pendidikan telah sesuai dengan prinsip dan kultur pondok? kenapa?
4. Pelaksanakan PBM masih terkait dengan aturan pemerintah berupa Standar nasional Pendidikan. Bagaimana pendapat bapak tentang hal tersebut ?
5. Dalam pelaksanaan Pendidikan Berbasis Masyarakat terdapat 8 Standar nasioanal pendidikan Apakah 8 standar tersebut sudah bisa dijalankan, atau belum? kenapa?
6. Menurut bapak dalam melaksanakan Standar nasioanal pendidikan, apakah ada kendalanya yang dihadapi? (kalau ada) Apa kendalanya? Bagaimana mengatasinya?
7. Bagaimana komitmen pihak pesantren untuk menjalankan Standar Nasioanal Pendidikan pada Pendidikan Berbasis Masyarakat?
8. Bagaimana bentuk Kurikulum yang dilaksanakan dipesantren ini? Apakah kurikulum pendidikan nasional sudah dapat berjalan dengan baik atau belum?
9. Menurut bapak, Apakah jumlah tenaga pengajar (ustadz) sudah memadai secara kualitas dan kuantitas sesuai dengan aturan pemerintah? (kalau belum) kenapa?
10. Apakah sarana dan prasarana pendidikan sudah cukup memadai? apa saja yang sudah tersedia, dan apa saja yang belum tersedia?.
11. Menurut bapak, apakah pelaksanaan Standar nasioanal pendidikan menguntungkan atau merugikan pondok? (kalau merugikan/menguntungkan) apa kerugian dan keuntungannya?
12. Dengan banyaknya materi pondok yang harus diajarkan di pondok bapak, apakah pemberlakuan Standar nasioanal pendidikan tidak mengganggu proses

belajar mengajar atau kegiatan lain? (kalau mengganggu), apa gangguannya? dan solusi apa yang bapak ambil? .

13. Apakah ada pengontrolan dari pihak pimpinan pondok atau kepala sekolah dalam Pelaksanaan PBM?
14. Apakah terdapat pola-pola hubungan dalam struktur birokrasi di pondok pesantren Nurul Bayan?
15. Bagaimana hubungan antara pondok pesantren dengan Dikpora? Apakah ada pembinaan dari Dikpora? Kapan?
16. Bagaimana hubungan antara pimpinan Pesantren, Kepala sekolah dan para pengajar?
17. Agar kegiatan di pesantren ini berjalan dengan baik, diperlukan SOP (Standar Operasional Prosedur). Apakah pihak pesantren telah memiliki?
18. Apakah sudah ada pembagian tugas diantara para pelaksana kebijakan di pondok pesantren? Bagaiman bentuk pembagian tugas tersebut?
19. Apa harapan pesantren dalam rangka pengembangan dan kemajuan pendidikan berbasis Masyarakat di pesantren ini?

#### **B. Daftar Pertanyaan indicator PBM**

1. Apakah ada upaya pesantren untuk menurunkan angka anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Apakah pesantren memberikan bantuan beasiswa bagi siswa yang kurang mampu? Apa bentuk bantuan yang diberikan?
2. Apa yang dilakukan pesantren dalam menanggulangi ketimpangan antar kelompok social ekonomi?
3. Bagaimana upaya pesantren dalam mengatasi kekurangan guru? Apakah para guru diberikan insentif? Berapa? Apakah pernah diadakan pemindahan tugas guru dari satu tugas ketugas lain? Bagaiman caranya?
4. Apa yang dilakukan pesantren dalam Peningkatan sarana/prasarana pendidikan? Dari mana sumber pendanaanya? Apakah ada bantuan dari luar pesantren? Bagaimana bentuk bantuan tersebut?
5. Apa yang dilakukan pesantren dalam meningkatkan social ekonomi para wali murid yang berpenghasilan rendah?
6. Bagaimana mengarahkan wali murid agar dapat membantu anak anak mereka belajar dengan baik?

7. Bagaimana menyadarkan siswa agar tertarik dalam bidang studi tertentu? Apa upaya yang dilakukan pihak pesantren?
8. Apa yang dilakukan pesantren dalam meningkatkan kemampuan guru dalam pendayagunaan alat dan sumber pendidikan.
9. Apa saja jenis sumberdaya pendidikan yang ada di pesantren? Apa sudah didokumentasikan?
10. Apakah sumberdaya pendidikan yang ada telah sesuai dengan kebutuhan pesantren?
11. Apakah pesantren sudah mengidentifikasi sumberdaya pendidikan baik perorangan atau lembaga?

**C. Tentang sejarah dan perkembangan pondok.**

1. Kapan pondok ini didirikan? siapa pendirinya?
2. Kenapa Pondok Ini dinamakan Nurul Bayan?
3. Tolong bapak ceritakan sejarah berdirinya dan bagaimana perkembangannya?
4. Menurut bapak, apa yang melatar belakangi pendirian pondok ini?, apa misi, visi dan tujuannya?
5. Bagaimana sistim pembelajaran di pondok ini?
6. Metode Pembelajaran apa saja yang digunakan di pondok ini?
7. Pertanyaan untuk Ibu H Mudrikah Salamah:
  - 7.1. Siapa nama bapaknya Abdul Karim ? kalau ibu nama lengkapnya? Berapa saudaranya Abdul Karim? Apa pekerjaan bapak dan ibu pada saat itu?
  - 7.2. Dimana Abdul Karim belajar agama pertama kali? Dimana saja bapak mengajar pada saat itu?

Lampiran 3 : Jawaban Responden

## **JAWABAN RESPONDEN**

### **A. Jawaban Pimpinan Pesantren tentang indikator PBM**

1. Apakah ada upaya pesantren untuk menurunkan angka anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Apakah pesantren memberikan bantuan beasiswa bagi siswa yang kurang mampu? Apa bentuk bantuan yang diberikan?

Upaya yang dilakukan pesantren dalam rangka menurunkan angka anak usia sekolah yang tidak bersekolah dengan menugaskan beberapa guru junior pesantren secara terjadwal untuk membimbing dan mengajar anak-anak usia sekolah sekitar pesantren untuk belajar membaca Alqur'an dengan harapan dapat terotivasi untuk melanjutkan studi di pesantren, karena persyaratan khusus yang diberlakukan pesantren adalah bahwa setiap calon siswa yang ingin belajar dipesantren Nurul Bayan harus lulus dalam test Alquran selain test bahasa Indonesia, matematika, menulis arab dan psycho test.

Bagi para siswa yang sudah belajar di pesantren dan memiliki ekonomi lemah, pesantren memberikan keringanan dengan memberikan keringanan dalam pembayaran iuran pondok. Mereka yang kurang mampu diberikan keringanan dengan membayar setengah dari nilai yang sudah ditentukan (yaitu sejumlah Rp 60.000,- perbulan).bahkan mereka yang tergolong sangat tidak mampu dibebaskan dari pembayaran iuran.

Untuk mengetahui para siswa yang dianggap kurang mampu yaitu dengan melihat tunggakan mereka dan setelah itu mengundang orang tua mereka untuk datang ke pondok, dan apabila ternyata orang tua mereka betul-betul tidak mampu maka anak tersebut berhak mendapat bantuan atau keringanan dengan persetujuan pimpinan pesantren. Selain bantuan langsung yang diberikan pesantren, pesantren juga menyalurkan bantuan pemerintah berupa BSM (Bantuan Sosial Miskin) kepada siswa yang kurang mampu.

2. Apa yang dilakukan pesantren dalam menanggulangi ketimpangan antar kelompok social ekonomi?

Dalam upaya menanggulangi ketimpangan antar kelompok social ekonomi, pesantren menyalurkan dana BSM kepada siswa yang kurang mampu dengan sepengetahuan wali murid masing-masing. Selain itu pihak pesantren juga

melibatkan para wali murid atau santri yang membutuhkan pekerjaan dengan ikut mengambil bagian pada usaha kelapa dan peternakan.

Untuk peternakan saat ini pesantren memiliki usaha peternakan sapi dan itik. Untuk pemeliharaan itik petelur, pesantren menugaskan beberapa santri untuk memelihara itik dengan catatan bahwa hasil yang diperoleh dapat dimanfaatkan santri untuk meringankan beban hidupnya di pesantren. Dan untuk pemeliharaan itik petelur ini, berada didalam kompleks pesantren. Adapun peternakan sapi, pesantren memberikan kesempatan kepada wali murid yang membutuhkan dengan sistim bagi hasil. Setiap wali murid dapat memelihara 2 sampai dengan 3 ekor sapi dirumah masing-masing. Saat ini pesantren memiliki 37 ekor sapi yang ada di pelihara oleh 13 orang.

3. Bagaimana upaya pesantren dalam mengatasi kekurangan guru? Apakah para guru diberikan insentif? Berapa? Apakah pernah diadakan pemindahan tugas guru dari satu tugas ketugas lain? Bagaimana caranya?.

Masalah yang dihadapi pesantren adalah kurangnya tenaga guru yang professional khususnya guru guru bahasa Arab dan ilmu ilmu agama, karena pengajaran agama diajarkan dengan menggunakan bahasa Arab , Oleh sebab itu untuk mengantisipasi hal tersebut telah dibuka program ma'had Ali bekerjasama dengan universitas Nurul Hakim dengan membuka fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Selain itu langkah yang diambil pesantren sekaligus merupakan langkah antisipasi yaitu dengan mengirim para lulusan pesantren /para guru untuk melanjutkan studi di beberapa perguruan tinggi di beberapa pesantren di Jawa seperti di ISID (Institut Studi Islam Darussalam) di Gontor dan IDIA di Madura untuk menempuh program S 1 dan S 2. Sedangkan untuk guru guru pada bidang studi Umum tidak terlalu banyak kendala karena pihak pesantren telah memanfaatkan tenaga tenaga guru dari luar pondok yang memiliki kwlifikasi sesuai dengan jenjang.

Di pesantren ini guru diberikan insentif (ihsaniyah). Pemberian Ihsaniyah diberikan sesuai dengan pengabdian dan bukan di sesuaikan dengan jumlah jam mengajar. Pengabdian yang dimaksud disini adalah lama pengabdiannya dipesantren dan tingkat keilmuannya. Sehingga penerimaan ihsaniyah masing masing guru sangat ditentukan oleh pengabdiannya dan sebagai penentu dalam memberikan ihsaniyah ini ditentukan oleh pimpinan pesantren.

Untuk pemindahan tugas guru, pihak pesantren tetap melaksanakan hal ini karena menurut pimpinan pesantren, guru di pondok pesantren Nurul Bayan mempunyai tiga peran yaitu peran sebagai pengajar, peran sebagai santri/mahasiswa (agar terus belajar sepanjang hayat), dan peran sebagai petugas operasional lembaga dengan menugaskan para guru di beberapa bagian yang ada di pesantren seperti bagian pembangunan, peternakan, Tata Usaha, pengajaran, pengasuhan dan lain-lain. Hal tersebut dimaksudkan untuk cross-duty bagi para guru agar nantinya dapat dijadikan pelajaran dan pengalaman setelah mereka terjun ke masyarakat.

4. Apa yang dilakukan pesantren dalam Peningkatan sarana/prasarana pendidikan? Dari mana sumber pendanaannya? Apakah ada bantuan dari luar pesantren? Bagaimana bentuk bantuan tersebut?

Peningkatan sarana dan prasarana di pesantren merupakan program jangka panjang pesantren yang dilakukan pesantren setiap waktu tanpa berhenti. Menurut pimpinan pesantren setiap tahun dana yang dikeluarkan tidak kurang dari 200 juta. Sedangkan sumber dannya berasal dari dana pemerintah seperti dana stimulan, block grand, dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), bantuan Dunia Islam (Haiatul Igosah Al-Islamiyah) dan selain itu diperoleh dari para anshor pondok dan para muhsinin yang diperoleh dari para wali murid, para keluarga besar haji baik dalam bentuk infaq, sadaqoh dan zakat.

Untuk dana donatur ini tidak kurang dari 100 juta untuk setiap tahunnya. Adapun bentuk bantuan yang diterima pesantren selain dalam bentuk uang, juga diterima dalam bentuk material seperti pasir, batu bata, bata merah dan semen.

5. Apa yang dilakukan pesantren dalam meningkatkan social ekonomi para wali murid yang berpenghasilan rendah?

Dalam upaya meningkatkan social ekonomi para wali murid yang berpenghasilan rendah, pihak pesantren telah memberikan kesempatan kepada para wali murid yang membutuhkan yang berada disekitar pesantren untuk beternak sapi milik pesantren dengan cara bagi hasil.

6. Bagaimana mengarahkan wali murid agar dapat membantu anak-anak mereka belajar dengan baik?

Dalam mengarahkan wali murid agar putra-putri mereka bisa belajar dengan baik, pesantren mengadakan beberapa kegiatan diantaranya; a. Musyawarah

Bulanan untuk para wali murid yang dikemas dalam bentuk pengajian yang dilakukan setiap bulan. b. Pertemuan rutin yang diadakan 3 kali dalam satu tahun yaitu pada pertemuan awal tahun, pertemuan akhir tahun dan pada pertemuan pembagian raport sekolah. Pada kesempatan ini dimanfaatkan untuk memberikan pengarahan, masukan, motivasi dan evaluasi bagi perkembangan putra putri mereka.

7. Apa upaya yang dilakukan pihak pesantren dalam mengarahkan santri agar tertarik dalam bidang studi tertentu?

Untuk memberikan kesadaran kepada para santri dalam bidang studi tertentu, pesantren telah membuat program Kompil (Kompetensi Pilihan) dengan memanfaatkan jam siang (dari jam 2.00 s/d jam 3.30). Dalam Kompil ini diberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk memilih satu diantara bidang studi yang di siapkan seperti program eksak, bahasa, seni kaligrafi dan hafalan alqur'an.

8. Apa yang dilakukan pesantren dalam meningkatkan kemampuan guru dalam pendayagunaan alat dan sumber pendidikan?.

Untuk meningkatkan kemampuan guru dalam penggunaan alat dan sumber daya pendidikan, diadakan work-shop 2 kali dalam satu tahun yang diikuti oleh semua guru baik guru junior maupun senior.

9. Apa saja jenis sumberdaya pendidikan yang ada di pesantren? Apa sudah didokumentasikan?

Jenis Sumber Daya yang ada dipesantren selain sumber daya alam dan sumber daya manusia. Dan sudah didokumentasikan.

10. Apakah sumberdaya pendidikan yang ada telah sesuai dengan kebutuhan pesantren?

Sumber daya yang ada masih jauh dari harapan, hanya pesantren berusaha memanfaatkan sumber daya yang ada secara maksimal, khusus yang berkaitan dengan laboratorium bahasa selain LAB yang ada, pesantren juga sangat mengoptimalkan LAB alami yang ada.

11. Apakah pesantren sudah mengidentifikasi sumberdaya pendidikan baik perorangan atau lembaga?

Pesantren sudah mengidentifikasi sumberdaya pendidikan baik perorangan atau lembaga, hal tersebut dapat dilihat dari Data sumber daya manusia dan

sumber daya alam, dan hal ini dapat dilihat dari data keadaan guru dan data sarana dan prasarana.

### **B. Jawaban Pimpinan Pesantren tentang Indikator Implementasi:**

1. Apakah kebijakan pemerintah tentang Pendidikan Berbasis Masyarakat telah pesantren dipahami oleh para ustadz di pondok ini?

Kebijakan pemerintah tentang Pendidikan Berbasis Masyarakat belum dipahami secara teori oleh para ustadz di pondok pesantren ini, namun secara praktis sudah dapat dijalankan secara baik.

2. (kalau belum), Apakah ada langkah langkah yang diambil pesantren dalam rangka sosialisasi kebijakan pemerintah tersebut?

Untuk memberikan pemahaman kepada para ustadz di pondok pesantren ini, diadakan work-shop 2 kali dalam satu tahun.

3. Menurut bapak, pemerintah telah memberlakukan Standar nasional pendidikan, Apakah dengan diberlakukan PBM di masyarakat telah sesuai dengan prinsip dan kultur pondok? kenapa?

Diberlakukan PBM di pesantren telah sesuai sesuai dengan prinsip dan kultur pondok karena Standar nasional pendidikan merupakan suatu kebutuhan pesantren yang terkait erat dengan beberapa hal yang ada di pesantren demi tercapainya tujuan pendidikan pesantren.

4. Pelaksanakan PBM masih terkait dengan aturan pemerintah berupa Standar nasional Pendidikan. Bagaimana pendapat bapak tentang hal tersebut?

Beberapa Standar Nasional merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan standar yang ditetapkan pesantren, dan disisi lain standar-standar nasional tersebut merupakan kebutuhan yang harus ada di pesantren.

5. Menurut bapak, apakah Standar nasional pendidikan sudah bisa terlaksana dengan baik di pondok bapak? Apakah ada kendalanya? (kalau ada) apa kendalanya?

Standar nasional pendidikan sudah bisa terlaksana dengan baik hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan kurikulum, luas kampus yang dimiliki pesantren dan beberapa program penunjang termasuk juga pemanfaatan LAB alami. Pelaksanaan SNI mempunyai kendala pada terbatasnya waktu yang dimiliki pesantren hal ini disebabkan banyaknya muatan kurikulum pesantren, keadaan

tersebut menyebabkan berkurangnya waktu untuk beberapa materi pesantren yang merupakan tujuan utama pelaksanaan PBM di pesantren.

6. Bagaimana komitmen pihak pesantren untuk menjalankan Standar Nasional Pendidikan pada Pendidikan Berbasis Masyarakat?

Komitmen pihak pesantren untuk menjalankan Standar Nasional Pendidikan pada Pendidikan Berbasis Masyarakat cukup serius karena beberapa Standar Nasional Pendidikan yang ditetapkan pemerintah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan kurikulum pesantren.

7. Bagaimana bentuk Kurikulum yang dilaksanakan di pesantren ini? Apakah kurikulum pendidikan nasional sudah dapat berjalan dengan baik atau belum?

Kurikulum yang dilaksanakan di pesantren ini adalah merupakan perpaduan antara kurikulum Pondok Modern Gontor dengan Kurikulum Pendidikan Nasional. Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Nasional sudah berjalan dengan baik dan semua materi yang ditetapkan oleh pemerintah sudah diajarkan semua hanya masalah waktu/forsi waktunya harus menyesuaikan dengan keadaan pesantren.

8. Menurut bapak, Apakah jumlah pengajar (ustadz) sudah memadai secara, kualitas dan kuantitas sesuai dengan aturan pemerintah? (kalau belum kenapa?)

Tenaga pengajar (ustadz) masih belum memadai baik secara kualitas maupun kuantitas sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah, lebih pada mata pelajaran agama

9. Apakah sarana dan prasarana pendidikan sudah cukup memadai? apa saja yang sudah tersedia, dan apa saja yang belum tersedia?.

Sarana dan prasarana pendidikan sudah cukup memadai walaupun disana sini masih ada kekurangan dan perlu penyempurnaan.

10. Dengan banyaknya materi pondok yang harus diajarkan di pondok bapak, apakah pemberlakuan Standar nasional pendidikan tidak mengganggu proses belajar mengajar atau kegiatan lain? (kalau mengganggu), apa gangguannya? dan solusi apa yang bapak ambil?.

Pesantren merasakan cukup berat dalam melaksanakan beberapa kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka memenuhi tuntutan standar Nasional, Oleh sebab itu seharusnya pemerintah perlu memberikan kebijakan

tersendiri bagi pesantren khususnya lebih lebih yang berkaitan dengan kurikulum, karena dampak yang terjadi dari pelaksanaan kurikulum nasional, target kurikulum pesantren tidak sesuai dengan harapan.

11. Apakah ada pengontrolan dari pihak pimpinan pondok atau kepala sekolah dalam Pelaksanaan PBM?

Pengontrolan dari pihak pimpinan pondok atau kepala sekolah dalam Pelaksanaan PBM tetap ada yaitu dilaksanakan setiap pertemuan kamisan.

12. Apakah terdapat pola-pola hubungan dalam struktur birokrasi di pondok pesantren Nurul Bayan?

Untuk pola-pola hubungan dapat dilihat dari struktur organisasi Pondok Pesantren Nurul Bayan..

13. Bagaimana hubungan antara pimpinan Pesantren, Kepala sekolah dan para pengajar?

Hubungan antara pimpinan Pesantren, Kepala sekolah dan para pengajar cukup baik karena pendekatan yang digunakan oleh para pimpinan baik pimpinan Pesantren maupun kepala sekolah adalah pendekatan kemanusiaan dan pendekatan program, bukan merupakan delegasi atau perintah.

14. Apakah sudah ada pembagian tugas diantara para pelaksana kebijakan di pondok pesantren? Bagaimana bentuk pembagian tugas tersebut?

Sudah ada pembagian tugas diantara para pelaksana kebijakan di pondok pesantren, bentuk pembagian tugas tersebut telah diatur sesuai dengan tugas dan jabatan masing-masing.

15. Di pondok Agar kegiatan di pesantren ini berjalan dengan baik, diperlukan SOP (Standar Operasional Prosedur). Apakah pihak pesantren telah memiliki SOP?.

pesantren ini tidak ada SOP, namun telah ada pembagian tugas pada masing-masing bagian.

16. Apa harapan pesantren dalam rangka pengembangan dan kemajuan pendidikan berbasis Masyarakat di pesantren ini?

Agar pendidikan berbasis Masyarakat dapat berjalan baik di pesantren ini, Selain usaha-usaha yang dilakukan pesantren, pemerintah perlu memberikan

kebijakan tersendiri kepada pesantren khususnya yang berkaitan dengan standar nasional pendidikan.

### **C. Jawaban Pimpinan Pesantren tentang Sejarah dan perkembangan pondok**

1. Kapan pondok ini didirikan? siapa pendirinya?

Pondok ini didirikan pada tanggal 19 November 1991. Para pendirinya adalah: H. Abdul Ghofur Rowi, Hj. Mudrikah Salamah dan H. Abdul Karim.

2. Kenapa Pondok Ini dinamakan Nurul Bayan?

Dinamakan Nurul Bayan, karena untuk mengenang dan mengambil barokah dari nama seorang da'i yang berda'wah dan membawa Islam ke di Bayan kala itu bernama Nurul Bayan Al-Anshari.

3. Tolong bapak ceritakan sejarah berdirinya dan bagaimana perkembangannya?

Pondok Pesantren Nurul Bayan berdiri pada tanggal 19 November 1991, diatas tanah sewaan seluas 4 are dengan santri pertama hanya 4 orang. Alhamdulillah satu tahun kemudian Pondok Pesantren Nurul Bayan sudah memiliki lahan sendiri seluas 4 Hektar. dari situlah segalanya dimulai. Pendidikan dikemas dengan system mu' alimin dengan masa belajar 6 tahun.

Pada tahun 1995 didirikanlah Madrasah Tsanawiyah dan pada tahun 1998 didirikan pula Madrasah Aliyah. Tapi tetap mengutamakan program Mu'allimin. Dalam rangka peningkatan dan pemantapan guru-guru, maka pada tahun 2008 telah berdiri pula Ma'had Aly dengan masa belajar 4 tahun. Dari tahun ke tahun Alhamdulillah respon dan kepercayaan masyarakat terus meningkat. Dengan mujahadah dari taufiq Allah SWT. Pada Tahun Pelajaran ini (2011-2012) Pondok Pesantren Nurul Bayan sudah berdiri diatas lahan 6,5 Hektar dengan jumlah santri 328 putra-putri dan jumlah guru 40 orang.

4. Menurut bapak, apa yang melatar belakangi pendirian pondok ini?, apa misi, visi dan tujuannya?

Yang melatar belakangi pendirian pondok ini adalah karena hajat masyarakat pada saat itu untuk mendambakan pendidikan pesantren, Disamping didorong oleh rasa tanggung jawab terhadap agama, bangsa dan Negara untuk

dapat melahirkan kader munzirul qoum dan ummahat sholihah yang mampu dalam berbagai lapangan kehidupan.

Adapun Visinya adalah Menjadikadan Pondok Pesantren Nurul Bayan sebagai Tempat Penyemaian Kader Umat yang memiliki Kompetensi dalam bidang ilmu-ilmu ke Islaman, bahasa Al-Qur'an dan ilmu-ilmu social. Sedangkan Misinya adalah: Membentuk lembaga-lembaga pendidikan, Memperluas unit-unit usaha ekonomi Pondok Pesantren dan Meningkatkan pelayanan umat.

5. Bagaimana sistim pembelajaran di pondok ini?

Pembelajaran di pondok ini menggunakan sistim klasikal dan dalam kurikulumnya memadukan antara kurikulum pesantren (Kurikulum Pondok Gontor) dan kurikulum pendidikan nasional.

6. Metode Pembelajaran apa saja yang digunakan di pondok ini?

Metode Pembelajaran yang digunakan di pondok ini adalah selain menggunakan metode modern, pondok ini juga tetap mempertahankan metode pesantren salaf /tradisional seperti wetonan, bandongan atau sorogan. Metode tradisional ini tetap dipertahankan dengan maksud untuk mendidik para santri tentang keptuhan kepada para kiyai dan pembantu kiyai/Ustadz dan untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan.

**D. Jawaban Ibu H. Mudrikah Salamah tentang Pimpinan Pesantren.**

1. Siapa nama bapaknya Abdul Karim ? kalua ibu nama lengkapnya? Berapa saudara Abdul Karim? Apa pekerjaan bapak dan ibu pada saat itu?

Nama bapak H. Abdul Ghafur dan saya sendiri Mudrikah salamah. Dia bersaudara 7 orang , 4 laki dan 3 perempuan. Bapak pada saat itu berdagang dan mengajar di Pondok Pesantren Darul Qur'an Bengkel kecamatan Labuapi sekitar tahun 1955. Tahun 1967 bapak bersama anak-anaknya pindah dari bengkel ke Tanjung, membuka toko dan mendirikan yayasan Sunan Kalijaga dan malamnya berdakwah maklum saat itu masih banyak waktu telu. Saat itu Abdul karim baru berusia 4 atau lima hari hari saja.

2. Dimana Abdul Karim belajar agama pertama kali? Dimana saja bapak mengajar pada saat itu?

Pertama kali belajar dari ayahnya sambil sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Tanjung, setelah itu dikirim ke Gontor dan belajar di pondok embahnya di Nganjuk. Terus berangkat belajar ke Bagdad.

#### **E. Jawaban Direktur TMI tentang Indikator Implementasi**

1. Apakah kebijakan pemerintah tentang Pendidikan Berbasis Masyarakat telah dipahami oleh para ustadz di pondok pesantren ini?

Kebijakan Pendidikan Berbasis Masyarakat Belum dipahami oleh semua ustadz namun secara garis besar mereka sudah menjalankan.

2. (Kalau belum), Apakah ada langkah langkah yang diambil pesantren dalam rangka sosialisasi kebijakan pemerintah tersebut?

Langkah yang diambil pesantren dengan mengadakan work-shop sebanyak dua kali dalam setahun yaitu pada awal tahun dan pada pertengahan tahun, Untuk Pertemuan Kamis biasanya membahas beberapa hal diantaranya: Laporan pengontrolan kelas, Evaluasi program pendidikan dan pengajaran, *Naqduh Mudarrisin* (Supervisi pelaksanaan pengajaran) bagi guru-guru baru, dan Penyampaian informasi tentang program-program pendidikan.

3. Menurut bapak, pemerintah telah memberlakukan Standar nasional pendidikan, Apakah dengan diberlakukan Standar nasional pendidikan telah sesuai dengan prinsip dan kultur pondok? kenapa?

Diberlakukan PBM di pesantren telah sesuai dengan prinsip dan kultur pondok karena Standar nasional pendidikan karena pemberlakuan PBM merupakan suatu kebutuhan pesantren demi tercapainya tujuan pendidikan.

4. Pelaksanakan PBM masih terkait dengan aturan pemerintah berupa Standar nasional Pendidikan. Bagaimana pendapat bapak tentang hal tersebut?

Standar Nasional pendidikan merupakan program dan bagian dari standar yang ditetapkan pesantren,

5. Menurut bapak, apakah Standar nasional pendidikan sudah bisa terlaksana dengan baik di pondok bapak? Apakah ada kendalanya? (kalau ada) apa kendalanya?

Standar nasional pendidikan sudah bisa terlaksana dengan baik. kendala yang dihadapi adalah terbatasnya waktu yang dimiliki pesantren karena banyaknya

muatan kurikulum pesantren, Oleh sebab itu pesantren menjadwalkan waktu pada sore dan malam hari untuk melengkapi kekurangan waktu.

6. Bagaimana komitmen pihak pesantren untuk menjalankan Standar Nasional Pendidikan pada Pendidikan berbasis masyarakat?

Pihak pesantren memiliki komitmen yang serius dalam menjalankan Standar Nasional Pendidikan pada Pendidikan Berbasis Masyarakat.

7. Bagaimana bentuk Kurikulum yang dilaksanakan dipesantren ini? Apakah kurikulum pendidikan nasional sudah dapat berjalan dengan baik atau belum?

Kurikulum yang dilaksanakan dipesantren ini adalah merupakan perpaduan antara kurikulum Pondok Modern Gontor dengan kurikulum pendidikan nasional. Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Nasional sudah berjalan dengan baik dan semua materi yang ditetapkan oleh pemerintah sudah diajarkan semua hanya terkendala pada kurangnya waktu karena materi pesantren cukup banyak.

8. Menurut bapak, Apakah jumlah pengajar (ustadz) sudah memadai secara kualitas dan kuantitas sesuai dengan aturan pemerintah? (kalau belum) kenapa?

Tenaga pengajar (ustadz) cukup memadai, walaupun secara formal masih banyak guru yang belum sesuai dengan ketentuan pemerintah.

9. Apakah sarana dan prasarana pendidikan sudah cukup memadai? apa saja yang sudah tersedia, dan apa saja yang belum tersedia?.

Sarana dan prasarana pendidikan dipesantren ini sudah lebih dari cukup walaupun disana sini masih perlu disempurnakan.

10. Dengan banyaknya materi pondok yang harus diajarkan di pondok bapak, apakah pemberlakuan kurikulum nasional tidak mengganggu kegiatan lain? (Kalau mengganggu), apa gangguannya? Dan solusi apa yang bapak ambil?.

Pelaksanaan pelaksanaan merugikan pondok, karena dengan diberlakukannya kurikulum nasional waktu untuk pelaksanaan kurikulum pesantren agak sedikit tersita. Solusi yang diambil adalah dengan menyiapkan waktu malam untuk menambah kekurangan dalam bentuk *muwajjah*.

11. Apakah ada pengontrolan dari pihak pimpinan pondok atau kepala sekolah dalam Pelaksanaan PBM?

Pengontrolan dari pihak pimpinan pondok atau kepala sekolah dalam Pelaksanaan PBM tetap ada yaitu dilaksanakan setiap pertemuan kamisan.

12. Apakah terdapat pola-pola hubungan dalam struktur birokrasi di pondok pesantren Nurul Bayan?

Pola-pola hubungan dapat dilihat dari struktur organisasi Pondok Pesantren Nurul Bayan.

13. Bagaimana hubungan antara pimpinan Pesantren, Kepala sekolah dan para pengajar?

Hubungan antara pimpinan Pesantren, Kepala sekolah dan para pengajar cukup baik karena bekal setiap pelaksana kebijakan di pondok ini didasari atas suasana keikhlasan.

14. Apakah sudah ada pembagian tugas diantara para pelaksana kebijakan di pondok pesantren? Bagaimana bentuk pembagian tugas tersebut?

Sudah ada pembagian tugas diantara para pelaksana kebijakan di pondok pesantren, bentuk pembagian tugas tersebut dimana masing-masing bagian melaksanakan tugas sesuai dengan bagian masing-masing.

15. Agar kegiatan di pesantren ini berjalan dengan baik, diperlukan SOP (Standar Operasional Prosedur). Apakah pihak pesantren telah memiliki SOP?

Belum ada SOP di pondok ini tapi masing-masing bagian sudah mengetahui tugas masing-masing.

16. Apa harapan pesantren dalam rangka pengembangan dan kemajuan pendidikan berbasis Masyarakat di pesantren ini?

Pemerintah seharusnya memberikan perhatian kepada pondok dengan melengkapi beberapa kebutuhan pendidikan seperti pergedungan dan tenaga guru.

#### **F. Jawaban Kepala Mts tentang Indikator Implementasi:**

1. Apakah kebijakan pemerintah tentang Pendidikan Berbasis Masyarakat pesantren telah dipahami oleh para ustadz di pondok ini?

Belum semua ustadz memahami Kebijakan pemerintah tentang Pendidikan Berbasis Masyarakat namun secara garis besar mereka sudah menjalankan.

2. (Kalau belum), Apakah ada langkah langkah yang diambil pesantren dalam rangka sosialisasi kebijakan pemerintah tersebut?

Langkah yang diambil pesantren dengan mengadakan work-shop pada awal tahun dan pada pertengahan tahun, selain itu kesepatan kamsian digunakan untuk menyampaikan beberapa agenda termasuk program pendidikan.

3. Apakah dengan diberlakukan PBM di masyarakat telah sesuai dengan prinsip dan kultur pondok? kenapa?

Diberlakukan PBM di pesantren telah sesuai dengan prinsip dan kultur pondok karena Standar nasional pendidikan karena pemberlakuan PBM merupakan suatu kebutuhan pesantren demi tercapainya tujuan pendidikan.

4. Pelaksanakan PBM masih terkait dengan aturan pemerintah berupa Standar nasional Pendidikan. Bagaimana pendapat bapak tentang hal tersebut?

Standar Nasional pendidikan merupakan bagian dari program pendidikan di pesantren. karena beberapa standar yang ditentukan pemerintah juga merupakan program pesantren.

5. Menurut bapak, apakah Kurikulum nasional sudah bisa terlaksana dengan baik di pondok bapak? apakah ada kendalanya? (kalau ada) Apa kendalanya?

Standar nasional pendidikan sudah bisa terlaksana dengan baik. kendala yang dihadapi adalah terbatasnya waktu yang dimiliki pesantren karena banyaknya muatan kurikulum pesantren, sehingga program pesantren tidak sesuai dengan harapan.

6. Bagaimana komitmen pihak pesantren untuk menjalankan Standar Nasional Pendidikan pada Pendidikan Berbasis Masyarakat?

Komitmen pihak pesantren dalam menjalankan Standar Nasional Pendidikan di Pondok pesantren cukup serius hal ini bisa dilihat dari beberapa tenaga pengajar yang mengajar pada bidang studi umum sudah banyak yang memiliki gelar S 1.

7. Bagaimana bentuk Kurikulum yang dilaksanakan dipesantren ini? Apakah kurikulum pendidikan nasional sudah dapat berjalan dengan baik atau belum?

Kurikulum yang dilaksanakan dipesantren ini adalah merupakan perpaduan antara kurikulum Pondok Modern Gontor dengan Kurikulum Pendidikan Nasional. Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Nasional sudah berjalan dengan baik dan semua materi yang ditetapkan oleh pemerintah sudah diajarkan semua hanya terkendala pada kurangnya waktu karena materi pesantren cukup banyak.

8. Menurut bapak, Apakah tenaga pengajar (ustadz) sudah memadai secara kualitas dan kuantitas sesuai dengan aturan pemerintah? (kalau belum) kenapa?

Secara kuantitas tenaga pengajar (ustadz) cukup memadai, namun secara kualitas belum karena masih banyak guru yang masih berijazah SLTA dan belum sesuai dengan ketentuan pemerintah.

9. Apakah sarana dan prasarana pendidikan sudah cukup memadai? apa saja yang sudah tersedia, dan apa saja yang belum tersedia?.

Sarana dan prasarana pendidikan dipesantren ini sudah cukup memadai walaupun masih ada beberapa kekurangan seperti ruang kelas yang belum permanen.

10. Dengan banyaknya materi pondok yang harus diajarkan di pondok bapak, apakah pemberlakuan kurikulum nasional tidak mengganggu kegiatan lain? (kalau mengganggu), apa gangguannya? dan solusi apa yang bapak ambil?.

Pelaksanaan kurikulum nasional tidak merugikan pondok, karena dengan diberlakukannya kurikulum nasional berarti kita mengikuti perkembangan khususnya berkaitan dengan bidang sains dan ilmu-ilmu umum.

11. Apakah ada pengontrolan dari pihak pimpinan pondok atau kepala sekolah dalam Pelaksanaan PBM?

Pengontrolan untuk Pelaksanaan PBM tetap ada yaitu pada setiap kumpulan kamisan

12. Apakah sudah ada pembagian tugas diantara para pelaksana kebijakan di pondok pesantren? Bagaimana bentuk pembagian tugas tersebut?

Sudah ada pembagian tugas diantara para pelaksana kebijakan di pondok pesantren, bentuk pembagian tugas tersebut dengan memberikan tugas dan wewenang kepada setiap pelaksana program sesuai dengan bagian masing-masing.

13. Apakah terdapat pola-pola hubungan dalam struktur birokrasi di pondok pesantren Nurul Bayan?

Pola-pola hubungan dapat dilihat dari struktur organisasi Pondok Pesantren Nurul Bayan.

14. Bagaimana hubungan antara pimpinan Pesantren, Kepala sekolah dan para pengajar?.

Hubungan antara pimpinan Pesantren, Kepala sekolah dan para pengajar cukup baik semua pekerjaan dilandasi dengan suasana keikhlasan dan rasa pengabdian kepada agama. Agar kegiatan di pesantren ini berjalan dengan baik, diperlukan SOP (Standar Operasional Prosudur). Apakah pihak pesantren telah memiliki SOP? Belum tersedia SOP di Pondok Ini, namun masing-masing bagian telah menjalankan tugas sesuai dengan tugas yang di amanatkan pimpinan.

15. Apa harapan pesantren dalam rangka pengembangan dan kemajuan pendidikan berbasis Masyarakat di pesantren ini?

Agar pemerintah dapat memberikan bantuan berupa tenaga guru dan kelengkapan sarana dan prasarana.

UNIVERSITAS TERBUKA

**Lampiran 4:****Susunan formasi Pengurus Pondok Pesantren anurul Bayan.**

Pimpinan	: KH.Abdul Karim Abdul Ghofur
Skretaris	: Ust.Aki Mawardi Idham Khalid Ust.Zanul Majdi
Tata Usaha	: Ust.Wawan Guna Irawan
Pengajaran	: Ust.Baharudin Ust.Izat Ibrohim Ust.Iswandi Ust.Gontor
Kepala MTs.	: Ust.Baharudin, A.Ma
Kepala MA	: Ust.Abdul Malik, S.Sos
MPO Putra	: Ust. Pardi Musleh Ust.Ahmad Turmuzi Ust.Al-Amien
MPO Putri	: Usth.Amalia Hifziah Usth.D.Febria Mustika
Pramuka	: Ust. Fikri Hadi Ust.Gontor
P3SP	: Ust.Satriadi Ust.Muniri Abbas
Koperasi	: Usth. Nurul Walidaen
Koperasi Putri	: Usth.Nurul Hasanah
Peternakan & Penghijauan	: Ust.Saeful Bahri
Perkebunan & Pertanian	: Ust.Artadi
IKMAL	: Ust.Purniadi Ust.Hasyim
Kesejahteraan Dapur	: Ust.Ahmad Mustahik
Kesejahteraan Kesehatan	: Ust.R.Jasmawadi Usth.Jumiaturrodiah
Konveksi	: Ibu Jefri
Konveksi	: Usth.Siti Mukinah
Tata Boga	: Ibu Srimulyani Usth. Nurul Isnaeni
Kerajinan Tangan	: Usth.Triwiyanto Ust.Fahrurrozi
Pelayanan Masyarakat	: Ust.H.L.Hendri Lc Ust. Agus Salim Ust.Solehuddin
Publikasi & Media	: Ust.Edi Swarno Ust.Zaenul Arifin.
Sumber:	Dokumentasi Pondok Pesantren anurul Bayan

## Lampiran 5.

Tabel 4.6 Keadaan Fasilitas yang dimiliki Pondok Pesantren Nurul Bayan

No	Jenis Fasilitas	Jumlah Lokal/buah	Keterangan
1	Ruang kelas	7 Lokal	
2	Ruang Auditorium	1 Lokal	
3	Ruang kelas	7 Lokal	
4	Ruang Auditorium	1 Lokal	
5	Ruang Perpustakaan	2 Lokal	
6	Ruang Lab bahasa	1 Lokal	
7	Ruang pimpinan	1 Lokal	
8	Ruang Guru	1 Lokal	
9	Ruang kepala sekolah	1 Lokal	
10	Ruang ibadah	2 buah	
11	jamban (toilet/kamar mandi)	15 Lokal	
12	Gudang	1 buah	
13	Ruang Osis	2 Lokal	
14	ruang konseling	1 Lokal	
15	ruang Keterampilan	3 Lokal	
16	Asrama Guru	4 Lokal	
17	asrama santriwati	4 Lokal	
18	Ruang dapur	1 Lokal	
19	ruang makan	2 Lokal	
20	Lapangan sepak bola	1 buah	

## Lampiran 6

Tabel 4.7: Komponen Mata Pelajaran di PP Nurul Bayan

No	Komponen Mata pelajaran	Nama Mata pelajaran
1	Mata pelajaran Agama dan Kepsantrenan	1. Alqur'an dan Ilmu Tajwid
		2. Hadits
		3. Tauhid
		4. Fikih dan Usul fikih
		5. SKI
		6. Mutalaah
		7. Arabiyah dan Insyah
		8. Nahwu
		9. Sorof
		10. Balagoh
		11. Muhadasah
		12. Mahfuzot
		13. Imla
		14. Khot Arobi
		15. Ilmu Tarbiyah
		2
17. English Lesson		
18. Wise Word		
19. English Grammar		
20. Compositon		
21. Matematika		
22. Fisika		
23. Biologi		
24. Sejarah		
25. PPKN		
26. Antropologi		
27. Bahasa Indonesia		

Sumber: Data hasil survey

Lampiran 7:

Tabel 4.11 Prasarana Pergedungan di Pondok Pesantren Nurul Bayan

No	Jenis Fasilitas	Jumlah Lokal/buah	Keterangan
1	Ruang kelas	7 Lokal	
2	Ruang Auditorium	1 Lokal	
3	Ruang Perpustakaan	2 Lokal	
4	Ruang Lab bahasa	1 Lokal	
5	Ruang pimpinan	1 Lokal	
6	Ruang Guru	1 Lokal	
7	Ruang kepala sekolah	1 Lokal	
8	Ruang ibadah	2 buah	
9	Asrama Guru	4 Lokal	
10	asrama santriwati	4 Lokal	
11	Ruang Osis	2 Lokal	
12	ruang konseling	1 Lokal	
13	Ruang dapur	1 Lokal	
14	ruang makan	2 Lokal	
15	ruang Keterampilan	3 Lokal	
16	jamban (toilet/kamar mandi)	15 Lokal	

Data hasil Survey